



kfr

kajian fiskal regional

Provinsi Sumatera Selatan

Volume 8 Nomor 3, September 2025



Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan

Tim Penyusun

Diterbitkan oleh:

Kanwil DJPb Provinsi Sumsel

Pengarah:

Rahmadi Murwanto (Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel)

Penanggung Jawab:

Setiyo Budi Pramono (Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II)

Reviewer:

Dr. Sukanto, S.E., M.Si. (*Local Expert* Ekonomi dan Fiskal Provinsi Sumsel)
Suwardi (Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B)

Kontributor:

1. Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Regional:

Suwardi, Sola Fide, Anisa Ayufitria Damayanti, Hanip Tarmizi

2. Perkembangan Fiskal Regional:

Jaka Trisna, Muhammad Ferdy Oktavianto, Yudho Bintoro Sandi,
Riedho Hizwar, M. Telly Anggra, Suci Amalia Putri, Sohendar

3. Analisis Tematik:

Hadiyan Lutfi, Jeny Serhan, Haerul Anwar

4. Boks 1. Kajian Fiskal Regional: Dukungan Fiskal dan Teknologi untuk Komoditas Kopi Sumatera Selatan:

M Arief Rahman, S.E., M.M. dan Dr. Ade Silvia
Handayani, S.T., M.T (Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya)

5. Boks 2. Disparitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan

Daffa Kumara (Universitas Brawijaya)

Desain dan Layout:

Sola Fide, Destrian Ahmad Ramadhan, Muhammad Ferdy Oktavianto,
Anisa Ayufitria Damayanti

Alamat Redaksi:

Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai II
Jl. Kapten A. Rivai No. 2-4 Palembang

Situs Web: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/>

Download KFR



Feedback



Kajian Fiskal Regional
Provinsi Sumatera Selatan
Volume 8 Nomor 3, September 2025



Kajian Fiskal Regional diterbitkan
oleh Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Sumsel,
Kementerian Keuangan, dengan
periode publikasi triwulanan

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2025.

KFR berperan menyajikan potret perkembangan pelaksanaan kebijakan fiskal Pemerintah serta implikasinya terhadap perekonomian Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025. Penyusunan KFR ini diharapkan dapat menjadi alat analisis, evaluasi, dan media informasi strategis bagi Kementerian Keuangan dan mitra kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Sumatera Selatan.

Terima kasih kami ucapkan atas dukungan data dan partisipasi semua pihak dalam penyusunan KFR ini. Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut secara berkala untuk mendukung kesinambungan implementasi fiskal daerah Sumatera Selatan. Saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas laporan selanjutnya.

Kami berharap KFR Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III 2025 ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan di Sumatera Selatan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi demi terwujudnya kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Kata Pengantar

Palembang, 28 November 2025

**Kepala Kantor Wilayah DJPb
Provinsi Sumatera Selatan**



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto

Daftar Isi

01

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan Eksekutif	ix
Dashboard	xi

Analisis Ekonomi Regional

1.1	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	3
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	3
1.1.2	Inflasi	10
1.2	Perkembangan Indikator Kesejahteraan	11
1.2.1	Ketenagakerjaan	11
1.2.2	Kemiskinan dan Ketimpangan	13
1.2.3	Nilai Tukar Petani	13
1.2.4	Nilai Tukar Nelayan	14
1.2.5	Indeks Pembangunan Manusia	14
Boks 1	Dukungan Fiskal Inovasi Teknologi untuk Komoditas Kopi Sumatera Selatan	15

02

Analisis Fiskal Regional

2.1	Pelaksanaan APBN Sumsel	18
2.1.1	Pendapatan Negara dan Hibah	19
2.1.2	Belanja Negara	25
2.1.3	Surplus/Defisit APBN	32
2.2	Pelaksanaan APBD Sumsel	32
2.2.1	Pendapatan Daerah	34
2.2.2	Belanja Daerah	36
2.2.3	Surplus/Defisit APBD	37
2.2.4	Pembiayaan Daerah	37
2.2.5	Proyeksi APBD	37
2.3	Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	38
2.3.1	Pendapatan Konsolidasian	38
2.3.2	Belanja Konsolidasian	38
2.3.3	Surplus/Defisit	38
2.3.4	Pembiayaan Konsolidasian	38
Boks 2	Disparitas Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan	39

03

Analisis Tematik

3.1	Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)	44
3.1.1	Pendahuluan	44
3.1.2	Perkembangan Pelaksanaan Program MBG di Sumatera Selatan	44
3.1.3	Dampak MBG Terhadap Keseimbangan Perekonomian Regional	44
3.1.4	Evaluasi Kualitas Layanan MBG	45
3.2	Analisis atas Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	45
3.2.1	Pendahuluan	45
3.2.2	Perkembangan KDKMP di Sumatera Selatan	46
3.2.3	Dukungan Pemerintah untuk Pengembangan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan	49
3.2.4	Tantangan dalam Pengembangan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan	50
3.2.5	Strategi Pengoperasian KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan	50
3.2.6	Rekomendasi: Peran Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengembangan KDKMP di Daerah	51
3.2.7	Potensi Pengembangan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan	51

04

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan Rekomendasi	53
----------------------------	----

Daftar Grafik

01

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (yoy,%)	3
Grafik 1. 2 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Q3 2025	3
Grafik 1. 3 Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara Sumsel	3
Grafik 1. 4 Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Sumsel	3
Grafik 1. 5 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Pengeluaran	4
Grafik 1. 6 Rata-Rata Hasil Survei Konsumen Kota Palembang	4
Grafik 1. 7 Perkembangan Kredit Perbankan di Wilayah Sumsel	5
Grafik 1. 8 Perkembangan PMA dan PMDN Wilayah Sumsel	6
Grafik 1. 9 Perkembangan Neraca Perdagangan Sumsel	6
Grafik 1. 10 Perkembangan Harga Komoditas Internasional	6
Grafik 1. 11 Perkembangan Top Komoditas Ekspor Sumsel (Juta USD)	7
Grafik 1. 12 Pangsa Impor Sumsel Jan-Sep 2025 Menurut Negara Tujuan	7
Grafik 1. 13 Perkembangan Top Komoditas Impor Sumsel (Juta USD)	7
Grafik 1. 14 Pangsa Impor Sumsel Jan-Sep 2025 Menurut Negara Asal	8
Grafik 1. 15 . Perkembangan Aktivitas Bongkar-Muat Luar Negeri Sumsel	8
Grafik 1. 16 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Lapangan Usaha	8
Grafik 1. 17 TPK dan RLM Hotel Berbintang Sumsel	9
Grafik 1. 18 Perkembangan Inflasi Tahunan Sumsel dan Nasional	10
Grafik 1. 19 Inflasi Tahunan September 2025 Provinsi di Regional Sumatera	10
Grafik 1. 20 Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Pengeluaran	10
Grafik 1. 21 Perkembangan Harga Pangan di Wilayah Sumsel (Rp)	10
Grafik 1. 22 Perkembangan Harga Emas (Logam Mulia) ANTAM (Rp)	11
Grafik 1. 23 Perkembangan Inflasi Tahunan Antar Kabupaten/Kota	11
Grafik 1. 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Agustus 2025	11
Grafik 1. 25 Penyerapan Tenaga Kerja Sumsel Menurut Lapangan Usaha	12
Grafik 1. 26 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka	12
Grafik 1. 27 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumsel	13
Grafik 1. 28 Perkembangan Gini Ratio Sumsel	13
Grafik 1. 29 Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel	13
Grafik 1. 30 Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel	14
Grafik 1. 31 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sumsel	14

02

Grafik 2. 1 Perkembangan Pendapatan Negara (c-to-c)	19
Grafik 2. 2 Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan per Jenis	19
Grafik 2. 3 Kontribusi per Jenis Pajak	20
Grafik 2. 4 Perkembangan Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	22
Grafik 2. 5 Perkembangan Volume Ekspor CPO & Turunannya (c-to-c)	22
Grafik 2. 6 Perkembangan Harga Patokan Ekspor CPO & Turunannya	22
Grafik 2. 7 Realiasi per Jenis PNBPN (c-to-c)	24
Grafik 2. 8 Perkembangan Realisasi Belanja (c-to-c)	25
Grafik 2. 9 Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Belanja Negara	25
Grafik 2. 10 Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis	26
Grafik 2. 11 Perkembangan Belanja Pegawai (c-to-c)	26
Grafik 2. 12 Perkembangan Belanja Barang (c-to-c)	26
Grafik 2. 13 Perkembangan Belanja Modal (c-to-c)	26
Grafik 2. 14 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Sumatera Selatan	27
Grafik 2. 15 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Unit Organisasi	27
Grafik 2. 16 Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Unit Organisasi	27
Grafik 2. 17 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi	27
Grafik 2. 18 Kontribusi BPP per Fungsi	28
Grafik 2. 19 Kontribusi Transfer ke Daerah per Jenis	28
Grafik 2. 20 Perkembangan Dana Bagi Hasil (c-to-c)	29

03

Grafik 2. 21 Perkembangan Dana Alokasi Umum (c-to-c)	29
Grafik 2. 22 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik (c-to-c)	30
Grafik 2. 23 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (c-to-c)	30
Grafik 2. 24 Perkembangan Insentif Fiskal (c-to-c)	31
Grafik 2. 25 Perkembangan Dana Desa (c-to-c)	31
Grafik 2. 24 Perkembangan Insentif Fiskal (c-to-c)	31
Grafik 2. 25 Perkembangan Dana Desa (c-to-c)	31
Grafik 2. 26 Perkembangan Hibah ke Daerah (c-to-c)	32
Grafik 2. 27 Perkembangan Surplus/Defisit APBN Sumsel (c-to-c)	32
Grafik 2. 28 Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi per Jenis Pendapatan	34
Grafik 2. 29 Pertumbuhan Realisasi per Jenis Pendapatan Asli Daerah	35
Grafik 2. 30 Pertumbuhan Realisasi per Jenis Pendapatan dari Dana Transfer	35
Grafik 2. 31 Pertumbuhan Realisasi per Jenis Belanja Daerah (c-to-c)	36
Grafik 2. 32 Pertumbuhan Realisasi per Jenis Belanja Operasi (c-to-c)	36
 Grafik 3. 1 Rekapitulasi Inflasi Tahunan (yoy) Provinsi Sumatera Selatan	 44
Grafik 3. 2 Mekanisme Pembiayaan dan Pembangunan Gerai KDKMP	48

Daftar Tabel

02

Tabel 2. 1 Laporan Realisasi APBN s.d. Triwulan III 2024-2025 (c-to-c)	18
Tabel 2. 2 Penerimaan Per Kelompok Pajak (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)	20
Tabel 2. 3 Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan (dalam Miliar Rupiah)	21
Tabel 2. 4 Realisasi Impor dan Bea Masuk per Komoditas	22
Tabel 2. 5 Bea Masuk per Komoditas (dalam miliar rupiah)	23
Tabel 2. 6 Perkembangan PNBPN (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)	24
Tabel 2. 7 Proyeksi Penerimaan Perpajakan (dalam Miliar Rupiah)	24
Tabel 2. 8 Proyeksi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (Miliar Rupiah)	25
Tabel 2. 9 Proyeksi Penerimaan PNBPN (dalam Miliar Rupiah)	25
Tabel 2. 10 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)	28
Tabel 2. 11 Proyeksi Transfer ke Daerah s.d. Triwulan II 2025 (Miliar Rupiah)	32
Tabel 2. 12 Laporan Realisasi APBD Konsolidasian (c-to-c)	33
Tabel 2. 13 Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Sumatera Selatan	35
Tabel 2. 14 Proyeksi Realisasi APBD Tahun 2025	38
Tabel 2. 15 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian	39

03

Tabel 3. 1 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	45
Tabel 3. 2 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan	45
Tabel 3. 3 Jumlah KDKMP Lingkup Sumatera Selatan	46
Tabel 3. 4 Perkembangan KDKMP Per 5 November 2025	47
Tabel 3. 5 Perkembangan Gerai KDKMP Per 5 November 2025	47
Tabel 3. 6 Gerai dan Kemitraan KDKMP Per 5 November 2025	47

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan penguatan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist*, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan menyusun Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2025 ini untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian *output* dan *outcome*-nya yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Sumatera Selatan menunjukkan pemulihan yang stabil dan terjaga. Pada Triwulan III 2025, ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 5,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional (5,04%) maupun tahun sebelumnya (5,04%). Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut berada pada posisi tertinggi kedua di Pulau Sumatera dan sekaligus mempertahankan peran strategisnya sebagai salah satu motor pertumbuhan kawasan. Beberapa indikator kinerja pembangunan juga telah menunjukkan progresnya dengan baik, seperti tingkat pengangguran yang sudah berada di angka 3,69% mengalami penurunan 0,17 persen dibanding Agustus 2024 seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Demikian juga dengan capaian tingkat kemiskinan sebesar 10,15% turun 0,36 persen dari September 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 meningkat menjadi 74,76 meningkat 1,25% dibandingkan tahun 2024. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 naik berada di angka 127,77. Inflasi pada September 2025 sebesar 3,44% meningkat dibanding bulan Juni 2025, namun masih terkendali dalam rentang target $2,5\% \pm 1\%$. Kondisi ketimpangan pendapatan penduduk makin membaik dengan rasio gini per Maret 2025 tercatat di angka 0,311, turun dari periode September 2024 yang sebesar 0,331.

Dari sisi fiskal APBN, Pendapatan Negara selama triwulan III 2025 mencapai 60,65% dari target atau sebesar Rp10,68 triliun, tumbuh 6,79% (yoy) dengan kontributor terbesar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebesar 55,86% dari penerimaan pajak.



Sementara realisasi Belanja Negara mencapai 68,48% dari pagu atau senilai Rp34,27 triliun yang berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada Kementerian / Lembaga sebesar Rp8,68 triliun dan TKD sebesar Rp25,59 triliun. Pertumbuhan negatif terjadi pada BPP yang berkontraksi 30,00% (yoy) sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Namun, Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penopang kinerja belanja APBN sebagai penyangga konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan 5,50% (yoy) sehingga kontraksi belanja negara secara keseluruhan tidak terlalu dalam.

Di tengah transisi pemerintahan baru dan kebijakan efisiensi belanja, kinerja APBD di Sumatera Selatan sampai dengan akhir triwulan III masih *on-track*. Kinerja pendapatan tumbuh positif, mencapai Rp32,27 triliun (66,42% dari target) atau tumbuh 21,35% (yoy), dan kinerja belanja mencapai Rp25,28 triliun (50,26% dari pagu) atau berkontraksi 3,31% (yoy) sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Tantangan dalam pengelolaan APBD Sumsel adalah pada sisi pendapatan daerah walaupun masih didominasi oleh dana transfer, namun Triwulan III 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan signifikan sehingga mengindikasikan akan terjadinya perbaikan kemandirian fiskal daerah. Dari sisi belanja daerah, proporsi belanja operasional masih sangat tinggi, sementara alokasi belanja modal proporsinya masih terbatas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang bertujuan menyediakan akses terhadap makanan bergizi bagi kelompok rentan sekaligus berfungsi sebagai penggerak ekonomi regional. Sampai dengan akhir September 2025, perkembangan MBG di Sumsel telah dilaksanakan pada semua kabupaten/kota. Tercatat ada 335 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dari target 969 SPPG (34,57%) dan 1.003.551 penerima manfaat dari target 2.047.861 orang (49%). Terdapat kendala yaitu isu kualitas makanan yang disajikan, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sinergitas dan kolaborasi semua pemangku kepentingan.

Analisis tematik juga mengangkat isu mengenai perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Setelah terbentuknya 3.258 KDKMP, pada saat ini terdapat 363 Koperasi (11,14%) yang memiliki kantor, 225 koperasi (6,90%) yang telah beroperasi dan 1.994 koperasi (61,20%) yang telah memiliki modal. Kementerian Koperasi telah melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi pendamping dan pengurus KDKMP. Pemerintah mempercepat realisasi infrastruktur berupa pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapan KDKMP serta Kementerian Keuangan merancang skema pembiayaannya. Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan KDKMP di antaranya adalah tata Kelola, literasi, kolaborasi, regulasi, dan digitalisasi. Mengatasi tantangan tersebut strategi pengoperasian yang dapat dilakukan antara lain pembinaan dan pendampingan, agregasi potensi ekonomi lokal, optimalisasi bonus demografi, transformasi digital, dan sinergi lintas sektoral.

Secara umum, kinerja ekonomi dan fiskal Sumsel triwulan III tahun 2025 cukup terkendali. Namun demikian, kinerja ekonomi dan fiskal perlu penguatan agar dapat ditingkatkan pada periode selanjutnya sehingga seluruh target pembangunan dapat terealisasi dan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Dashboard Ekonomi Regional

Indikator Makro Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (c - to - c)



Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh solid pada triwulan III 2025 dengan capaian 5,20% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sumatera.

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Laju Inflasi (%)



Dari sisi harga, inflasi Sumsel mencapai 3,44% (yoy) pada September 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya namun masih berada dalam sasaran target inflasi nasional.

Indikator Kesejahteraan

Selain pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, Perkembangan indikator kesejahteraan Sumsel hingga triwulan III 2025 menunjukkan perkembangan yang terus membaik

Kemiskinan



Per Maret 2025

10,15%



Gini Ratio



s.d.Maret 2025

0,311



Tingkat Pengangguran Terbuka



s.d. September 2025

3,69%



Nilai Tukar Petani



per September 2025

127,77



Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Pengembangan Koperasi

Dari 3,258 KDKMP yang terbentuk di Sumatera Selatan, terdapat 363 Koperasi (11,14%) yang memiliki kantor. Sedangkan koperasi yang telah beroperasi sejumlah 225 koperasi (6,90%) dan koperasi yang telah memiliki modal sejumlah 1.994 koperasi (61,20%).

Tabel 3. 5 Perkembangan KDKMP Per 5 November 2025

No	Kabupaten / Kota	Apakah Memiliki Kantor		Apakah Koperasi Telah Beroperasi		Apakah Sudah Ada Modal	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Banyuasin	9	304	9	304	2	311
2	Empat Lawang	5	151	0	156	156	0
3	Lahat	31	346	31	346	20	357
4	Muara Enim	19	237	19	237	256	0
5	Musi Banyuasin	4	238	4	238	4	238
6	Musi Rawas	35	164	35	164	199	0
7	Musi Rawas Utara	38	51	1	88	4	85
8	Ogan Ilir	12	229	40	201	86	155
9	Ogan Komering Ilir	4	323	6	321	327	0
10	Ogan Komering Ulu	22	135	0	157	157	0
11	Ogan Komering Ulu Selatan	64	195	0	259	259	0
12	Ogan Komering Ulu Timur	9	303	9	303	312	0
13	Penukal Abab Lematang Ilir	1	70	1	70	1	70
14	Lubuk Linggau	7	65	2	70	24	48
15	Pagar Alam	35	0	0	35	35	0
16	Palembang	23	84	23	84	107	0
17	Prabumulih	45	0	45	0	45	0
Jumlah		363	2.895	225	3.033	1.994	1.264

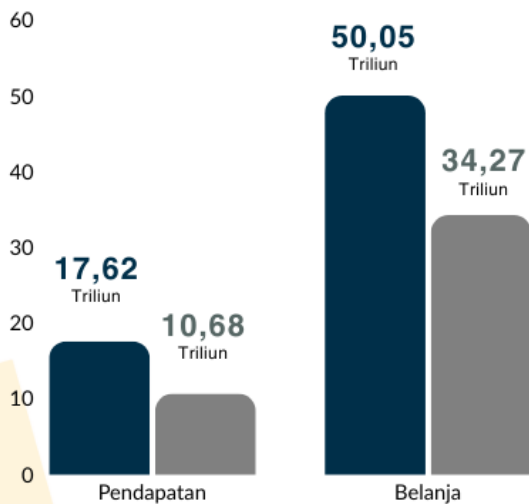
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan



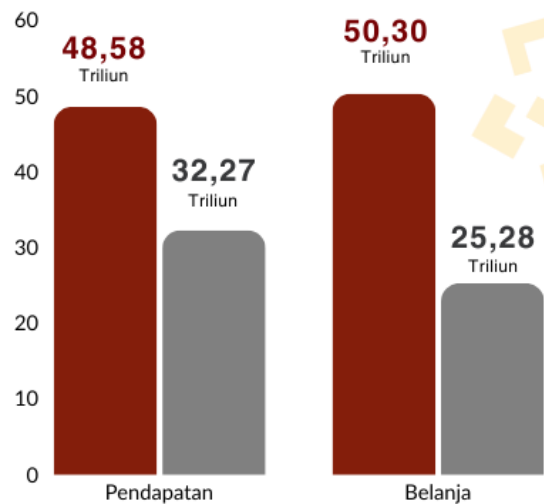
Kinerja Fiskal Regional

Triwulan III Tahun 2025

Pagu
Realisasi



Pagu
Realisasi

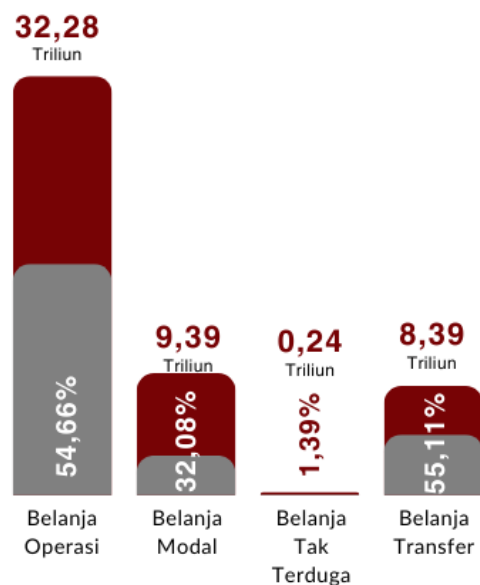
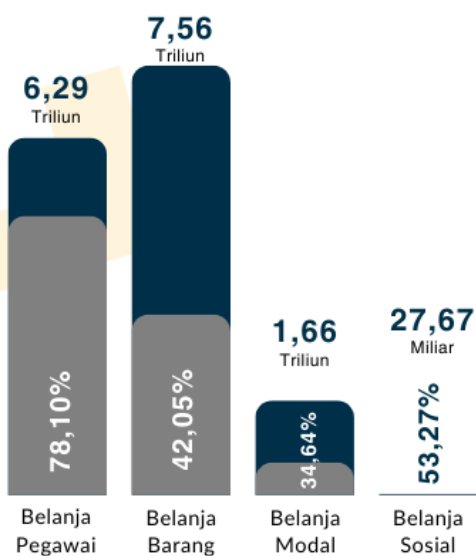


APBN

Sumber: Online Monitoring SPAN

APBD

Sumber: Dit. APK, DJPb





BAB I

Analisis Ekonomi Regional



Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,20%, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional (5,04%) maupun capaian tahun sebelumnya (5,04%). Hal ini mencerminkan ekonomi Sumsel memiliki daya tahan yang baik terhadap guncangan atau perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi di tingkat nasional atau global.

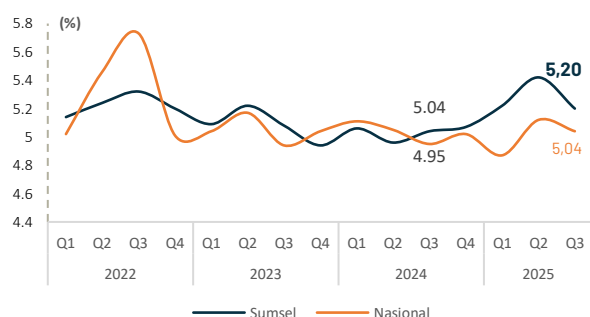
- Dari sisi pengeluaran, PDRB Sumsel menunjukkan ketergantungan terhadap permintaan domestik. Konsumsi Rumah Tangga (RT) bertumbuh 4,89% yoy (andil 59,55%) kemudian disusul komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang bertumbuh 3,05% yoy (andil 29,04%). Keduanya sedikit menurun dibandingkan triwulan lalu dan triwulan III 2024. Penurunan Konsumsi RT kemungkinan besar adalah normalisasi setelah triwulan sebelumnya yang memiliki lebih banyak hari libur. Sedangkan komponen PMTB diharapkan meningkat seiring dibukanya blokir anggaran belanja modal pemerintah.
- Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan PDRB didominasi oleh sektor sumber daya alam dan industri terkait. Sektor Perdagangan dan Konstruksi pun turut berkontribusi. Sektor pertambangan sedang lesu seiring dengan turunnya nilai ekspor dan harga dunia komoditas utama. Industri Pengolahan mencatatkan meningkat (yoy), karena didukung oleh meningkatnya produksi dan ekspor olahan kelapa sawit di tengah momentum meningkatnya harga CPO dunia. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh signifikan seiring performa positif produksi padi dan palawija.
- Dari sisi harga, inflasi Sumsel meningkat namun masih tidak melebihi batas atas target inflasi (3,5%). Per September 2025, inflasi tahunan Sumsel sebesar 3,44% (yoy). Karena hampir melewati batas atas target inflasi serta lebih tinggi dibanding inflasi nasional (2,65% yoy), maka tekanan harga yang relatif tinggi ini perlu diwaspadai. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, tomat, bahan bakar rumah tangga. Peningkatan inflasi kelompok Makanan dan Minuman sejalan dengan kenaikan harga bahan pangan kontributor utama. Sedangkan Inflasi kelompok Perawatan Pribadi karena harga emas logam mulia menembus Rp2,1 juta/gram. Secara spasial, pada September 2025, Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim memiliki inflasi tahunan melewati batas atas target, sedangkan inflasi Palembang dan Lubuk Linggau juga hampir melewati. Hal ini menandakan tekanan harga yang relatif tinggi dan pengendalian inflasi perlu menjadi isu prioritas. Kontributor utama inflasi antarwilayah seragam, yaitu didominasi oleh kelompok Makanan dan Minuman.
- Di sisi kesejahteraan, pasar tenaga kerja Sumsel masih mengarah ke pemulihan yang optimistis, meskipun masih terdapat tantangan struktural seperti tingginya pekerja informal, pengangguran terdidik, dan penurunan kelompok pekerja penuh. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel September 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,57% (mtm), mencerminkan daya beli dan kesejahteraan petani di Sumsel sedang mengalami peningkatan untuk semua subsektor pertanian. Demikian pula dengan Nilai Tukar Nelayan yang meningkat sebesar 0,48% (mtm) disebabkan kenaikan harga komoditas pada penangkapan perairan umum. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel tahun 2025 mengalami peningkatan 1,25% pada angka 74,76 sejalan dengan meningkatnya kinerja perekonomian Sumsel.

1.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada Triwulan III 2025, perekonomian Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan pemulihan yang stabil dan terjaga dengan pertumbuhan 5,20%, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional (5,04%) maupun capaian tahun sebelumnya (5,04%). Pertumbuhan ekonomi Sumsel yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional mencerminkan ekonomi Sumsel memiliki daya tahan yang baik terhadap guncangan atau perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi di tingkat nasional atau global. Secara kuartal, terjadi akselerasi pertumbuhan sebesar 2,25% (qtq) dan secara kumulatif naik 5,28% (ctc). Pertumbuhan ini bisa lebih dioptimalkan dengan stimulus fiskal, mengingat konsumsi pemerintah masih sebesar 3,65% (yoy) dan memiliki andil 5% dari total pertumbuhan, sehingga peran belanja publik bisa diperkuat untuk menjaga momentum perekonomian.

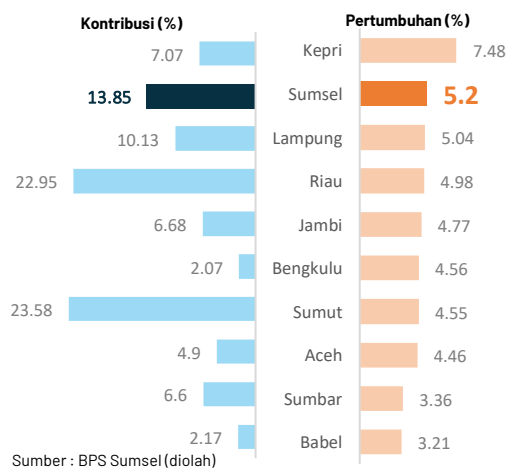
Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (yoy, %)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

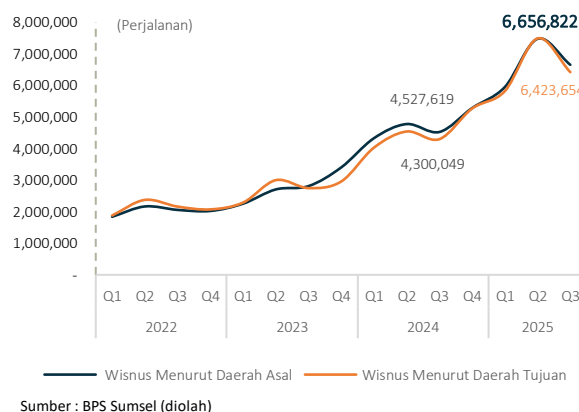
Secara spasial, Sumatera Selatan mempertahankan peran strategisnya sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan di Pulau Sumatera. Hal ini terlihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi yang berada di posisi kedua tertinggi di Sumatera, setelah Kepulauan Riau (Kepri). Pada Triwulan III 2025, kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera, Sumsel menempati posisi ketiga (13,85%) setelah Sumatera Utara (23,58%) dan Riau (22,95%). Sumsel menunjukkan dorongan yang berkelanjutan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi kawasan. Ini dicapai berkat sektor unggulan yang kuat, peran vital dalam distribusi logistik, dan konektivitas antarwilayah yang baik untuk mendukung produksi dan perdagangan antarprovinsi.

Grafik 1.2 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Q3 2025 di wilayah Sumatera



Peningkatan mobilitas masyarakat dan pariwisata domestik menopang pertumbuhan ekonomi Sumsel. Pada Triwulan III 2025, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) asal Sumatera Selatan 6,66 juta perjalanan, meningkat tajam sebesar 47,03% (yoy), sementara jumlah kunjungan wisnus ke Sumsel menjadi 6,42 juta perjalanan atau meningkat 49,39% (yoy). Lonjakan ini didorong oleh meningkatnya intensitas perjalanan masyarakat selama periode libur sekolah dan libur nasional. Namun angka ini menurun jika dibandingkan dengan kuartal lalu karena triwulan II lebih banyak hari libur nasional, cuti bersama, dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Namun libur nasional pada triwulan III juga berperan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat antar daerah serta dan menguatkan roda perekonomian lokal, terutama bagi pelaku usaha di bidang perdagangan dan pariwisata.

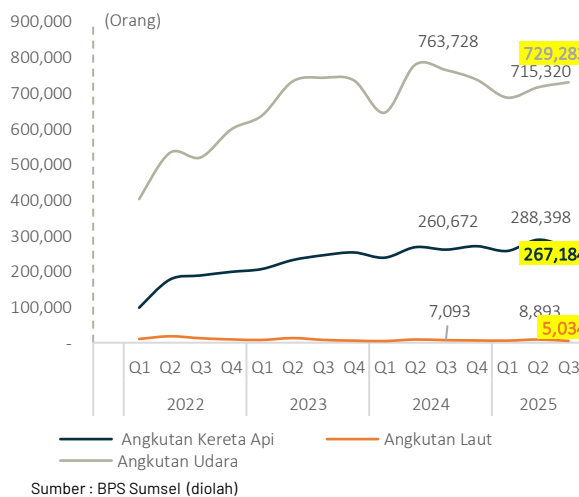
Grafik 1.3 Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara Sumsel



Sumber : BPS Sumsel (diolah)

Jumlah penumpang tahunan di moda transportasi angkutan udara mengalami peningkatan pada triwulan III 2025, yaitu sebesar 1,95% (qtq) menjadi 729.283 penumpang dari triwulan sebelumnya (715.320 penumpang), namun menurun 4,51% (yoy) dibanding tahun lalu sebanyak 763.728 penumpang. Sedangkan untuk angkutan kereta api dan angkutan laut mengalami penurunan dibanding triwulan lalu, yaitu untuk angkutan kereta api menurun 7,36% (qtq) dari 288.398 menjadi 267.184 penumpang dan untuk angkutan laut menurun 43,39% (qtq) menjadi 5.034, karena belum termasuk data penumpang angkutan laut bulan September.

Grafik 1.4 Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang Sumsel

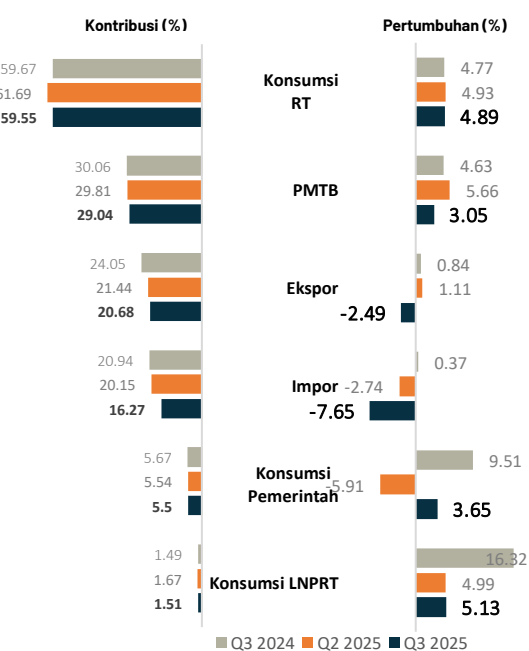


Sumber : BPS Sumsel (diolah)

1.1.1.1 PDRB Menurut Pengeluaran

Pada Triwulan III 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel menurut pengeluaran menunjukkan ketergantungan terhadap permintaan domestik. Konsumsi Rumah Tangga kembali menjadi komponen dengan kontribusi terbesar, yakni sebesar 59,55%, meskipun sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (61,69%) dan periode yang sama tahun lalu (59,67%). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyusul dengan porsi sebesar 29,04%, sedikit turun dibanding kuartal II (29,81%) dan kuartal III tahun lalu (30,06%). Sementara itu, peran sektor eksternal masih terbatas, dengan kontribusi ekspor sebesar 20,68% dan impor sebesar 16,27% terhadap total PDRB, keduanya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (21,44% dan 20,15%). Konsumsi pemerintah menyumbang 5,5%, sedikit lebih rendah dari triwulan II 2025 (5,54%) dan triwulan III 2024 (5,67%). Adapun Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tetap berada di kontribusi terendah, yaitu 1,51%. Tingginya peran Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB (Investasi Fisik) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Sumsel utamanya digerakkan oleh faktor aktivitas domestik. Minimnya peran sektor eksternal dan lembaga non-rumah tangga menunjukkan perlunya aktivitas pada organisasi sosial non profit dan stimulasi investasi untuk beberapa tahun ke depan.

Grafik 1.5 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Pengeluaran (yoy,%)



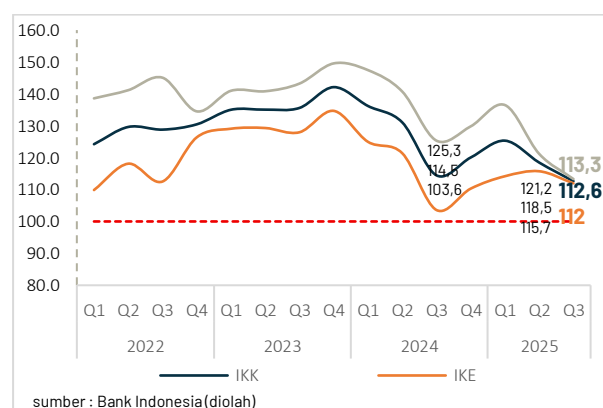
sumber : BPS Sumsel (diolah)

PDRB menurut pengeluaran pada Triwulan III 2025 meningkat baik secara y-on-y (5,2%) maupun q-to-q (2,25%). Laju pertumbuhan tertinggi adalah komponen Konsumsi LNPR sebesar 5,13% (yoy) namun melambat 7,34% (qtq), yang berarti terjadi peningkatan aktivitas tahunan untuk lembaga sosial dan nirlaba pada triwulan III 2025 dibanding triwulan III 2024. Selanjutnya, disusul Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,89% (yoy) yang mempertahankan perannya dalam laju pertumbuhan PDRB Sumsel, mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga di tengah tekanan inflasi, meski sedikit menurun 0,96 jika dibanding kuartal lalu. Konsumsi Pemerintah yang meningkat sebesar 3,65% (yoy) dan 0,74% (qtq) mengindikasikan peran fiskal pemerintah, sedangkan meningkatnya laju pertumbuhan komponen PMTB sebesar

3,05% (yoy) memberi peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena menciptakan aset yang akan digunakan untuk produksi di masa mendatang, meski secara kuartal terjadi sedikit penurunan 0,36 (qtq). Kenaikan laju pertumbuhan PDRB komponen PMTB pada triwulan ini juga ditopang oleh peningkatan aktivitas konstruksi serta seiring proyek infrastruktur yang kembali berjalan pasca mulai dibukanya blokir anggaran belanja modal pemerintah. Di sisi lain, laju pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa melambat sebesar 2,49% (yoy) namun meningkat dibanding pada triwulan sebelumnya sebesar 3,44% (qtq). Sedangkan, laju pertumbuhan impor barang dan jasa kembali berkontraksi sebesar 7,65% (yoy) atau 7,67% (qtq).

Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama PDRB Sumsel mencerminkan bahwa daya beli masyarakat Sumsel masih terjaga. Melalui Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2025 di perwakilan kota di Sumsel, yaitu Palembang, terlihat bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Kota Palembang pada triwulan III 2025 berada pada level optimis (indeks >100) sebesar 112,6, meski mengalami penurunan dibanding triwulan lalu (118,5) dan triwulan III 2024 (114,5). Optimisme konsumen pada September 2025 yang terjaga ditopang oleh konsumsi barang kebutuhan tahan lama dan ketersediaan lapangan kerja yang terjaga dengan baik. Konsumen juga mempersepsikan ekspektasi ekonomi ke depan tetap baik.

Grafik 1.6 Rata-Rata Hasil Survei Konsumen Kota Palembang



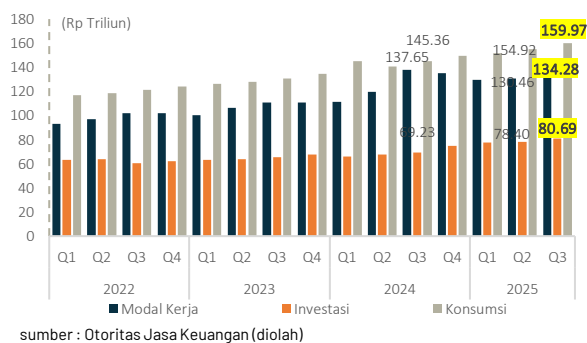
sumber : Bank Indonesia (diolah)

Terjaganya keyakinan konsumen pada September 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 112 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 113,3 yang tetap berada pada level optimis (indeks >100). Sama halnya dengan IKK, IKE dan IEK triwulan III 2025 turun dibanding triwulan lalu. Penurunan ini mengindikasikan adanya kehati-hatian konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, namun penurunannya masih kecil dan tergolong dalam indeks optimis. Agar potensi penurunan daya beli atau penundaan keputusan konsumsi dan investasi oleh rumah tangga di masa mendatang tidak terjadi, perlu dilakukan langkah kebijakan stimulus yang terukur dan tepat sasaran, seperti menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok (inflasi), memberikan dukungan likuiditas agar sektor riil tetap bergerak, sosialisasi pemerintah dan bank sentral untuk membangkitkan kembali optimisme masyarakat dan pelaku usaha.

Peningkatan ketersediaan akses pembiayaan tetap menjadi pendorong konsumsi rumah tangga di Sumatera Selatan. Pada triwulan III 2025, penyaluran kredit konsumsi tercatat meningkat menjadi Rp159,97 triliun, tumbuh sebesar 3,26% (qtq) dan 10,05% (yoy). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), kredit Rumah Tangga merupakan sektor tertinggi mencapai 40,85%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kuat dalam daya beli masyarakat dan permintaan rumah tangga serta mengindikasikan keyakinan konsumen sedang membaik, dan rumah tangga merasa optimistis dengan prospek pendapatan masa depan, yang mendorong pengambilan pinjaman demi membiayai pengeluaran pribadi. Sedangkan kenaikan kredit modal kerja dan investasi dibanding triwulan lalu, mencerminkan ekspansi sektor usaha dan optimisme bisnis terhadap prospek masa depan yang mengindikasikan percepatan dan penguatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Grafik 1. 7 Perkembangan Kredit Perbankan di Wilayah Sumsel



Kenaikan kredit konsumsi menjadi indikasi bahwa lembaga keuangan berperan besar dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari dukungan pembiayaan yang luas, meliputi konsumsi rumah tangga, pembelian kendaraan, pengeluaran untuk pendidikan, dan kebutuhan terkait gaya hidup. Kenaikan ini terjadi berbarengan dengan momentum libur sekolah dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Tren ini mengindikasikan bahwa meskipun menghadapi tekanan harga dan ketidakpastian global, kepercayaan publik terhadap prospek ekonomi dan sistem keuangan tetap tinggi, sebagaimana diperkuat oleh IKK yang stabil di level optimis.

Konsumsi pemerintah pada triwulan III 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 3,65% (yoy) dengan kontribusi 5,5% terhadap PDRB Sumatera Selatan. Peningkatan ini mencerminkan peran belanja fiskal dalam menyediakan pelayanan publik dan administrasi umum. Berdasarkan realisasi anggaran, belanja pemerintah pusat di Sumatera Selatan per triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp8,68 triliun atau 55,86% dari pagu. Persentase realisasi terhadap pagu tahunan pada Januari hingga September 2025 mengalami 4,71% (ctc) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pada belanja modal dan belanja barang, yang realisasi kumulatif Januari hingga September terhadap pagu tahunan turun 27,59% (ctc) dan 22,7% (ctc). Realisasi belanja modal yang tertahan dan masih mencapai 34,64% dari pagu adalah akibat dari keterlambatan penyelesaian kegiatan fisik yang dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun. Sedangkan belanja barang tertahan dan masih mencapai 42,05% dari pagu karena kebijakan efisiensi serta rasionalisasi kegiatan perjalanan dinas dan operasional satker. Di sisi lain, realisasi belanja pegawai tetap berada pada tren positif dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program rutin dan gaji ASN. Belanja pegawai tetap tumbuh positif 2,59% (ctc), didorong oleh penyaluran gaji ke-13 serta kenaikan tunjangan kinerja ASN dan PPPK. Untuk menjaga peran fiskal sebagai

pengungkit pertumbuhan ekonomi, perlu percepatan penyelesaian kontrak dan penyerapan belanja produktif, khususnya pada sektor infrastruktur dan layanan publik di triwulan IV 2025.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) tetap menjadi penyangga utama konsumsi pemerintah. Realisasi TKD hingga Triwulan III 2025 mencapai Rp25,59 triliun atau 74,16% dari pagu, meningkat 6,9% (ctc). Peningkatan realisasi TKD hingga September ini ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi (DAK) Fisik, dan Dana Insentif Fiskal yang masing-masing meningkat. Optimalisasi realisasi bisa dilakukan untuk DAK Fisik karena realisasinya masih 48,03% dari pagu, di bawah pola ideal penyerapan triwulan III, yaitu di atas 50% dari pagu. Untuk menjaga kesinambungan belanja daerah di triwulan IV, optimalisasi asistensi teknis kepada pemda dan percepatan konfirmasi penyaluran dari K/L penyalur menjadi krusial, agar sisa anggaran dapat tersalur tepat waktu dan mendukung pemulihan ekonomi daerah.

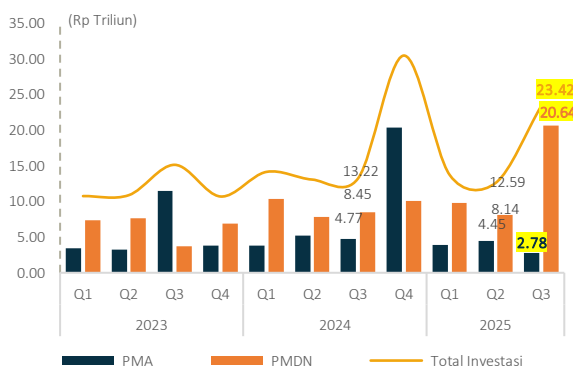
Sampai dengan 30 September 2025, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Sumsel mengalami pertumbuhan sedangkan belanja daerah terkonsentrasi. Realisasi pendapatan seluruh Pemda Sumatera Selatan sebesar Rp32,27 triliun (66,42% dari pagu) atau bertumbuh 21,35% (ctc). Pada sisi belanja, sampai dengan triwulan III 2025, realisasi sebesar Rp25,28 triliun atau 48,92% dari pagu yang telah ditetapkan atau terkonsentrasi sebesar 3,31% (ctc). Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer menunjukkan kontraksi (ctc). Sedangkan belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar 1,17%. APBD Sumsel menunjukkan adanya surplus Rp7 triliun. Surplus tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan daerah dibandingkan dengan realisasi belanja dan menunjukkan pertumbuhan surplus dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan, SILPA tercatat sebesar Rp9,19 triliun. Hal tersebut didorong juga oleh peningkatan penerimaan pembiayaan sebesar 45,09% (ctc) dan penurunan pengeluaran pembiayaan sebesar 68,57%. Melihat dari pendanaan yang memadai, diharapkan Pemda dapat mendorong kinerja belanja daerah yang produktif pada periode triwulan IV 2025 guna akselerasi ekonomi Sumsel. Adapun kendala dalam penyerapan APBD adalah keterlambatan legalisasi anggaran dan petunjuk teknis yang mempengaruhi seluruh rangkaian kegiatan. Pemerintah daerah berupaya dalam percepatan realisasi belanja daerah dengan mengidentifikasi proyek atau anggaran yang siap bayar dan mengalihkan anggaran yang terhambat ke program siap terlaksana.

PMTB tercatat tumbuh sebesar 3,05% (yoy) pada triwulan III 2025 dengan kontribusi sebesar 29,04% terhadap struktur PDRB Sumatera Selatan. Kontribusi ini sedikit lebih rendah dibanding capaian triwulan sebelumnya 29,81% (yoy) dan triwulan III 2024 sebesar 30,06% (yoy). Perlambatan ini mencerminkan belum optimalnya ekspansi investasi fisik baik oleh pemerintah maupun swasta. Berdasarkan data yang dihimpun Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal K/L Januari hingga September terealisasi Rp576,708 miliar (-80,89% ctc), dan belanja modal APBD sebesar Rp2,9 triliun (-21,11% ctc), menunjukkan lemahnya kontribusi belanja infrastruktur terhadap PMTB dibanding periode yang sama tahun lalu karena perlambatan investasi fisik dan pembangunan infrastruktur.

Di tengah lemahnya investasi belanja modal pemerintah, investasi swasta menunjukkan ekspansi. Total realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan III 2025 di Sumsel tercatat sebesar Rp23,42 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp13,22 triliun (naik 77,18%) dan dibandingkan triwulan sebelumnya Rp 12,59 triliun (naik 86,16%). Kenaikan ini ditopang oleh kenaikan tajam PMDN menjadi Rp20,65 triliun dari Rp8,14 triliun (Q2) dan Rp8,45 triliun (Q3 2024). Hal ini adalah sinyal yang sangat positif untuk daya tahan ekonomi domestik karena investor dalam negeri memiliki keyakinan tinggi terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan di tengah ketidakpastian global. Sedangkan penyusutan terjadi pada PMA menjadi Rp2,78 triliun dari Rp4,45 triliun (Q2) dan Rp4,77 triliun (Q3 2024) karena tantangan geopolitik global dan kebijakan moneter negara maju yang membuat investor asing cenderung menahan dana di tengah volatilitas. Kondisi PMA dan PMDN ini mencerminkan pergeseran dominasi sumber investasi dan hal ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik yang kuat dan faktor global yang menantang.

Grafik 1. 8 Perkembangan PMA dan PMDN Wilayah Sumsel

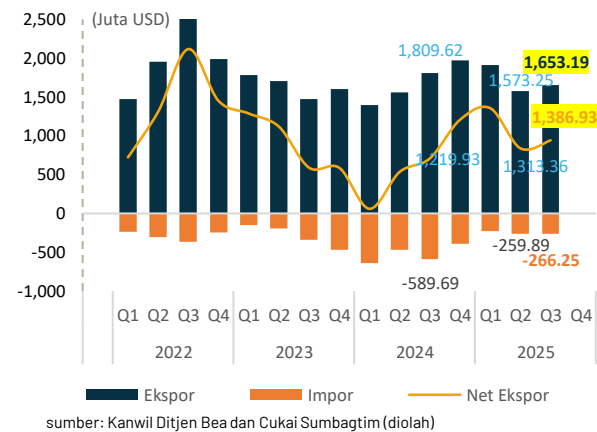


sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (diolah)

PMDN menunjukkan arah yang mendukung PMTB karena mendominasi 88,13% total investasi. Hal ini mengindikasikan peran sentral dalam memperluas kapasitas produksi dan memajukan infrastruktur komersial. Pada triwulan III, kontribusi terbesar PMDN berasal dari sektor Pertambangan, Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi, serta Konstruksi. Di sisi lain, PMA tetap memainkan peran strategis pada sektor Industri Kertas dan Percetakan yang mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah ekspor. Mengingat kontribusi PMTB cukup besar terhadap PDRB, perlu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, dan pembangunan infrastruktur untuk menarik lebih banyak PMA dan PMDN di Sumsel.

PMTB di Sumsel diproyeksikan meningkat karena masuknya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan untuk periode RPJMN 2025–2029 di Sumsel. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, beberapa PSN yang diindikasikan akan dilaksanakan di Sumsel antara lain yaitu pengembangan *food estate*, proyek *Biorefinery* Pertamina di Musi Banyuasin, pembangunan jaringan gas perkotaan, hilirisasi komoditas kelapa sawit dan rumput laut, serta pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas. Selain itu, pengembangan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan juga menjadi salah satu prioritas PSN daerah. PMTB di masa depan akan sangat signifikan apabila proyek-proyek strategis tersebut segera memasuki tahap konstruksi dan pembebasan lahan. Untuk memastikan proyek-proyek ini berhasil mengakselerasi investasi fisik, dibutuhkan dukungan fiskal yang konsisten, percepatan proses perizinan, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Grafik 1. 9 Perkembangan Neraca Perdagangan Sumsel

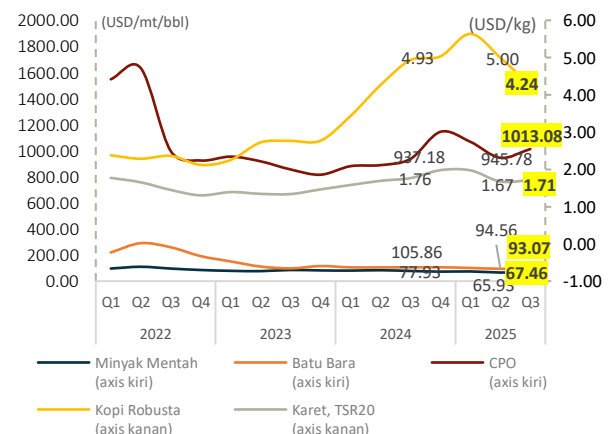


sumber: Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumbagtim (diolah)

Kinerja ekspor-impor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan III 2025 menunjukkan kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya namun menurun dibandingkan triwulan III 2024. Nilai ekspor Sumsel tercatat sebesar USD1.653,19 juta atau mengalami kontraksi 8,64% (yoy) dari USD1.809,62 juta dan peningkatan 5,13% (qtoq) dari USD1.573,25 juta. Ekspor didominasi komoditas batubara, bahan baku karet, dan pulp. Di sisi lain, impor tercatat sebesar USD266,25 juta, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (USD259,89 juta), namun menurun tajam jika dibanding triwulan III 2024 (USD589,69 juta). Dari Januari hingga September, nilai impor didominasi oleh komoditas Mesin, Pupuk, Kayu Kasar, serta Reaktor, Turbin, Generator. Surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD1.386,93 juta, masih menjadi kontributor penting terhadap pertumbuhan ekonomi, lebih tinggi dari capaian triwulan lalu dan triwulan III 2024.

Pelemahan komponen ekspor pada struktur PDRB triwulan ini dipengaruhi oleh komoditas utama yang nilai ekspornya menurun (bahan baku karet dan pulp) dan harga internasionalnya menurun (batu bara). Ekspor bahan baku karet turun dari USD433,38 juta (Q2) menjadi USD407,98 juta di tengah kenaikan harga karet internasional dari USD1,67/kg (Q2) menjadi USD1,71/kg. Hal ini berarti bahwa penurunan volume ekspor yang terjadi lebih dominan dan signifikan daripada kenaikan harga yang seharusnya mengkompensasi. Demikian pula nilai ekspor pulp turun dari USD379,41 juta (Q2) menjadi USD360,98 juta. Nilai ekspor Minyak Mentah dan Turunannya juga sedikit menurun dari USD90,49 menjadi USD90,13 juta di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia dari USD65,93/bbl menjadi USD67,46/bbl.

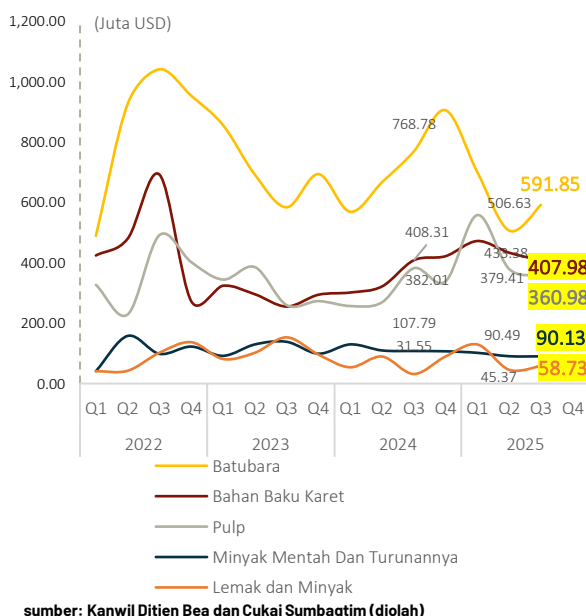
Grafik 1. 10 Perkembangan Harga Komoditas Internasional



sumber: World Bank (diolah)

Sementara itu, komoditas ekspor utama yang mengalami kenaikan pada triwulan III 2025 adalah batubara, yang menunjukkan ketahanan ekspor meski terjadi koreksi harga. Kenaikan nilai ekspor batu bara dari USD506,63juta (Q2) menjadi USD591,85juta di tengah penurunan harga batu bara internasional dari USD94,56/mt (Q2) ke USD93,07/mt (Q3), menunjukkan Sumsel mengkompensasi penurunan nilai ekspor akibat harga turun dengan peningkatan volume ekspor. Sedangkan kenaikan ekspor Sumsel pada Lemak dan Minyak dari USD45,37 juta (Q2) menjadi USD58,73 juta di tengah kenaikan harga komoditas dunia Crude Palm Oil (CPO) dari USD945,78/mt (Q2) ke USD1.013,08/mt (Q3), mencerminkan keberhasilan memanfaatkan momentum kenaikan harga dengan dengan peningkatan volume ekspor. Harga kopi robusta dunia turun dari USD5/kg menjadi USD4,24/kg mengindikasikan harus dilakukan langkah strategis untuk memitigasi risiko kerugian pendapatan dan meningkatkan daya saing jangka panjang, seperti peningkatan volume dan efisiensi serta nilai tambah atau hilirisasi.

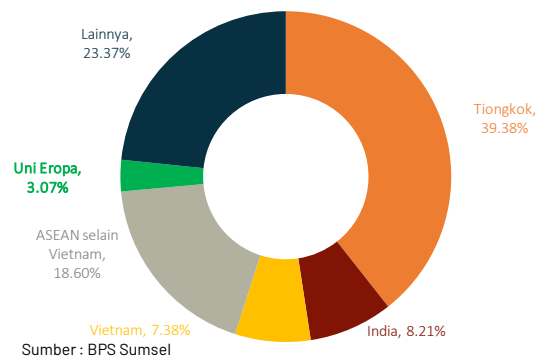
Grafik 1. 11 Perkembangan Top Komoditas Ekspor Sumsel (Juta USD)



Dari Januari hingga September 2025, struktur ekspor Sumsel masih bergantung pada Tiongkok sebagai mitra dagang utama, dengan kontribusi sebesar 39,38% terhadap total ekspor atau senilai hampir USD1.897,10 juta. Disusul India 8,21% (USD395,36 juta), Vietnam 7,38% (USD355,52 juta), sedangkan untuk negara ASEAN selain Vietnam mengambil kontribusi 18,6%, sisanya adalah uni eropa (3,07%) dan negara lainnya (23,37%). Hal ini menunjukkan dominasi pasar Asia yang berarti ketergantungan tinggi terhadap kondisi perekonomian kawasan. Dominasi pasar Asia dalam ekspor suatu daerah, meskipun menjadi sumber devisa utama, dapat menimbulkan risiko yang tinggi karena daerah tersebut sangat rentan terhadap gejolak perekonomian dan politik di kawasan, seperti kebijakan yang diterapkan AS terhadap Tiongkok dan India sebagai pangsa ekspor terbesar Sumsel. Ketidakstabilan politik regional dapat mengganggu rantai pasokan dan permintaan ekspor. Selain itu, ketergantungan pada komoditas tertentu membuat pendapatan ekspor sangat sensitif terhadap perubahan harga global yang tidak menentu. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan sektor eksternal dari risiko-risiko tersebut, diperlukan strategi jangka menengah yang konsisten, seperti penguatan diversifikasi pasar ekspor dengan mendorong akses ke negara-negara

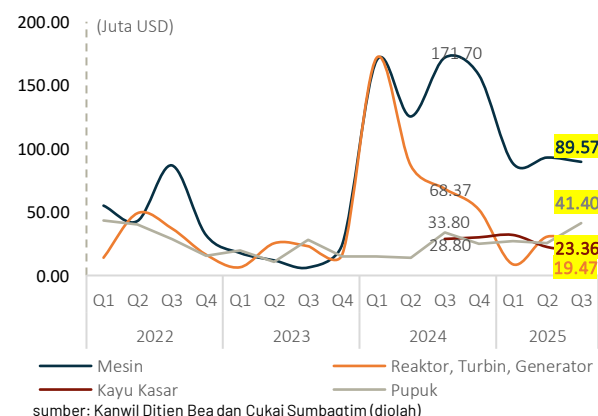
lainnya, serta percepatan hilirisasi komoditas untuk mengurangi ketergantungan pada harga komoditas mentah dan meningkatkan daya saing produk ekspor Sumsel.

Grafik 1. 12 Pangsa Impor Sumsel Jan-Sep 2025 Menurut Negara Tujuan (%)



Di tengah kondisi dinamika perekonomian global dan nasional saat ini, perekonomian Sumsel masih berjalan dinamis dan baik namun tetap harus diwaspadai. Dilansir di metrotvnews.com (4 September 2025), Amerika menetapkan tarif yang lebih tinggi kepada India karena membeli minyak dari Rusia, juga terhadap Tiongkok. Ketidakpastian global ini membuat volatilitas di pasar keuangan dan volatilitas harga komoditas. Hal ini karena harga komoditas dan pasar keuangan sangat tergantung kepada sentimen yang disetir oleh kebijakan, retorika maupun perkembangan antarnegara. Sementara dari sisi keamanan global, ancaman keamanan siber dan perang nuklir menjadi makin nyata karena tensi hubungan geopolitik yang meningkat. Namun, di tengah tekanan perekonomian global karena ketidakpastian dan gejolak dunia, perekonomian Indonesia dari sisi domestik masih menunjukkan adanya resiliensi. Namun tetap harus diwaspadai karena perang dagang yang berlanjut dapat menekan permintaan global dan harga komoditas terutama batubara oleh Tiongkok dan India, yang menjadi komoditas ekspor utama dan negara pangsa Ekspor Sumsel terbesar Sumsel.

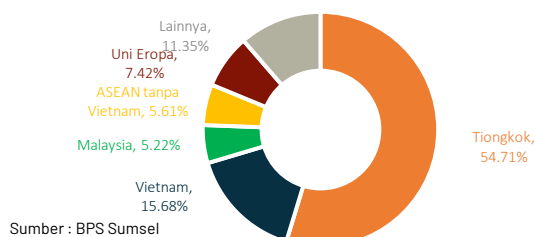
Grafik 1. 13 Perkembangan Top Komoditas Impor Sumsel (Juta USD)



Pada triwulan III 2025, nilai impor Sumsel melemah yang mencerminkan berkurangnya permintaan atas barang modal seiring dengan normalisasi belanja infrastruktur dan efisiensi investasi industri. Penurunan impor terjadi pada komoditas import utama, yaitu Mesin menjadi USD89,57 juta dari USD92,94 juta (Q2) dan USD171,70 juta (Q3 2024), komoditas Kayu Kasar menjadi USD 19,47 juta dari USD 22,48 juta (Q2) dan USD28,8 juta (Q3 2024), serta komoditas Reaktor, Turbin, Generator menjadi USD23,36 juta dari USD 30,56 juta (Q2) dan USD68,37 juta (Q3 2024). Fenomena ini mencerminkan

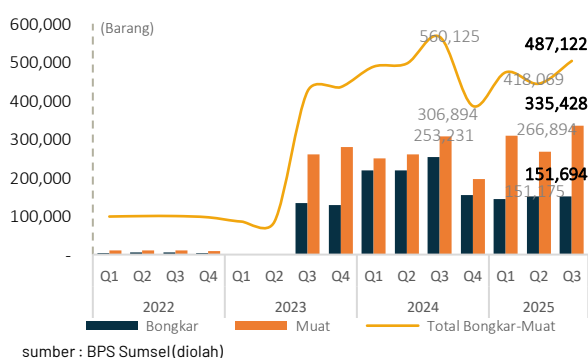
penurunan aktivitas investasi produktif sektor publik dan swasta, serta upaya optimalisasi rantai pasok domestik. Sedangkan untuk impor komoditas yang naik signifikan adalah pupuk menjadi USD41,40 juta dari USD25,27 juta (Q2) dan USD33,80 juta (Q3 2024).

Grafik 1. 14 Pangsa Impor Sumsel Jan-Sep 2025 Menurut Negara Asal (%)



Dari Januari-September 2025, Tiongkok tetap menjadi negara asal impor terbesar (54,71%) bagi Sumatera Selatan, disusul oleh Vietnam (15,68%) dan Malaysia (5,22%). Komoditas utama yang diimpor dari Tiongkok meliputi Mesin dan Peralatan Mekanis, Mesin dan Perlengkapan Elektris, Kereta Api, Trem dan Bagianannya, yang mencerminkan dominasi barang modal dan input industri. Ketergantungan terhadap mitra Tiongkok masih tinggi dan ketegangan dagang global berpotensi memicu disrupsi rantai pasok dan volatilitas harga komponen global. Sementara itu, Vietnam menyuplai Kayu dan Barang dari Kayu, Pupuk, serta Mesin dan Peralatan Mekanis. Untuk impor dari Malaysia didominasi Mesin dan Peralatan Mekanis, Barang dari Batu, Semen, Asbes, dan Mika, serta Garam, Belerang, Tanah dan Batu. Untuk menjaga ketahanan industri dan stabilitas harga, perlu didorong untuk diversifikasi sumber impor ke negara-negara lain untuk mengurangi ketergantungan pada barang dari negara dengan risiko geopolitik.

Grafik 1. 15. Perkembangan Aktivitas Bongkar-Muat Luar Negeri Sumsel



Volume bongkar-muat luar negeri di pelabuhan Sumatera Selatan pada Triwulan III 2025, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya, namun lebih rendah dibanding triwulan III 2024. Aktivitas bongkar dan muat masing-masing mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya menjadi 151.694 unit dari 151.175 unit dan menjadi 335.428 dari 266.894. Meskipun tekanan ekonomi memengaruhi nilai barang dan volume, operasional pelabuhan tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa secara fisik, arus impor dan ekspor tetap berjalan tanpa hambatan logistik yang serius.

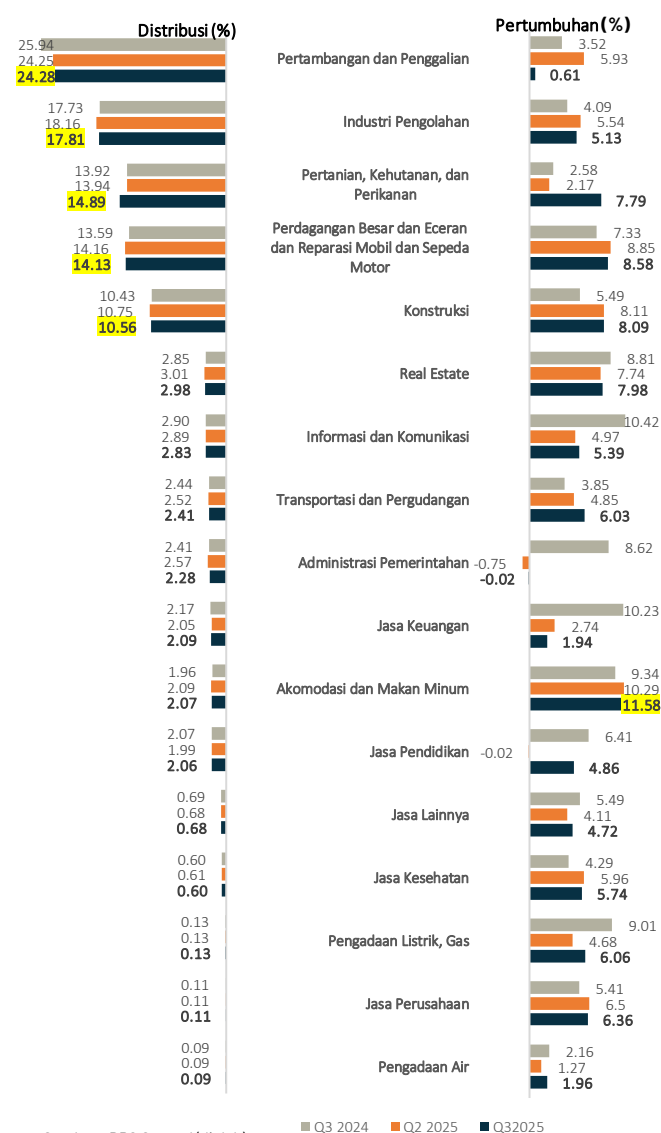
Jadi, dengan capaian surplus neraca perdagangan yang kembali menguat menjadi USD1,39 miliar pada Triwulan III 2025, sektor eksternal juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumsel. Tren pemulihan ekspor pasca koreksi harga komoditas global menunjukkan konsistensi. Nilai ekspor tahunan triwulan III meningkat dibanding triwulan II (USD1,31 miliar atau 5,66%) dan triwulan III 2024 (USD1,21 miliar atau

13,76%) yang lebih disebabkan oleh normalisasi ekspor batubara dan CPO. Namun, masih dominannya peran Tiongkok sebagai pangsa ekspor dan impor Sumsel menandakan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap satu mitra dagang dan adanya integrasi yang kuat dalam rantai pasok global. Meningkatnya risiko eksternal dari perang dagang kebijakan tarif Uni Eropa terhadap Tiongkok dan instabilitas geopolitik di Asia Selatan menjadikan tantangan pasar ekspor. Penguatan hilirisasi komoditas sebagai strategi yang tidak bisa ditunda untuk melindungi perekonomian daerah. Dengan kontribusi dan pertumbuhan net ekspor yang tetap tinggi, sektor eksternal mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sumsel di tengah tekanan global dengan disertai mitigasi risiko dan peningkatan efisiensi logistik domestik.

1.1.1.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Sumsel menurut lapangan usaha pada triwulan III 2025 masih ditopang oleh lima sektor utama yang menyumbang lebih dari 81,67% terhadap total PDRB. Kelima sektor tersebut meliputi Pertambangan dan Penggalian (24,28%), Industri Pengolahan (17,81%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (14,89%), Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,13%), serta Konstruksi (10,56%).

Grafik 1. 16 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Komponen Lapangan Usaha (yoy,%)



Struktur ekonomi Sumsel didominasi oleh sektor sumber daya alam dan industri terkait. Meskipun demikian, sektor Perdagangan dan Konstruksi memainkan peran krusial dalam menopang pertumbuhan dan upaya diversifikasi ekonomi di Sumsel.

Pertumbuhan PDRB Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pada triwulan III 2025 menjadi 0,61% (yoy), turun dari 3,52% (Q3 2024) dan dari 5,93% (Q2). Penurunan ini cukup signifikan mengingat sektor ini merupakan kontributor utama PDRB Sumsel. Kelesuan ini seiring dengan turunnya nilai ekspor dan harga dunia komoditas utama. Ketergantungan Sumsel pada pertambangan masih sangat tinggi, dan perlambatan bisa berpotensi menurunkan laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini menegaskan adanya risiko besar akibat minimnya diversifikasi ekonomi, di mana kinerja PDRB menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global atau masalah operasional di sektor pertambangan.

Industri Pengolahan mencatatkan penurunan menjadi 5,13% (yoy) dari 5,54% (Q2), namun meningkat dari 4,09% (Q3 2024), didukung oleh meningkatnya produksi dan ekspor olahan kelapa sawit di tengah momentum meningkatnya harga CPO dunia. Menurut BPS, tercatat produksi kelapa sawit pada triwulan III tumbuh 6,42% serta produksi CPO dan Palm Kernel Oil naik 59,94% dalam momentum ekspor olahan kelapa sawit naik dibanding triwulan II. Meski ekspor pulp dan produk turunan karet mengalami penurunan dibanding triwulan lalu, namun produksi pulp dan tisu naik 2,49%. Untuk memastikan industri pengolahan dapat tumbuh secara berkelanjutan, kenaikan kapasitas produksi perlu diimbangi dengan kenaikan permintaan dan harga. Tentunya industri pengolahan tetap harus berfokus pada peningkatan kualitas dan kapasitas industri hilir, diiringi dengan mendorong investasi modal baru.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 7,79% (yoy), naik signifikan dari triwulan sebelumnya (2,17%) dan triwulan III 2024 (2,58%). Indikator produksi menunjukkan performa positif, seperti produksi padi palawija tumbuh 22,77% pada triwulan ini. Hal ini sejalan dengan kenaikan NTP Sumsel pada September 2025 menjadi 127,77 dibanding September 2024 sebesar 124,44. Kondisi demikian sangat positif bagi sektor ini, maka memberikan pertumbuhan PDRB yang cukup signifikan. Fase ekspansi ini perlu dipertahankan agar pertumbuhan terjadi berkelanjutan dan keuntungan berhasil dinikmati oleh para pelaku utama. Diversifikasi nilai tambah dan memperkuat rantai pasok perlu terus dioptimalkan.

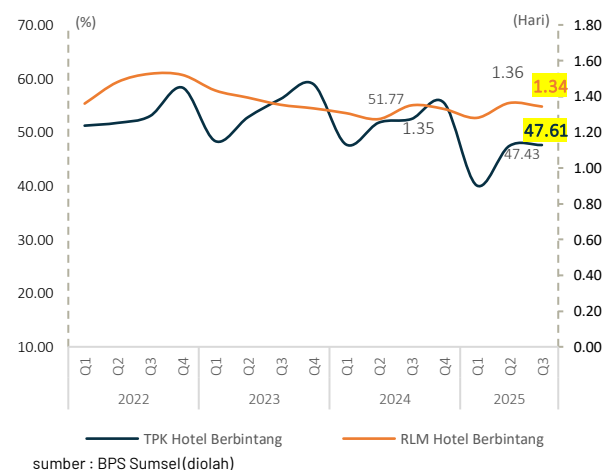
Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya 8,85% (yoy) menjadi 8,58% (yoy), namun meningkat jika dibandingkan triwulan III 2024 (7,33%), yang menunjukkan ketahanan konsumsi domestik. Perlambatan tipis kemungkinan besar hanyalah normalisasi setelah triwulan sebelumnya yang memiliki lebih banyak hari libur, cuti bersama, dan HBKN yang dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Sementara peningkatan dari tahun lalu menunjukkan kinerja yang lebih baik pada triwulan tahun ini.

Sektor Konstruksi sedikit menurun menjadi 8,09% (yoy) dari triwulan sebelumnya 8,11% (yoy), namun meningkat tajam dibanding triwulan III 2024 (5,49%), seiring dengan akselerasi proyek infrastruktur dan membaiknya realisasi belanja modal. Menurut Asosiasi Semen Indonesia (ASI), realisasi pengadaan

semen tumbuh 19,45% (yoy). Demikian halnya menurut BPS, indeks nilai konstruksi yang diselesaikan meningkat 6,62% (yoy). Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan volume penyelesaian proyek-proyek konstruksi dalam suatu periode. Kenaikan indeks ini merupakan sinyal positif yang merefleksikan kuatnya realisasi investasi fisik di lapangan, yang pada gilirannya mendorong permintaan terhadap bahan bangunan (seperti semen dan baja) serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDRB dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Harapan pertumbuhan sektor ini di triwulan IV 2025 didasarkan pada kemajuan pelaksanaan Proyek Strategi Nasional dari pemerintah pusat.

Selain lima sektor kontributor utama, sektor Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibanding lapangan usaha lainnya, yaitu sebesar 10,29% (yoy) pada triwulan II 2025, melanjutkan tren peningkatan dari triwulan sebelumnya 10,29% dan triwulan III 2024 sebesar 9,34%. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan permintaan masyarakat terhadap layanan *hospitality* dan makanan-minuman, khususnya selama periode libur sekolah. Peningkatan ini juga didorong oleh membaiknya pendapatan rumah tangga dan kegiatan konsumsi, tercermin dari peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,89% (yoy) pada triwulan ini.

Grafik 1. 17 TPK dan RLM Hotel Berbintang Sumsel

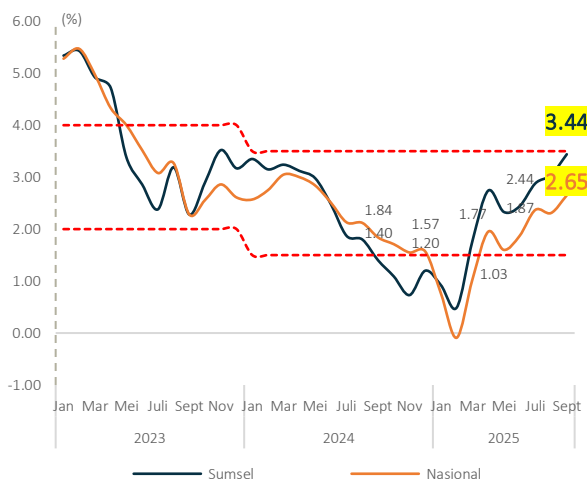


Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang melakukan perjalanan ke Sumatera Selatan memang meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, namun indikator kinerja akomodasi formal belum meningkat signifikan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 47,61%, sedikit naik dibandingkan triwulan sebelumnya 47,43% namun justru turun dibanding triwulan III 2024 sebesar 51,77%. Penurunan TPK ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah kunjungan wisata meningkat dibanding triwulan tahun lalu, preferensi wisatawan cenderung bergeser ke penginapan alternatif seperti *guesthouse* ataupun *homestay* yang lebih *affordable*. Rata-rata Lama Menginap (RLM) yang stagnan di 1,34 hari menegaskan bahwa kunjungan wisata masih bersifat jangka pendek dan belum meningkat dari tahun lalu. Rendahnya TPK hotel di Sumsel juga dipengaruhi faktor efisiensi belanja perjalanan dinas instansi pemerintah dan minimnya agenda skala besar di Sumsel sepanjang triwulan ini. Hal ini sejalan dengan penurunan anggaran perjalanan dinas dan optimalisasi *virtual meeting* di lingkungan K/L dan pemerintah daerah. Selain itu, tidak adanya event nasional berskala besar.

1.1.2 Inflasi

Inflasi Sumsel menunjukkan tren peningkatan, namun masih berada dalam posisi tidak melebihi batas atas target inflasi. Per September 2025, inflasi tahunan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 3,44% (yoy), meningkat dibanding bulan Juni yang sebesar 2,44% (yoy). Meskipun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5\% \pm 1\%$, inflasi tahunan Sumsel hampir melewati batas atas target inflasi serta lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang berada di angka 2,65% (yoy) yang menandakan tekanan harga yang relatif tinggi dan perlu diwaspadai. Komoditas utama penyumbang inflasi triwulan III 2025 adalah emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, tomat, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi Sumatera Selatan menunjukkan tren meningkat dengan dampak signifikan terhadap fiskal daerah. Diperlukan kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah, didukung kolaborasi lintas instansi dan penguatan data, untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

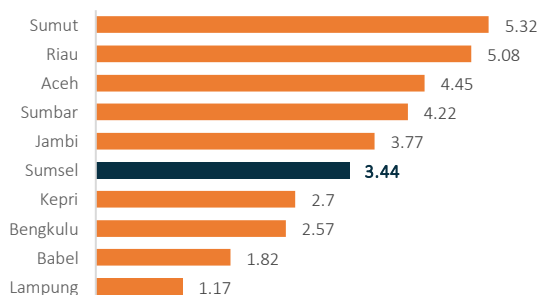
Grafik 1. 18 Perkembangan Inflasi Tahunan Sumsel dan Nasional (%)



sumber : BPS Sumsel (diolah)

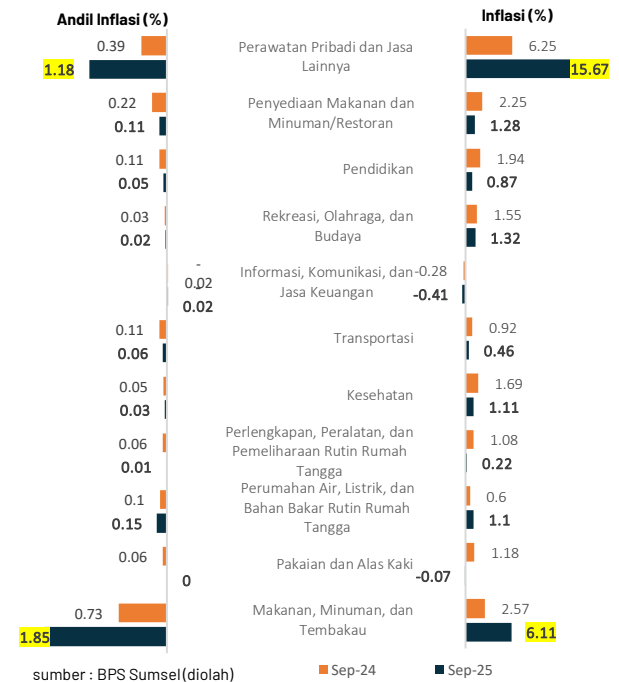
Secara spasial, selain Provinsi Lampung, provinsi lain di Sumatera mengalami kenaikan inflansi dari triwulan sebelumnya. Tingkat inflasi Sumatera Selatan berada di tengah setelah pada triwulan lalu berada di posisi teratas. Pada triwulan III, tingkat inflasi Sumsel berada di posisi 6 teratas setelah Sumut, Riau, Aceh, Sumbang, dan Jambi. Inflasi yoy pada triwulan III terjadi karena andil kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran terbesar Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 6,11% yoy (andil 1,85%) serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 15,67% yoy (andil 1,18%).

Grafik 1. 19 Inflasi Tahunan September 2025 Provinsi di Regional Sumatera (%)



Sumber : BPS Sumsel (diolah)

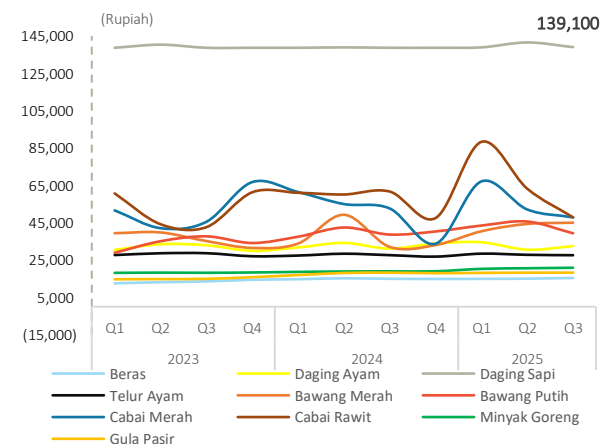
Grafik 1. 20 Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran (%)



sumber : BPS Sumsel (diolah)

Peningkatan inflasi di Makanan, Minuman, dan Tembakau (yoy) sejalan dengan harga bahan pangan kontributor utama inflasi yang turut meningkat. Menurut data Bank Indonesia, kenaikan harga bawang merah mencapai 40,46% dari Rp32.050/kg (Q3 2024) dan Rp44.350/kg (Q2) menjadi Rp45.017/kg. Hal serupa juga terjadi pada beras dari Rp14.950/kg (Q3 2024) dan Rp15.003 (Q2) menjadi Rp15.400/kg. Harga pangan yang naik dibanding triwulan III 2024 lainnya adalah daging ayam, daging sapi, bawang putih, minyak goreng, dan gula pasir. Hal ini mencerminkan fluktuasi pasokan dan pengaruh musim. Menurut Bank Indonesia, tren pergerakan harga pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), komoditas yang perlu menjadi perhatian karena cenderung mengalami tekanan inflasi menjelang akhir tahun adalah beras, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

Grafik 1. 21 Perkembangan Harga Pangan di Wilayah Sumsel (Rp)



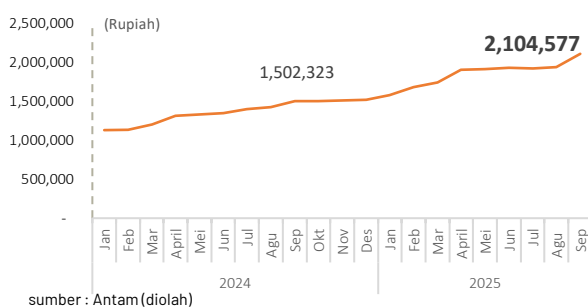
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Upaya konsisten Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi pada sektor ini adalah dengan cara kembali menggelar operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah pada bulan September. Perum BULOG Sumatera Selatan dan Bangka

Belitung juga meningkatkan pasokan dengan penyaluran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tengah panen raya kuartal III. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga beras, terdapat Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras pada tanggal 22 Agustus 2025. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjual bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga untuk menstabilkan harga di pasaran. Gubernur Sumsel menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD untuk lebih aktif dalam menyalurkan bantuan dan menggerakkan roda perekonomian, sehingga inflasi dapat terkendali dengan baik. Sinergi antara BI, Pemerintah Daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tetap diharapkan mampu menjaga inflasi pada level yang terkendali. Penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada bahan pangan akan menjadi kunci dalam mengantisipasi tantangan inflasi di tahun ini.

Kenaikan harga emas memberikan andil besar pada inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya di Sumatera Selatan pada triwulan III 2025. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi September 2025 yoy, yaitu emas perhiasan sebesar 1,06%, dibanding komoditas di bawahnya yang terpaut signifikan, yaitu pasta gigi dan sikat gigi yang hanya sebesar 0,02%. Salah satu penyebab harga emas naik adalah ketidakpastian. Minat membeli logam mulia seperti emas biasanya melonjak ketika investor merasa cemas (Kompas 2025). Berdasarkan data ANTAM, harga emas logam mulia relatif mengalami peningkatan hingga menembus Rp2 juta/gram pada awal September 2025, sangat meningkat tajam hingga 40,09% dibanding tahun lalu sebesar Rp1.502.323/gram. Tercatat di akhir September, harga emas mencapai Rp2,1 juta/gram. Tingginya harga emas ini menjadikan kelompok perawatan pribadi sebagai penyumbang inflasi kedua paling dominan pada triwulan III 2025 di Sumsel. Menurut data Agustus 2024 hingga Juli 2025 2025, menunjukkan tren permintaan emas berbanding terbalik dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Kecenderungan orang menyimpan emas yang membuat penurunan DPK perlu diwaspadai karena pembiayaan sektor riil, utamanya UMKM menjadi melambat dan konsumsi masyarakat cenderung melambat yang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Soekanto, 2025).

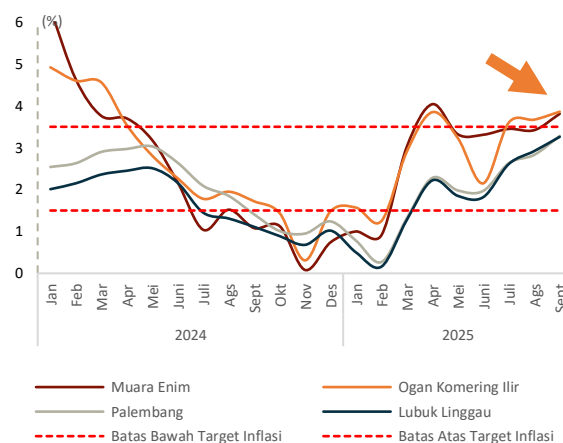
Grafik 1. 22 Perkembangan Harga Emas (Logam Mulia) ANTAM (Rp)



Kontribusi inflasi yoy kelompok lain seperti Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,15%) dan Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (0,11%) tidak sekuat dua kelompok utama, kelompok ini menunjukkan peningkatan permintaan dan aktivitas ekonomi masyarakat kelas menengah, yang secara tidak langsung memperkuat ekspektasi inflasi.

Dari sisi spasial, per September 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim memiliki inflasi tahunan melewati batas atas sasaran inflasi nasional 2025 (3,5%). Inflasi tahunan Kabupaten OKI yaitu sebesar 3,86%, disusul Kabupaten Muara Enim (3,81%), Palembang (3,28%), dan Lubuk Linggau (3,26%). Posisi Inflasi Kabupaten OKI dan Muara Enim yang melewati batas atas target inflasi menandakan tekanan harga yang relatif tinggi dan pengendalian inflasi perlu menjadi isu prioritas. Palembang dan Lubuk Linggau juga perlu waspada karena inflasinya hampir mendekati batas atas target inflasi 3,5%. Kontributor utama inflasi antarwilayah relatif seragam, didominasi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Grafik 1. 23 Perkembangan Inflasi Tahunan Antar Kabupaten/Kota di Sumsel (%)



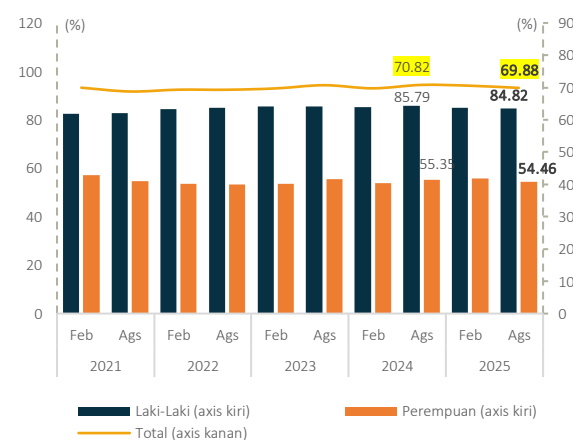
Sumber : BPS Sumsel (diolah)

Kesenjangan inflasi antarwilayah mencerminkan perbedaan struktur pasokan, pola konsumsi, dan efektivitas pengendalian harga di masing-masing daerah. Daerah seperti Muara Enim dan OKI yang lebih rentan terhadap tekanan harga pangan dan energi memerlukan penguatan koordinasi pengendalian inflasi, baik melalui optimalisasi cadangan pangan, distribusi yang efisien, maupun sinergi program perlindungan sosial.

1.2 Perkembangan Indikator Kesejahteraan

1.2.1 Ketenagakerjaan

Grafik 1. 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Agustus 2025

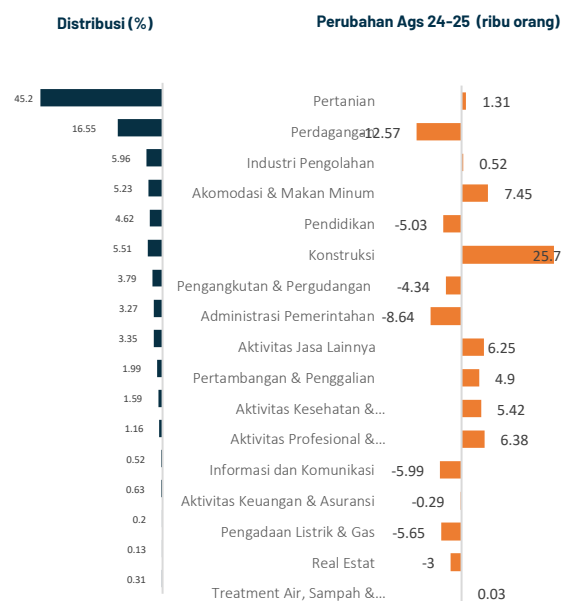


sumber : BPS Sumsel (diolah)

Kondisi ketenagakerjaan Sumatera Selatan pada Agustus 2025 masih berada pada tren positif secara umum dengan faktor penahan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 4,66 juta orang, meningkat 5,13 ribu orang dibandingkan Agustus 2024, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 4,49 juta orang (naik 12,47 ribu orang). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,94 poin persen menjadi 69,88%, selaras dengan peningkatan bukan angkatan kerja sebesar 90,90 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Penurunan TPAK pada Agustus 2025 lebih besar terjadi pada kelompok laki-laki (-0,97 persen poin) dibandingkan dengan penurunan TPAK perempuan (-0,89 persen poin). Penurunan TPAK dapat mengindikasikan migrasi tenaga kerja ke luar daerah atau migrasi ke sektor informal paruh waktu.

Sektor Pertanian masih menjadi penopang utama penyerap tenaga kerja di Sumsel secara struktural, namun dalam perubahan tahunan Sektor Konstruksi mencatat peningkatan tertinggi. Sebanyak 45,20% penduduk bekerja bergerak di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mengalami sedikit peningkatan yaitu sebanyak 1,31 ribu orang secara tahunan. Sektor Perdagangan masih menempati posisi kedua dengan menyerap 16,55%, meskipun menjadi sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu 12,57 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Sektor Industri Pengolahan naik 5,96% dan meningkat sebanyak 0,52 ribu orang secara tahunan sehingga masih termasuk ke dalam tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan terkuat yaitu sebanyak 25,70 ribu orang sehingga menempati posisi keempat secara distribusi lapangan usaha per Agustus 2025. Hal ini menunjukkan aktivitas investasi yang terus terakselerasi serta didorong oleh implementasi Program Prioritas Nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memberi efek berganda terhadap permintaan konstruksi untuk pembangunan fasilitas pendukung.

Grafik 1.25 Penyerapan Tenaga Kerja Sumsel Menurut Lapangan Usaha Agustus 2025



sumber: BPS Sumsel (diolah)

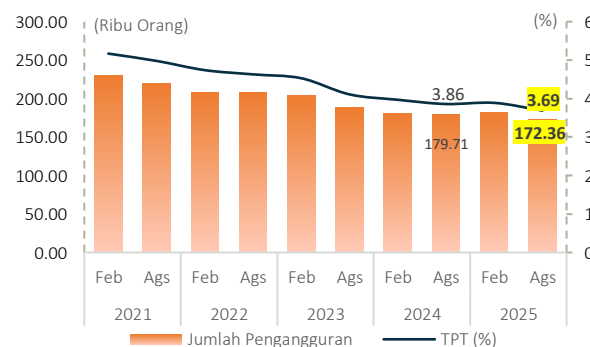
Komposisi pekerjaan berdasarkan status menunjukkan dominasi pekerjaan informal, selaras dengan penurunan pada kelompok pekerjaan formal.

Proporsi pekerja informal tercatat sebesar 63,13%, lebih tinggi dari pekerja formal yang hanya 36,87%. Namun demikian, status buruh/karyawan/pegawai tetap menjadi kelompok terbanyak (33,86%). Dibandingkan Agustus 2024, persentase pekerjaan informal meningkat 0,79 persen poin, disamping penurunan dengan besaran yang sama (-0,79 persen poin) pada pekerjaan formal. Di sisi lain, pekerja bebas non pertanian mengalami peningkatan tertinggi sebesar 127,20 ribu orang (2,82 persen poin), sementara pekerja berusaha sendiri justru mengalami penurunan paling dalam sebesar 59,98 ribu orang (1,40 persen poin), yang bisa mengindikasikan konsolidasi usaha mikro atau peralihan ke sektor informal lain.

Terdapat pergeseran antara kelompok pekerja penuh dengan pekerja paruh waktu, meskipun masih didominasi oleh kelompok pekerja penuh. Sebagian besar penduduk bekerja di Sumatera Selatan merupakan pekerja penuh (≥ 35 jam/minggu) dan masih mendominasi yaitu sebesar 61,85%. Namun, menurun 0,46 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Pekerja paruh waktu (≤ 35 jam/minggu dan tidak mencari pekerjaan) meningkat 1,31 persen poin dibandingkan Agustus 2024, dengan komposisi peningkatan pekerja paruh waktu laki-laki mengalami peningkatan lebih besar yaitu 2,46 persen poin, dibandingkan perempuan yang sebesar 0,48 persen poin. Peningkatan pekerja paruh waktu dapat terjadi seiring perkembangan industri digital yang mendukung pola kerja yang lebih fleksibel dengan berbasis teknologi. Tren peningkatan pekerja paruh waktu ini perlu diimbangi dengan kebijakan untuk melindungi kesejahteraan pekerja paruh waktu melalui skema jaminan ketenagakerjaan yang sesuai.

Dari sisi pendidikan, mayoritas penduduk bekerja masih berpendidikan rendah, namun tren pendidikan tinggi menunjukkan peningkatan. Sebanyak 38,49% tenaga kerja masih lulusan SD ke bawah, namun proporsinya menurun dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, proporsi pekerja dengan pendidikan menengah atas dan tinggi (SMA dan universitas) mengalami peningkatan, menunjukkan arah perbaikan kualitas SDM dalam jangka panjang. Kelompok lulusan diploma dan sarjana menyumbang 11,38% dari total pekerja, menjadi potensi basis tenaga terampil yang mendukung sektor formal dan industri strategis.

Grafik 1.26 Perkembangan Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumsel (%)



sumber: BPS Sumsel (diolah)

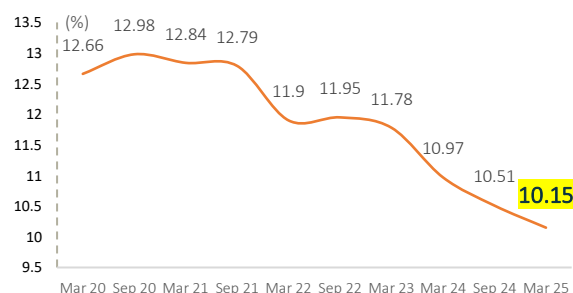
Indikator pengangguran juga membaik, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,69%. Penurunan sebesar 0,17 persen poin dari Agustus 2024 ini terjadi seiring peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun TPT perkotaan masih lebih tinggi (5,29%) dibanding perdesaan (2,64%), yang mencerminkan adanya *mismatch* keterampilan

atau kebutuhan kerja formal yang belum optimal di wilayah urban. Secara pendidikan, lulusan SMK masih mencatatkan TPT tertinggi (8,08%), mengindikasikan tantangan *link and match* antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja.

Dengan demikian, pasar tenaga kerja Sumsel sampai dengan Triwulan III tahun 2025 masih mengarah ke pemulihan yang optimistis, meskipun masih terdapat tantangan struktural seperti tingginya pekerja informal, pengangguran terdidik, dan penurunan kelompok pekerja penuh. Upaya penguatan pelatihan vokasional, sertifikasi tenaga kerja, insentif bagi perusahaan untuk rekrutmen pekerja penuh waktu dan perluasan kesempatan kerja formal menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan perbaikan ketenagakerjaan di provinsi Sumatera Selatan.

1.2.2 Kemiskinan dan Ketimpangan

Grafik 1. 27 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Tingkat kemiskinan Sumsel masih berada dalam tren perbaikan. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan Sumsel berada di angka 10,15%, turun 0,36 persen poin dari September 2024 yang sebesar 10,51%. Berdasarkan wilayah, kemiskinan di wilayah Pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Pedesaan tercatat di angka 10,79% dan perkotaan 9,10%. Namun persentase penduduk miskin perkotaan mengalami kenaikan 0,08 persen poin jika dibandingkan September 2024, sedangkan persentase penduduk miskin pedesaan meskipun per Maret 2025 masih lebih tinggi, namun mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin jika dibandingkan dengan September 2024. Hal ini menunjukkan, meskipun secara keseluruhan tingkat kemiskinan Sumsel masih berada pada tren perbaikan, peningkatan kemiskinan di perkotaan mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Hal ini menandakan perlunya intervensi yang lebih spesifik dan terfokus untuk mengatasi tantangan kemiskinan.

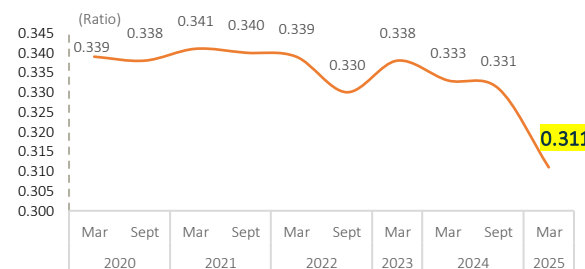
Perbaikan tingkat kemiskinan Sumsel per Maret 2025 masih terkoreksi oleh peningkatan tingkat kedalaman (P1) maupun keparahan (P2). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumsel per Maret 2025 di angka 1,642, naik dari September 2024 yang diangka 1,449. Hal tersebut menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Sumsel cenderung menjauh dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumsel (P2) per Maret 2025 di angka 0,371, naik dari September 2024 yang tercatat 0,316, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan antar penduduk miskin di Sumsel sedikit meningkat.

Komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan Sumsel. Per Maret 2025,

komoditas makanan berkontribusi sebesar 75,06% dari total garis kemiskinan, dengan beras, rokok kretek filter, daging ayam, telur ayam ras, gula pasir dan mie instan sebagai komoditas dominan. Sementara itu, komoditas non makanan yang dominan menyumbang garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Kondisi ketimpangan Sumsel per Maret 2025 mengalami penurunan. *Gini Ratio* Sumsel tercatat di angka 0,311, turun dari periode September 2024 yang sebesar 0,331. Membaiknya tingkat ketimpangan tersebut tidak terlepas dari program pemerintah yang memberikan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

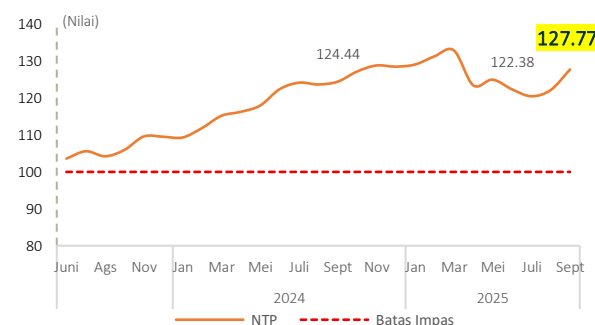
Grafik 1. 28 Perkembangan Gini Ratio Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

1.2.3 Nilai Tukar Petani

Grafik 1. 29 Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel





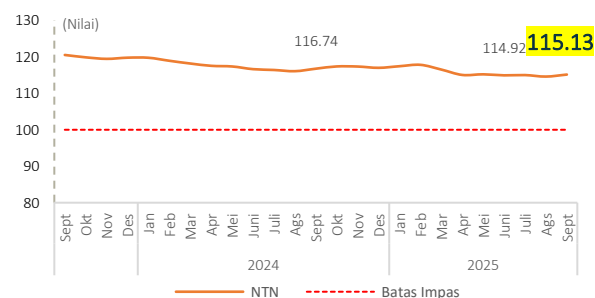
menunjukkan tren harga output lebih tinggi dibanding input produksinya. Kenaikan nilai tukar petani subsektor tanaman pangan (NTPP) didorong oleh meningkatnya harga kelompok palawija khususnya jagung, ketela pohon dan ketela rambat, sedangkan nilai tukar petani subsektor perkebunan rakyat (NTPR) naik akibat meningkatnya harga karet, kopi, dan sawit, serta nilai tukar petani subsektor Peternakan (NTPT) naik akibat kenaikan harga ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan ayam kampung. Di sisi lain, NTP hortikultura mengalami kenaikan akibat meningkatnya harga sayur-sayuran (cabai merah, kangkung dan cabai rawit).

Dari sisi komponen pengeluaran petani, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) menurun didorong oleh penurunan harga kelompok makanan dan energi rumah tangga, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) relatif stabil. Ini memperlihatkan bahwa inflasi yang dialami petani di sisi konsumsi relatif lebih tinggi dibanding biaya produksi, namun masih mampu diimbangi oleh pendapatan hasil produksi pertanian.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa daya beli dan kesejahteraan petani di Sumsel sedang mengalami peningkatan, untuk semua subsektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian pedesaan. Meski demikian, tantangan tetap hadir di semua subsektor yang sensitif terhadap gejolak harga dan biaya distribusi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah untuk stabilisasi harga, penguatan kelembagaan petani, dan efisiensi rantai pasok tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan petani ke depan.

1.2.4 Nilai Tukar Nelayan

Grafik 1.30 Perkembangan Nilai Tukar Petani Sumsel



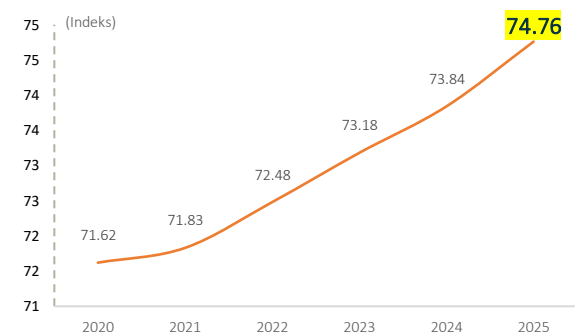
sumber: BPS Sumsel (diolah)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) bulan September 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,48% menjadi 115,13, yang terjadi karena indeks yang diterima (It) mengalami kenaikan sebesar 0,48%, sedangkan indeks yang dibayar (Ib) turun sebesar 0,0003%. Nilai ini diatas rata-rata nasional bulan September sebesar 104,25. Kenaikan It disebabkan oleh naiknya harga komoditas pada penangkapan perairan umum sebesar 3,45 persen (khususnya gabus/haruan, papuyu/betok dan sepat) dan It penangkapan perairan laut naik sebesar 0,01 persen (khususnya tongkol).

1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kinerja perekonomian Sumsel. IPM Sumsel tahun 2025 berada diangka 74,76, meningkat 0,92 poin atau 1,25% dibandingkan tahun 2024 dan masih berada dalam kategori tinggi. Namun demikian, IPM Sumsel dibawah IPM Nasional yang sebesar 75,90.

Grafik 1.31 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sumsel



sumber: BPS Sumsel (diolah)

Dari dimensi pembentuk IPM, peningkatan terjadi di semua dimensi. Kenaikan tertinggi pada dimensi Rata-rata Lama Sekolah 3,97% (yoy), diikuti Pengeluaran Perkapita yang meningkat 3,34% (yoy), Angka Harapan Hidup 0,43% (yoy), dan Harapan Lama Sekolah meningkat 0,08% (yoy).



Boks 1

Dukungan Fiskal dan Inovasi Teknologi untuk Komoditas Kopi Sumatera Selatan

M Arief Rahman, S.E., M.M. dan Dr. Ade Silvia Handayani, S.T., M.T.

(Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya)

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Sumatera Selatan (Sumsel) dengan luas lahan mencapai 267.187 hektar dan produksi tahunan mencapai 198.015 ton (BPS, 2023). Sebagai salah satu sentra kopi terbesar di Indonesia, Sumsel memiliki peran strategis pada rantai pasok kopi nasional. Kebijakan fiskal dan keuangan diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi namun juga penguatan nilai tambah melalui hilirisasi, teknologi pascapanen, dan peningkatan daya saing ekspor. Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta dukungan lembaga keuangan berupaya memperkuat pembiayaan, infrastruktur, dan inovasi untuk mendukung petani dan pelaku UMKM kopi. Di sisi lain, lembaga pendidikan tinggi seperti Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan kopi berkelanjutan berbasis teknologi dan riset terapan. Kerangka kebijakan fiskal daerah didasari oleh Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan, yang mencakup pendataan petani, penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan pembinaan teknis. Pergub ini menjadi dasar bagi program-program daerah.

Sektor keuangan memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan rantai nilai kopi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel-Babel tahun 2024, total pembiayaan untuk sektor kopi mencapai Rp336 miliar dengan 8.311 rekening aktif yang tersebar pada lima lembaga keuangan utama sebagai berikut:

Tabel 1. Pembiayaan Kredit Perbankan

Lembaga Keuangan	Jumlah Rekening	Total Pembiayaan (Rp Miliar)	Keterangan Program
Bank Sumsel Babel	4.871	179,7	Kredit sektor produktif dan KUR daerah
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	2.998	136,04	KUR sektor pertanian dan perdagangan kopi
Bank Mandiri	134	10,32	Pembiayaan modal kerja dan investasi mikro
Bank Negara Indonesia (BNI)	298	9,2	Kredit koperasi dan UMKM kopi
Bank Syariah Indonesia (BSI)	10	1,08	Pembiayaan mikro syariah petani kopi
Total	8.311	336,34	

Selain pembiayaan khusus kopi, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumsel per Juli 2025 mencapai Rp4,49 triliun (64,82% dari target Rp8,79 triliun). Laporan lokal menunjukkan bahwa sektor kopi menjadi salah satu penerima utama KUR dari Bank Sumsel Babel dan BRI. Program bantuan pemerintah daerah dan pusat masih didominasi oleh bentuk subsidi barang dan layanan, bukan tunai langsung. Dukungan diarahkan pada penguatan sarana produksi dan peremajaan lahan.

Tabel 2. Bantuan Teknologi Produksi Kopi

Program/Instansi	Jenis Bantuan/Subsidi	Sumber Dana	Skala / Capaian Fisik
Berdikari Politeknik Negeri Sriwijaya	Smart Solar Dryer DOme	LPDP RI dan Diktisaintek	Smart Solar Dryer Dome

Sebagai institusi pendidikan vokasi unggulan di Sumatera Selatan, Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) turut memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan fiskal daerah melalui inovasi teknologi Smart Solar Dryer Dome. Inovasi ini dikembangkan melalui program hasil riset pendanaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada program Berdikari Skema: Emas Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi (Dit. Minat Saintek), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Jarai, Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, dan Komunitas Kopi Sriwijaya.

Dengan desain kubah tertutup dan sistem sirkulasi udara berbasis tenaga surya, proses pengeringan menjadi lebih stabil dan tidak terganggu oleh cuaca. Selain mempercepat waktu produksi, teknologi ini juga menjaga mutu biji kopi agar tetap berada pada standar premium melalui penggunaan sensor suhu dan kelembapan otomatis yang dapat menyesuaikan kondisi pengeringan secara real time. Inovasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk, tetapi juga mendukung agenda transisi energi hijau karena mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Dengan integrasi panel surya, kebutuhan energi listrik untuk pengeringan dapat ditekan hingga tingkat minimum. Penerapan teknologi ini menjadi langkah konkret dalam mendorong hilirisasi produk kopi Sumatera Selatan, sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor di pasar global.

Kebijakan fiskal sektor kopi Sumatera Selatan sendiri mencerminkan penerapan pendekatan blended financing, yaitu perpaduan antara pembiayaan publik melalui APBD atau APBN dengan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan dan perbankan. Fokus utama kebijakan ini diarahkan pada rehabilitasi tanaman dan peremajaan lahan kopi, pemberian bantuan sarana produksi dan fasilitas pascapanen. Arah kebijakan fiskal Sumatera Selatan bergerak menuju transformasi ekonomi hijau dan inovatif. Sektor kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan daerah, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui regulasi seperti Pergub No. 19 Tahun 2024. Keterlibatan Politeknik Negeri Sriwijaya dalam pengembangan teknologi Smart Solar Dryer Dome melengkapi kebijakan tersebut dengan inovasi yang menghubungkan riset vokasi, dunia industri, dan peningkatan daya saing ekspor kopi Sumatera Selatan di kancah global.

BAB II

Analisis Fiskal Regional



Kinerja pelaksanaan anggaran Provinsi Sumsel pada triwulan III 2025 memperlihatkan prospek fiskal yang cukup terkendali seiring dengan adaptasi terhadap dinamika kebijakan nasional. Meskipun dihadapkan pada tantangan perlambatan realisasi karena efisiensi anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja APBN maupun APBD menunjukkan upaya menjaga stabilitas fiskal

- Kinerja pelaksanaan APBN di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan yang positif. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp10,68 triliun atau 60,65% dari target, dengan pertumbuhan sebesar 6,79% (yoy) dengan kontributor terbesar dari Pajak Pertambahan Nilai. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp34,27 triliun atau 68,48% dari pagu, mengalami kontraksi sebesar 5,69%. Realisasi belanja terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada Kementerian negara/Lembaga sebesar Rp8,68 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp25,59 triliun. Pertumbuhan negatif terjadi pada BPP yang berkontraksi 30,00% (yoy) sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Namun TKD menjadi penopang kinerja belanja APBN mengalami pertumbuhan 5,50% (yoy) sehingga kontraksi belanja negara secara keseluruhan tidak terlalu dalam.
- Kinerja APBD di Sumatera Selatan sampai dengan akhir triwulan III masih *on-track*. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp32,27 triliun (66,42% dari target) atau bertumbuh 21,35% (yoy). Walaupun pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan sebesar 39,79% menunjukkan Sumsel bisa lebih mandiri memenuhi kebutuhan belanja di daerah. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp25,28 triliun (50,26% dari pagu) atau tumbuh negatif 3,31% (yoy) sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja.
- Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Wilayah Sumatera Selatan sampai dengan triwulan III menunjukkan kondisi fiskal cukup terkendali. Pendapatan konsolidasian mencapai Rp18,09 triliun atau berkontraksi sebesar 19,59% (yoy). Pendapatan Konsolidasian masih didominasi Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp11,02 triliun atau 60,97%. Sedangkan Belanja konsolidasian sebesar 34,44 triliun atau berkontraksi sebesar 10,36% (yoy). Dari sisi belanja dan transfer, kontribusi dari belanja pemerintah daerah lebih dominan sebesar Rp23,79 triliun atau 69,08%.





2.1 Pelaksanaan APBN Sumsel

APBN merupakan instrumen fiskal yang berfungsi sebagai alat pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pada tahun 2025, fungsi ini dijalankan melalui kebijakan fiskal yang mengusung tema "Akselerasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Fokus kebijakan mencakup peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, transisi ekonomi hijau, optimalisasi pendapatan negara, penguatan perlindungan sosial, serta efisiensi dan stabilisasi anggaran. Melalui APBN, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya tahan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Salah satu fokus kebijakan fiskal tahun 2025 adalah penguatan fondasi fiskal secara holistik melalui pendekatan *collecting more*, yaitu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN. Di Provinsi Sumatera Selatan, target pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp17,62 triliun (data per 30 September 2025), turun 21,54% dibanding periode yang sama pada tahun 2024. Target pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp14,91 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,45 triliun, serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp258,10 miliar.

Selain penguatan dari sisi pendapatan, fondasi fiskal juga diperkuat melalui peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) sebagai upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan ketidakpastian global dan domestik. Hingga 30 September 2025, alokasi belanja negara di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp50,05 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp15,54 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp34,51 triliun. Dibandingkan tahun 2024, terjadi penurunan total alokasi belanja sebesar 8,42%, yang terutama disebabkan oleh turunnya alokasi belanja pemerintah pusat. Penurunan paling signifikan terjadi pada jenis belanja modal dan diikuti belanja barang.

Hingga triwulan III 2025, kinerja belanja negara di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan masih ditopang oleh kuatnya realisasi belanja pegawai dan TKD. Walaupun kinerja realisasi belanja negara mengalami kontraksi, realisasi belanja pegawai dan realisasi TKD mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan alokasi pagu kedua belanja tersebut. Optimalnya penyerapan belanja pegawai dan TKD mampu mengimbangi perlambatan pada belanja barang dan belanja modal, serta turut menjaga kinerja belanja negara di Sumatera Selatan agar tetap stabil di tengah upaya efisiensi yang tengah berlangsung.

Tabel 2.1 Laporan Realisasi APBN Lingkup Wilayah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2024-2025 (c-to-c)

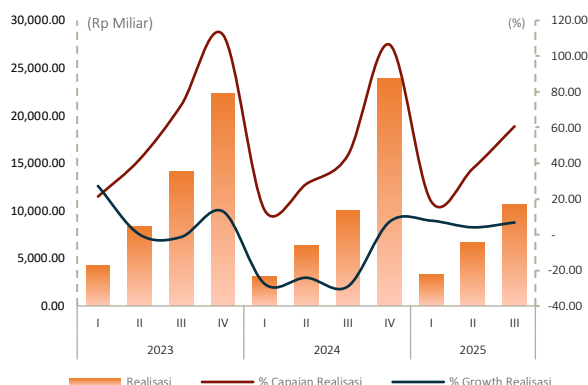
I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			% Growth	
	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu/Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	22.455,30	10.005,89	44,56	17.617,61	10.684,86	60,65	-21,54	6,79
Penerimaan Perpajakan	20.074,82	7.634,11	38,03	15.170,79	8.598,88	56,68	-24,43	12,64
Penerimaan Pajak	19.743,59	7.432,06	37,64	14.912,70	8.248,76	55,31	-24,47	10,99
Penerimaan Kepabeanan & Cukai	331,22	202,05	61,00	258,10	350,12	135,65	-22,08	73,28
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.380,48	2.371,78	99,63	2.446,81	2.085,99	85,25	2,79	-12,05
PNBP Lainnya	506,36	715,89	141,38	528,57	820,87	155,30	4,39	14,66
Pendapatan Badan Layanan Umum	1.874,12	1655,89	88,36	1.918,25	1.265,12	65,95	2,35	-23,60
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Negara	54.651,63	36.342,28	66,50	50.052,04	34.273,69	68,48	-8,42	-5,69
Belanja Pemerintah Pusat	21.158,33	12.402,99	58,62	15.540,57	8.681,70	55,86	-26,55	-30,00
Belanja Pegawai	5.971,41	4.546,27	76,13	6.288,57	4.911,50	78,10	5,31	8,03
Belanja Barang	8.851,75	4.815,66	54,40	7.559,52	3.178,75	42,05	-14,60	-33,99
Belanja Modal	6.306,45	3.017,15	47,84	1.664,81	576,71	34,64	-73,60	-80,89
Belanja Bantuan Sosial	28,73	23,91	83,21	27,67	14,74	53,27	-3,70	-38,36
Transfer Ke Daerah	33.493,29	23.939,29	71,47	34.511,47	25.591,99	74,16	3,04	6,90
Dana Bagi Hasil	11.205,62	6.890,06	61,49	12.853,68	9.160,05	71,26	14,71	32,95
Dana Alokasi Umum	13.648,50	10.652,31	78,05	13.647,03	10.597,62	77,66	-0,01	-0,51
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.430,07	615,43	43,03	424,14	203,72	48,03	-70,34	-66,90
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	4.246,84	3.164,20	74,51	5.016,96	3.454,39	68,85	18,13	9,17
Dana Desa	2.594,87	2.467,28	95,08	2.495,22	2.113,21	84,69	-3,84	-14,35
Dana Insentif Fiskal	246,51	145,20	58,90	74,43	63,00	84,64	-69,81	-56,61
Hibah ke Daerah	120,88	4,79	3,96	-	-	-	-100,00	-100,00
Surplus/Defisit Anggaran	(32.196,33)	(26.336,39)	81,80	(32.434,43)	(23.588,82)	72,73	0,74	(10,43)

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim, dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, Babel (diolah)

2.1.1.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Kinerja realisasi pendapatan negara secara agregat terpantau tumbuh positif, meskipun terdapat penurunan dari sisi realisasi pendapatan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, dan realisasi PNBP. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan (Penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai) dan Penerimaan negara bukan Pajak. Realisasi pendapatan negara di Sumsel mencapai Rp10,68 triliun atau tumbuh 6,79% (yoy) dan mencapai 60,65% dari pagu. Hal ini menunjukkan wujud nyata, kerja keras Kementerian Keuangan lingkup wilayah Sumatera Selatan dalam menghimpun penerimaan negara.

Grafik 2. 1 Perkembangan Pendapatan Negara Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim, dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, Babel (diolah)

Pendapatan negara di Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan, terutama didorong oleh meningkatnya kinerja penerimaan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Lainnya serta penerimaan Bea Keluar/Pungutan Ekspor. Total penerimaan perpajakan lingkup wilayah Sumatera Selatan mencapai Rp8,60 triliun, tumbuh 12,64% (yoy) dibandingkan dengan periode triwulan III tahun sebelumnya. Realisasi tersebut telah mencapai 56,68% dari target penerimaan perpajakan tahunan pada periode 2025.

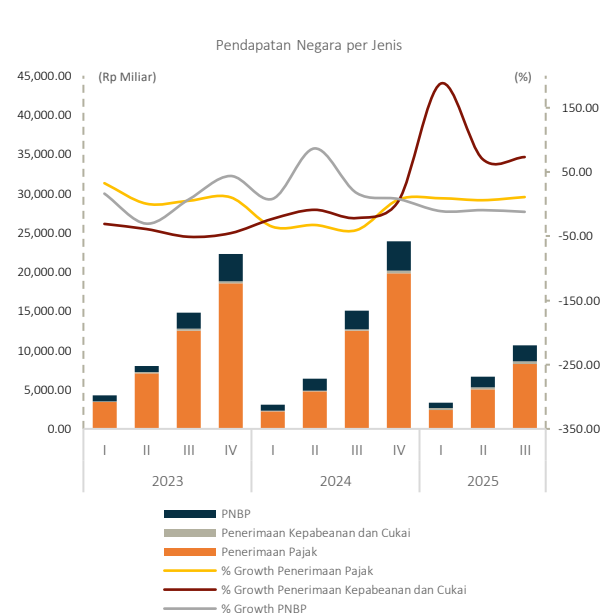
Penerimaan pajak masih menjadi kontributor utama pendapatan negara di wilayah Sumatera Selatan. Dengan kontribusi mencapai 77,20% terhadap pendapatan negara secara keseluruhan dan tumbuh sebesar 10,99% (yoy) sebagaimana grafik 2.2, didorong oleh implementasi *coretax* dan peningkatan setoran masa PPN dan PPh Tahunan Badan atas aktivitas komoditas kelapa sawit dan karet. Komponen penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan yang akan dijelaskan lebih rinci pada poin 2.1.1.1.

Penerimaan kepabeanan dan cukai secara keseluruhan juga mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun terjadi kontraksi pada sisi penerimaan bea masuk. Dengan kontribusi sebesar 3,28% terhadap pendapatan negara secara keseluruhan di wilayah Sumatera Selatan dan tumbuh senilai 73,28% (yoy) per 30 September 2025 sebagaimana ditunjukkan grafik 2.2. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kinerja ekspor Sumatera Selatan yang membaik, kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE) dibandingkan periode sebelumnya pada tahun yang sama, serta peningkatan volume ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya. Namun demikian, peningkatan aktivitas ekspor tidak diikuti oleh kinerja impor yang sejalan. Komponen penerimaan kepabeanan dan cukai terdiri dari bea

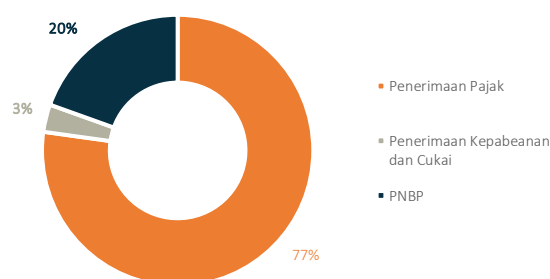
masuk, bea keluar, dan aktivitas penerimaan cukai yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian kepabeanan dan cukai (2.1.1.2).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap mengalami pertumbuhan positif apabila mengesampingkan peralihan status Universitas Sriwijaya yang berubah dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). PNBP wilayah Sumatera Selatan berkontraksi sebesar 12,05%. akibat peralihan status Universitas Sriwijaya yang sebelumnya berupa BLU, dan kini menjadi PTN-BH. Transisi kelembagaan yang terjadi terhadap Universitas Sriwijaya dari BLU berdampak pada mekanisme pencatatan dan pengesahan pendapatan, terutama pada sektor pendidikan, serta kendala dalam proses klaim BPJS di sektor layanan kesehatan. Walaupun demikian, PNBP tetap menjadi kontributor kedua terbesar terhadap pendapatan negara di Sumsel dengan porsi sebesar 19,52% per 30 September 2025 sebagaimana yang ditunjukkan grafik 2.2. Analisis lebih lanjut mengenai PNBP yang terdiri dari PNBP BLU dan PNBP lainnya sebagaimana poin 2.1.1.4.

Grafik 2. 2 Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Pendapatan Negara per Jenis Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Kontribusi Pendapatan Negara s.d. Triwulan III 2025



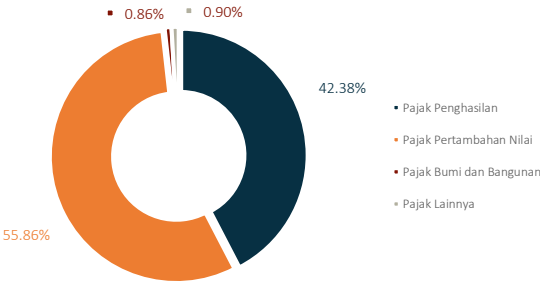
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

2.1.1.1 Penerimaan Pajak

Pertumbuhan penerimaan pajak di Sumatera Selatan mencerminkan bahwa perekonomian daerah berada dalam

perkembangan yang positif. Hingga triwulan III 2025, total penerimaan pajak mencapai Rp8,29 triliun dengan target Rp14,91 triliun atau 55,31% dari target yang ditetapkan, tumbuh sebesar 10,99% secara tahunan (yoy). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang terbesar untuk total penerimaan pajak lingkup Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi penyumbang signifikan dengan kontribusi terbesar sebagai dampak dari penerapan tarif TER dan sisanya menjadi kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pendapatan Pajak Lainnya.

Grafik 2. 3 Kontribusi per Jenis Pajak Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, Kanwil DJP Sumsel dan Babel, dan Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Kelompok Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kontributor utama dalam total penerimaan pajak dan menunjukkan membaiknya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan. Hingga periode triwulan III 2025, penerimaan dari kelompok PPN mencapai Rp4,61 triliun atau 50,38% dari target tahunan dan berkontribusi sebesar 55,86% terhadap total penerimaan pajak Sumatera Selatan. Kinerja positif ini didorong oleh meningkatnya setoran masa PPN yang bersumber dari aktivitas sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet. Kedua komoditas unggulan ini mencatat pertumbuhan signifikan, seiring tingginya permintaan dan harga komoditas global, serta meningkatnya volume ekspor. Selain itu, penyesuaian perpindahan penerimaan dari wajib pajak akibat implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis *Coretax* (PMK/81/2024) turut mendorong peningkatan penerimaan pada kelompok ini. Walaupun secara keseluruhan kinerja PPN Positif, PPN Impor mengalami kontraksi implikasi dari menurunnya aktivitas impor bahan baku, konsumsi, dan modal dengan kontribusi terbesar dari komoditas karet dan

perdagangan besar. Secara keseluruhan kinerja positif sebesar 23,4% terhadap PPN menunjukkan membaiknya aktivitas perekonomian di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Kelompok Pajak Penghasilan (PPh) menjadi kontributor kedua terbesar dalam total penerimaan pajak di Sumatera Selatan. Hingga triwulan III 2025, penerimaan dari kelompok PPh mencapai Rp4,61 triliun atau 62,52% dari target tahunan, terkontraksi sebesar 2,98%. Besarnya penerimaan yang terjadi pada kelompok pajak ini sehingga mampu menyumbang 42,38% terhadap penerimaan pajak disebabkan oleh aktivitas komoditas sektor unggulan yaitu kelapa sawit dan karet yang berdampak terhadap PPh Tahunan Badan. Disamping itu, adanya peran dari *coretax* yang menyebabkan perubahan administrasi pembayaran sertifikasi guru yang dialihkan ke Kementerian Pusat dan implementasi efisiensi anggaran juga turut berpengaruh terhadap penerimaan pajak khususnya pada penerimaan PPh Non migas.

Kelompok Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan juga mengalami kontraksi dikarenakan pagu yang berkurang. Berdasarkan data, pendapatan pajak bumi dan bangunan baru terealisasi senilai Rp71,16 triliun dengan target Rp155,81 triliun atau senilai 45,67%. Kontraksi yang terjadi pada komponen pajak tersebut Adalah sebesar 5,83%(yoy). Kontribusi kelompok pajak ini adalah 0,86% dari total keseluruhan penerimaan pajak.

Kelompok Pendapatan Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan tiga kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya dan terealisasi hampir empat kali lipat dari target. Pendapatan Pajak Lainnya terdiri dari komponen bea meterai, penjualan benda meterai, pajak tidak langsung lainnya (PTLL), bunga penagihan PPh, bunga penagihan PPN, bunga penagihan PPNBM, bunga penagihan PTLL, pemberitahuan impor barang (PIB), dan PPN batu bara. Berdasarkan capaian, angka realisasi pendapatan pajak lainnya berada pada angka Rp74,20 triliun dengan target Rp19,68 triliun, atau senilai 307,09%. Pertumbuhan yang terjadi mencapai angka 0,90% (yoy). Realisasi pajak lainnya yang signifikan dapat terjadi dikarenakan adanya implementasi *coretax* yang menyebabkan pencatatan secara sementara pada komponen pajak lainnya meningkat sebelum diklasifikasikan pada kelompok pajak yang spesifik (pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, atau PBB). Secara keseluruhan kontribusi pendapatan pajak lainnya adalah sebesar 0,90% terhadap total penerimaan pajak. Adapun rincian mengenai penerimaan per kelompok pajak tergambar pada Tabel 2.2 sebagaimana berikut.

Tabel 2. 2 Penerimaan Per Kelompok Pajak Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)

Kelompok Pajak (Rp Miliar)	2024			2025			Growth (%)	Share Kelompok Pajak TA 2025 (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Pajak Penghasilan (PPh)	8.832,22	3.603,38	40,80	5.591,38	3.495,99	62,52	-2,98	42,38
PPN & PPNBM	8.484,68	3.734,89	44,02	9.145,83	4.607,41	50,38	23,36	55,86
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	2.268,48	75,56	3,33	155,81	71,16	45,67	-5,83	0,86
Pendapatan Pajak Lainnya	158,20	18,23	11,52	19,68	74,20	377,07	307,09	0,90
Total Penerimaan Pajak	19.743,59	7.432,06	37,64	14.912,70	8.248,76	55,31	10,99	100,00%

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)



2.1.1.1.1 Analisis Kinerja Perpajakan menurut Sektor /Lapangan Usaha

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak di wilayah Sumatera Selatan jika pajak diklasifikasikan menurut sektor usaha. Hingga triwulan III 2025, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran memiliki kontribusi penerimaan pajak sebesar Rp2.491,26 miliar dengan kontribusi sebesar 30,20% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, dan Industri Pengolahan berturut-turut yaitu senilai Rp1.505,66 miliar dan Rp1.438,03 miliar atau sebesar 18,25% dan 17,43%. Selanjutnya ada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan senilai Rp1.307,15 miliar (15,85%), Pengangkutan dan Pergudangan senilai Rp557,47 miliar (6,76%), Aktivitas Keuangan dan Asuransi senilai Rp436,94 miliar (5,30%), Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja senilai Rp247,81 miliar (3,00%), dan Konstruksi senilai Rp153,77 miliar (1,86%). Sedangkan selebihnya merupakan gabungan dari penerimaan

perpajakan diluar sektor dominan yang telah disebutkan sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Peningkatan kinerja terjadi terhadap sektor-sektor utama yang menopang penerimaan pajak lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Enam sektor utama selain daripada sektor administrasi pemerintahan kinerjanya penerimaan pajaknya meningkat disebabkan oleh pembayaran masa wajib pajak khususnya komoditas sawit, karet, dan perhutanan seiring dengan harga komoditas yang stabil dan cenderung meningkat pada tahun 2025. Selain itu, adanya upaya berupa intensifikasi melalui upaya himbauan, pemeriksaan, penagihan, dan lain-lain juga membantu peningkatan kinerja penerimaan pajak. Sektor administrasi pemerintahan terkontraksi sebesar 20,99% (yoy) dikarenakan adanya dampak efisiensi anggaran khususnya penurunan belanja modal, kegiatan proyek strategis nasional yang masih ditangguhkan, dan masih lambatnya penyerapan pajak yang bersumber pada instansi pemerintah.

Tabel 2.3 Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan Triwulan III 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah)

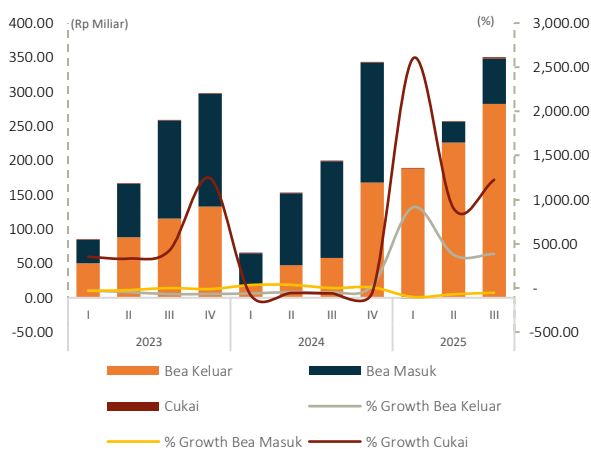
Nama Sektor (Rp Miliar)	Realisasi		Growth (%)	Kontribusi
	s.d. September 2024	s.d. September 2025		
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.008,28	2.491,16	24,04	30,20%
Administrasi Pemerintahan, Petahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.905,63	1.505,66	-20,99	18,25%
Industri Pengolahan	885,41	1.438,03	62,42	17,43%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	710,91	1.307,15	83,87	15,85%
Pengangkutan dan Pergudangan	454,34	557,47	22,70	6,76%
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	422,10	436,94	3,52	5,30%
Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	183,02	247,81	35,40	3,00%
Konstruksi	149,75	153,77	2,69	1,86%
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	103,78	111,24	7,19	1,35%
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	109,91	106,09	-3,48	1,29%
Real Estate	69,41	74,54	7,39	0,90%
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Sampah, dan Aktivitas Remediasi	47,21	48,99	3,76	0,59%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	36,50	39,73	8,84	0,48%
Aktivitas Jasa Lainnya	41,79	29,45	-29,54	0,36%
Pendidikan	14,90	14,42	-3,21	0,17%
Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	6,61	7,39	11,85	0,09%
Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	6,02	5,21	-13,45	0,06%
Informasi dan Komunikasi	3,90	3,87	-0,81	0,05%
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	1,22	0,87	-28,55	0,01%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	156,26	-38,82	-124,91	-0,470%
Tidak Diketahui	0,10	-59,43	-58.171	-0,72%
Pertambangan dan Penggalan	115,00	-232,67	-302,32	-2,82%
Total	7.432,06	8.248,76	10,99	100,00%

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Babel (diolah)

2.1.1.2 Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Aktivitas ekspor-impor di Sumatera Selatan memberikan dampak langsung terhadap penerimaan kepabeanaan dan cukai. Hingga triwulan III 2025, penerimaan dari bea keluar mencatatkan realisasi sebesar Rp282,64 miliar, tumbuh signifikan sebesar 385,53% secara tahunan (yoy), dan menjadi kontributor utama dalam penerimaan kepabeanaan di wilayah Sumsel. Sementara itu, penerimaan bea masuk terealisasi sebesar Rp82,69 miliar, namun, karena adanya restitusi sebesar Rp16,98 miliar, maka realisasi bersih bea masuk sampai dengan 30 September 2025 menjadi Rp65,71 miliar. Kondisi ini mencerminkan penurunan sebesar 54,27% (yoy) atau hanya mencapai 39,87% dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, penerimaan cukai mencatatkan realisasi sebesar Rp1,77 miliar walaupun tidak ada target pada periode 2025.

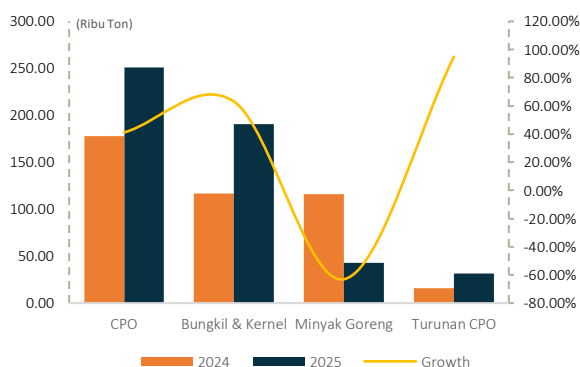
Grafik 2. 4 Perkembangan Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Penerimaan bea keluar tumbuh positif dan tercapai di atas target. Capaian bea keluar pada triwulan III 2025 mencapai 302,98% dari target tahunan dan tumbuh positif 385,53% (yoy) dipengaruhi oleh kenaikan harga patokan ekspor (HPE) serta peningkatan volume ekspor CPO dan turunannya. Komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar s.d. 30 September 2025 didominasi Produk CPO, dari beberapa komoditas yang dapat dikenakan bea keluar sesuai PMK 4/2025.

Grafik 2. 5 Perkembangan Volume Ekspor CPO & Turunannya Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)

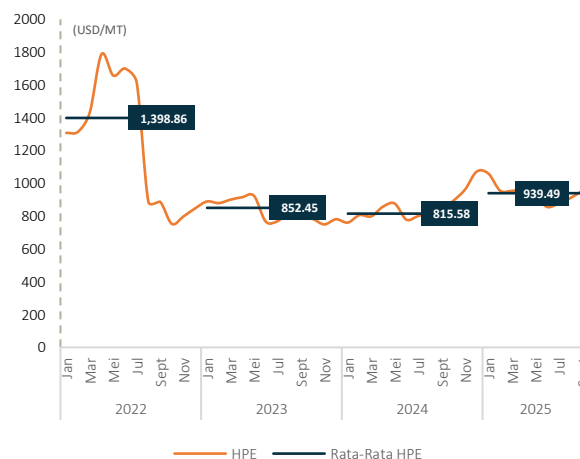


Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim dan Kementerian Perdagangan (diolah)

Penerimaan Bea Keluar Tumbuh Positif Didukung Kenaikan Volume dan Harga Ekspor CPO. Peningkatan volume ekspor serta kenaikan harga patokan ekspor (HPE) komoditas CPO dan produk turunannya menjadi faktor utama pertumbuhan

penerimaan bea keluar di Sumatera Selatan. Volume ekspor CPO dan turunannya per 30 September 2025 tercatat tumbuh sebesar 20,85% (yoy) atau sebanyak 514,86 ribu ton yang dibagi ke dalam 4 jenis komoditi yaitu CPO dengan volume sebesar 250,73 ribu ton atau tumbuh senilai 41,12% (yoy), bungkil dan kernel dengan volume 190,26 ribu ton atau tumbuh sebesar 63,00%, turunan CPO dengan volume sebanyak 31,16 ribu ton atau tumbuh sebesar 94,78%, dan sisanya berupa minyak goreng sebanyak 42,70 ribu ton.

Grafik 2. 6 Perkembangan Harga Patokan Ekspor CPO & Turunannya Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025



Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim dan Kementerian Perdagangan (diolah)

Selain itu, rata-rata HPE untuk produk CPO juga mengalami kenaikan signifikan, yakni sebesar 15,19% (yoy), dari sebelumnya USD 815,58/MT menjadi USD 939,49/MT. Kombinasi antara peningkatan volume ekspor dan kenaikan harga ini mendorong penerimaan bea keluar melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga mencatatkan kinerja yang sangat positif sepanjang periode berjalan.

Tabel 2. 4 Realisasi Impor dan Bea Masuk per Komoditas Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025

Top 10 Komoditas Impor		Top 10 Komoditas terkena Bea Masuk	
Komoditi	Jumlah (Juta USD)	Komoditi	Jumlah (Rp Miliar)
Mesin	270,84	Mesin	17,75
Pupuk	94,01	Barang Dari Keramik	6,64
Kayu Kasar	73,88	Semi-Manufaktur; Barang Dari Plastik	4,87
Reaktor, Turbin, Generator	62,71	Parts Alat Berat	4,09
Mesin Perkakas	30,56	Pompa	3,14
Tungku dan Oven	25,82	Parts Mesin	2,89
Pulp	21,80	Kawat	2,55
Alat Berat	16,10	Baja Lembar Lapis	2,07
Mcb, Stop Kontak, Tusuk Kontak	11,65	Rupa-Rupa Senyawa Kimia Anorganik	1,97
Barang dari Batu	11,23	Reaktor, Turbin, Generator	1,91

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)



Penurunan Aktivitas Impor Berdampak pada Penerimaan Bea Masuk di Sumsel. Tren penurunan aktivitas impor di Sumatera Selatan berdampak langsung pada penurunan penerimaan bea masuk. Hingga triwulan III 2025, nilai penerimaan bea masuk mengalami penurunan hingga 54,27 % (yoy). Bahkan, realisasi penerimaan bea masuk masih di angka 39,87% dari target yang telah ditetapkan.

Komoditas mesin tercatat sebagai penyumbang utama aktivitas impor di Sumsel dengan nilai mencapai USD 270,84 juta. Namun demikian, tidak semua impor mesin dikenakan bea masuk, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PMK 188/2015 yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk keperluan pengembangan industri.

Menurunnya penerimaan bea masuk di Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan III 2025 sejalan dengan penurunan impor, terutama pada kelompok sereal serta penurunan importasi bahan baku karet. Komoditas mesin tercatat memberikan kontribusi penerimaan bea masuk sebesar Rp17,75 miliar, naik sebesar 20,61% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Sebaliknya, komoditas sereal mengalami penurunan signifikan sebesar 91,85% (yoy) sehingga kontribusinya terhadap bea masuk menjadi sangat kecil pada periode ini. Sementara itu, top 10 komoditi lainnya (selain mesin) yang menyumbang bea impor terbesar semuanya mengalami peningkatan, kecuali parts mesin dan baja lembaran lapis yang masing-masing mengalami penurunan 15,79% dan 28,19% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 5 Bea Masuk per Komoditas s.d. 30 September 2025 (dalam miliar rupiah)

Top 10 Komoditas terkena Bea Masuk	2024	2025	Growth (%)
Mesin	14,72	17,75	20,61
Barang Dari Keramik	5,09	6,64	30,54
Semi-Manufaktur; Barang Dari Plastik	0,99	4,87	390,39
Parts Alat Berat	3,54	4,09	15,32
Pompa	1,43	3,14	119,13
Parts Mesin	3,43	2,89	-15,79
Kawat	1,81	2,55	40,66
Baja Lembar Lapis	2,88	2,07	-28,19
Rupa-Rupa Senyawa Kimia Anorganik	0,83	1,97	137,14
Reaktor, Turbin, Generator	0,42	1,91	359,65

Sumber: Kanwil DJBC Sumbagtim (diolah)

Top komoditi impor terbesar setelah mesin adalah pupuk (USD 94,01 juta), kayu kasar (USD 73,88 juta), reaktor, turbin, generator (USD 62,71 juta), mesin perkakas (USD 30,56 juta), tungku dan oven (USD 25,82 juta), pulp (USD 21,80 juta), alat

berat (USD 16,10 juta), mcb, stop kontak, tusuk kontak (USD 11,65 juta), barang dari batu (USD 11,23 juta), dan lainnya.

Sedangkan untuk Top 10 komoditi dengan bea masuk terbesar setelah mesin diikuti barang dari keramik (Rp6,64 miliar), semi-manufaktur; barang dari plastik (Rp4,87 miliar), parts mesin (Rp 2,89 miliar), kawat (Rp2,55 miliar), baja lembaran lapis (Rp2,07 miliar), rupa-rupa senyawa, kimia organik (Rp1,97 miliar), reaktor, turbin, generator (Rp 1,91 miliar), dan lainnya.

Penerimaan cukai di Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan III 2025 tidak memiliki target khusus, karena umumnya berasal dari sanksi administratif cukai (ultimum remedium) atas pelanggaran ketentuan peredaran barang kena cukai. Total penerimaan cukai tercatat sebesar Rp1,77 miliar, yang bersumber dari beberapa komponen. Kontribusi terbesar berasal dari sanksi administratif atas penindakan rokok ilegal (hasil tembakau) sebanyak 681.980 batang, dengan nilai penerimaan mencapai Rp1,63 miliar. Selain itu, terdapat penerimaan dari denda atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp130 juta, serta denda administratif Etil Alkohol (EA) sebesar Rp5,18 juta. Total penerimaan ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 1.224,95% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lonjakan ini mengindikasikan adanya peningkatan peredaran rokok ilegal dan MMEA ilegal di wilayah Sumatera Selatan, yang memicu intensifikasi penindakan dan pengenaan sanksi administratif oleh otoritas terkait.

2.1.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak

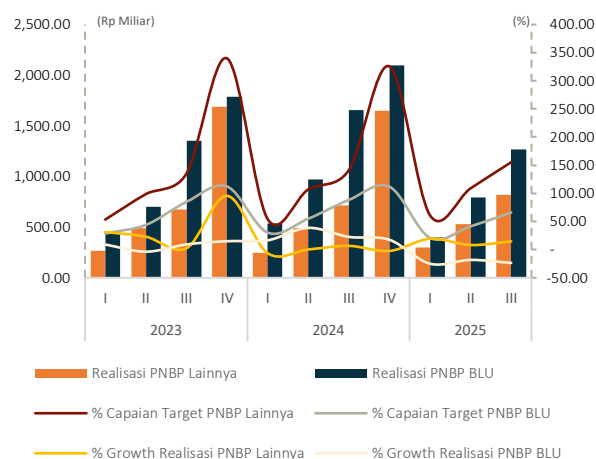
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumsel tumbuh negatif yang dipengaruhi menurunnya PNBP BLU. Hingga akhir triwulan III 2025, total PNBP di Sumsel terealisasi Rp2.085,99 miliar (85,25% dari target) atau tumbuh negatif 12,05% (yoy). Berdasarkan jenisnya, PNBP BLU mencatatkan realisasi sebesar Rp1.265,12 miliar (65,95% dari target) dan tumbuh negatif 23,60% (yoy). PNBP BLU berkontribusi lebih besar dengan *share* 60,65% dibandingkan PNBP Lainnya yang berkontribusi 39,35% mencatatkan penerimaan mencapai Rp820,87 miliar (155,30% dari target) dan tumbuh sebesar 14,66% (yoy).

PNBP BLU Wilayah Sumatera Selatan tetap menunjukkan tren positif meskipun secara *year-on-year* mengalami kontraksi. Realisasi PNBP BLU di wilayah ini utamanya dikontibusi oleh PNBP Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan PNBP Jasa Pelayanan Pendidikan. PNBP Jasa Pelayanan Rumah Sakit tumbuh sebesar 1,32% (yoy) dengan kontributor utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Sementara itu, PNBP Jasa Pelayanan Pendidikan mengalami kontraksi sebesar -56,17% (yoy) dengan kontributor terbesar Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan status Universitas Sriwijaya (Unsri) dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sehingga pendapatannya tidak lagi disetorkan ke kas negara. Namun demikian, apabila pendapatan Universitas Sriwijaya dikecualikan, maka PNBP BLU Wilayah Sumatera Selatan justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,06% (yoy), yang menandakan adanya perbaikan kinerja pada satker-satker BLU lainnya.



Grafik 2.7 Realisasi per Jenis PNBP Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)



PNBP Lainnya utamanya berkontribusi dari PNBP di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu Jasa Kepelabuhan. PNBP pada Jasa Kepelabuhan di Sumsel mencatatkan realisasi mencapai Rp159,22 miliar dan tumbuh positif 9,19% (yoy). Selanjutnya penyumbang lain yang cukup besar pada PNBP lainnya yaitu berasal dari berbagai macam pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp61,65 miliar dan Pendapatan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp55,66 miliar. Data dari Kantor Wilayah DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung merincikan PNBP lingkup wilayah Sumsel di luar PNBP BLU menjadi PNBP Aset, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang dengan rincian target dan realisasi sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6 Perkembangan PNBP Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2024 dan 2025 (dalam Miliar Rupiah/c-to-c)

Uraian	Target	Realisasi	%	Growth
PNBP Aset	29,58	31,61	106,88	-25,70%
PNBP Piutang Negara	0,007	0,022	326,03	68,57%
PNBP Lelang	29,09	34,96	120,17	76,83%
Total	58,68	66,60	113,50	6,84%

Sumber: Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung (diolah)

Hingga akhir triwulan III 2025, realisasi PNBP berada di angka 113,50% melebihi target, didominasi oleh PNBP Lelang dan diikuti oleh PNBP Aset dengan realisasi masing-masing sebesar 120,17% dan 106,88% daripada target atau senilai Rp34,96 miliar dan Rp31,61 miliar. Hanya PNBP Aset yang mengalami penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya (-25,70%) diakibatkan dari penurunan realisasi MAP Sewa, Penjualan Barang Rampasan/Tegahan, dan Pendapatan BLU di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, peningkatan yang cukup baik pada realisasi PNBP pada Pemindahtanganan.

2.1.1.4 Penerimaan Hibah

Tidak ada penerimaan hibah pada lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2025.

2.1.1.5 Prognosis Pendapatan Negara

Kanwil DJPb Sumatera Selatan melakukan prognosis atas Pendapatan Negara yang dibagi ke dalam Perpajakan, Bea dan Cukai, dan PNBP ke dalam rincian-rincian sebagaimana berikut.

2.1.1.5.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Kinerja penerimaan kembali *rebound* setelah kontraksi Mei-Agustus, dengan deviasi positif 10,08% di September, didorong *rebound* setoran masa PPN dan PPh atas aktivitas komoditas kelapa sawit dan karet, meskipun dari sisi PPh NonMigas sedikit terkontraksi akibat dipengaruhi perubahan administrasi pembayaran melalui *coretax*, serta perubahan kebijakan pembayaran sertifikasi guru dan efisiensi anggaran belanja pemerintah. Dikarenakan PPN masih menjadi penopang utama penerimaan, fokus diarahkan pada pemantauan kepatuhan wajib pajak strategis dan percepatan restitusi terkontrol, guna menjaga tren positif hingga akhir tahun di tengah potensi perlambatan aktivitas sektor perdagangan dan pertambangan. Hingga 30 September 2025, proyeksi Penerimaan Perpajakan pada triwulan III sebesar Rp3.155,71 miliar dengan realisasi sebesar Rp3.205,12 sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp102,62 miliar dengan deviasi kumulatif Rp303,84 miliar sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.7 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	2.387,58	2.430,18	42,60
Tw II	2.401,63	2.613,46	211,83
Tw III	3.155,71	3.205,12	49,42
Tw IV	4.884,95	0,00	-

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.1.5.2 Proyeksi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Kinerja Proyeksi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai masih positif hingga akhir triwulan ke III. Hingga September 2025, realisasi Bea dan Cukai Sumsel mencapai Rp366,31 miliar atau sekitar 96,2% dari proyeksi kumulatif sebesar Rp380,79 miliar. Proyeksi Bea Cukai pada triwulan III sebesar Rp114,09 miliar dengan realisasi sebesar Rp93,76 miliar dengan deviasi negatif sebesar Rp20,33 miliar sehingga deviasi kumulatif menjadi Rp82,46 miliar. Kinerja penerimaan menunjukkan perbaikan signifikan dibanding sebelumnya, ditopang oleh lonjakan Bea Keluar CPO dan produk turunannya seiring peningkatan volume ekspor dan harga patokan ekspor (HPE). Meski September mencatat deviasi negatif (-47,51%) dibandingkan proyeksi bulanan, capaian agregat masih tergolong *overperformed* s.d. September 2025, mencerminkan ketergantungan penerimaan terhadap aktivitas ekspor berbasis komoditas.

Struktur penerimaan masih didominasi oleh Bea Keluar, disusul Bea Masuk, dan Cukai. Kinerja Bea Keluar tumbuh tinggi dipengaruhi peningkatan ekspor CPO. Sedangkan Bea Masuk hanya mencapai 39,87% dari target karena berkurangnya volume impor Sumsel ke depan, dengan volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, diversifikasi basis penerimaan dan penguatan pengawasan ekspor-impor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas penerimaan kepabeanan dan cukai Sumsel hingga akhir tahun. Kebijakan percepatan realisasi yang direncanakan dan dianggarkan sampai dengan akhir tahun diharapkan mampu sejalan



dengan peningkatan bea masuk sehingga ikut menopang kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 berakhir.

Tabel 2. 8 Proyeksi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	81,54	203,02	121,48
Tw II	88,22	69,53	-18,69
Tw III	114,09	93,76	-20,33
Tw IV	96,94	0,00	-

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.1.5.3 Proyeksi Penerimaan PNBP

Hingga September 2025, realisasi PNBP Sumsel tercatat Rp2,08 triliun atau sekitar 86,1% dari proyeksi kumulatif ditopang kinerja PNBP Lainnya. Proyeksi PNBP pada triwulan III sebesar Rp715,78 miliar dengan realisasi sebesar Rp771,46 miliar sehingga deviasi pada triwulan ini berada di angka Rp55,68 miliar dengan deviasi kumulatif sebesar Rp143,62 miliar. Pendapatan Jasa Kepelabuhanan, Penerimaan Kembali Belanja Modal tahun anggaran yang lalu (TAYL), serta layanan pertanahan merupakan beberapa komponen PNBP Lainnya yang menopang kinerja PNBP secara keseluruhan. PNBP BLU justru berkontraksi dan belum optimal capaiannya dari proyeksi kumulatif, sebagai akibat dampak transformasi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH yang mengubah pola pencatatan pendapatan.

Secara jenis, PNBP BLU tetap menjadi kontributor terbesar (dominan) namun cenderung terkoreksi, sementara PNBP Lainnya tumbuh kuat dan melampaui target ditopang jasa kepelabuhanan, penerimaan kembali belanja modal TAYL, dan layanan pertanahan. Fokus perbaikan ke depan perlu untuk dilakukan stabilisasi kinerja BLU pasca-transisi Universitas Sriwijaya menjadi PTN-BH, sambil menjaga momentum PNBP Lainnya agar realisasi kembali mendekati proyeksi pada sisa tahun.

Tabel 2. 9 Proyeksi Penerimaan PNBP Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (dalam Miliar Rupiah)

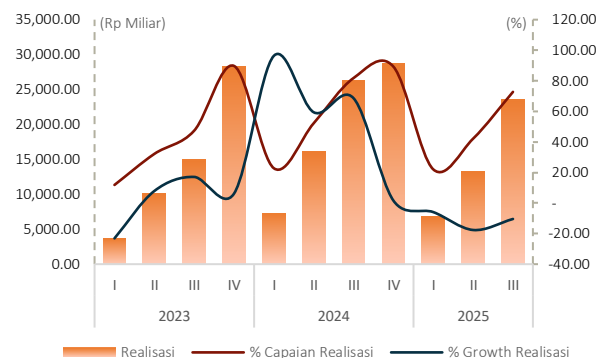
Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	703,76	697,85	-5,91
Tw II	512,22	607,07	93,85
Tw III	715,78	771,46	55,68
Tw IV	477,48	0,00	-

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2 Belanja Negara

Belanja Negara dalam hal ini merupakan belanja pemerintah pusat untuk lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari empat komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Adapun perkembangan realisasi belanja negara wilayah Sumatera Selatan yang tergambar dalam Grafik 2.8 berikut.

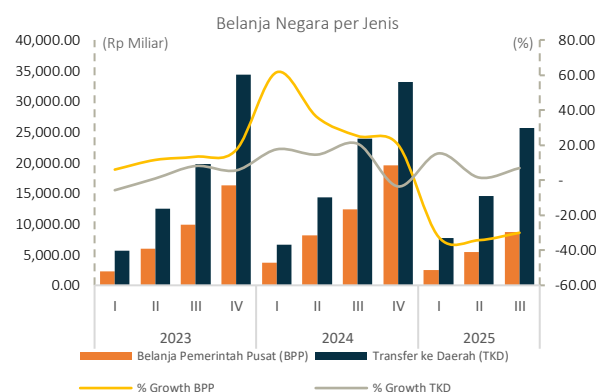
Grafik 2. 8 Perkembangan Realisasi Belanja Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



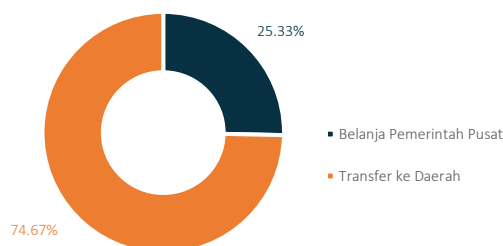
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja negara secara umum berkontraksi sebesar 5,69%, berdampak pada kondisi pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) di Sumsel. Hingga triwulan III 2025, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp34.273,69 miliar dengan realisasi pada belanja pemerintah pusat (BPP) Rp8.681,70 miliar dan TKD Rp25.591,99 miliar. Dari sisi BPP menunjukkan kinerja yang negatif yaitu berkontraksi sebesar 30,00% (yoy), namun dari sisi TKD menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,90% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pada belanja negara.

Grafik 2. 9 Perkembangan dan Kontribusi Realisasi Belanja Negara Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025 (c-to-c)



Kontribusi Belanja Negara s.d. Triwulan III 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

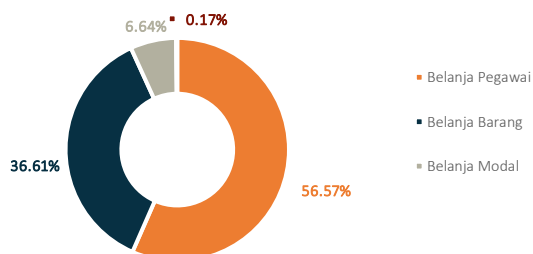
Belanja negara di Sumsel utamanya dimanfaatkan untuk mendukung APBD melalui penyaluran TKD. Hal ini terlihat dari proporsi realisasi belanja TKD yang memiliki *share* 74,67% dari total belanja negara. Sementara itu, realisasi BPP berkontribusi sebesar 25,33% dari total belanja negara. BPP mencapai 55,86% dari pagu, sedangkan untuk belanja TKD mencapai 74,16% dari pagu. Realisasi belanja TKD diharapkan dapat

mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan di daerah sehingga dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi bagi perekonomian.

2.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

BPP mengalami kontraksi dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi yang menahan laju realisasi, terutama pada belanja barang dan belanja modal. Hingga triwulan III 2025, BPP wilayah Sumsel terealisasi Rp8.681,70 miliar atau 55,86% dari pagu. Capaian tersebut lebih rendah 30% (yoy) dibanding realisasi periode yang sama tahun lalu. Struktur realisasi didominasi oleh belanja pegawai yang memberikan kontribusi sebesar 56,57%, diikuti belanja barang. Selain kebijakan efisiensi dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2025, kontraksi belanja juga dipengaruhi oleh efek agenda Pemilu/Pilkada 2024 yang menyebabkan realisasi belanja barang tahun lalu meningkat signifikan, sehingga menimbulkan *base effect* terhadap capaian tahun 2025. Secara keseluruhan, dinamika kebijakan fiskal dan siklus kegiatan nasional tersebut turut membentuk pola penyerapan BPP 2025 yang lebih hati-hati dan cenderung melambat.

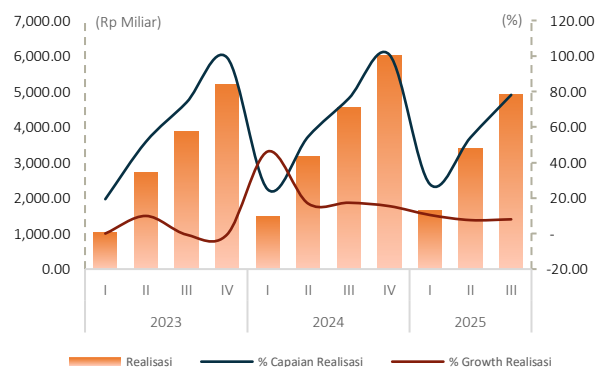
Grafik 2. 10 Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Jenis Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja pegawai tumbuh positif dipengaruhi oleh kenaikan tunjangan kinerja, pembayaran tunjangan Pendidik Non PNS, dan Pembayaran Gaji serta adanya pengangkatan PPPK baru. Belanja Pegawai wilayah Sumsel hingga triwulan III 2025 terealisasi sebesar Rp4.911,50 miliar atau 78,10% dari pagu. Realisasi tumbuh 8,03% (yoy). Belanja pegawai tersebut dipergunakan untuk pembayaran Gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja ASN, TNI & Polri, Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidik Non PNS, serta uang makan, honorarium, uang lembur, THR, dan Gaji 13;

Grafik 2. 11 Perkembangan Belanja Pegawai Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)

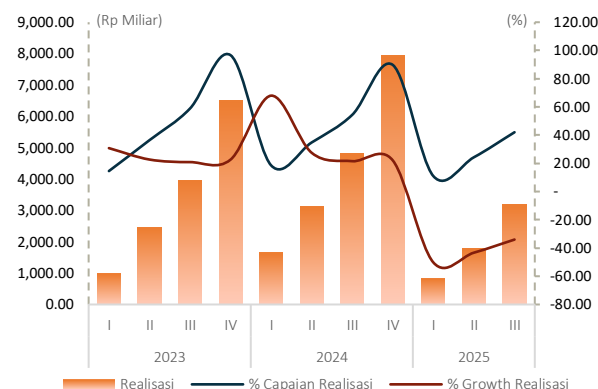


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja barang tumbuh negatif dipengaruhi kebijakan efisiensi belanja dan adanya pelaksanaan kegiatan Pemilu/Pilkada di tahun anggaran sebelumnya. Belanja Barang hingga triwulan III 2025 terealisasi Rp3.178,75 miliar atau 42,05% dari pagu,

tumbuh negatif -33,99% (yoy). Kinerja ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi awal tahun yang menahan laju realisasi di hampir semua Satuan Kerja. Selain itu, adanya dampak siklus kegiatan Pemilu/Pilkada 2024 yang menyebabkan realisasi belanja barang tahun sebelumnya meningkat signifikan sehingga menimbulkan *base effect* terhadap capaian tahun 2025. Belanja barang tersebut utamanya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan Kesehatan & JKN, infrastruktur konektivitas, Ketersediaan, Akses & Konsumsi Pangan Berkualitas, Keamanan & Ketertiban Masyarakat, dan dukungan pelaksanaan operasional kantor.

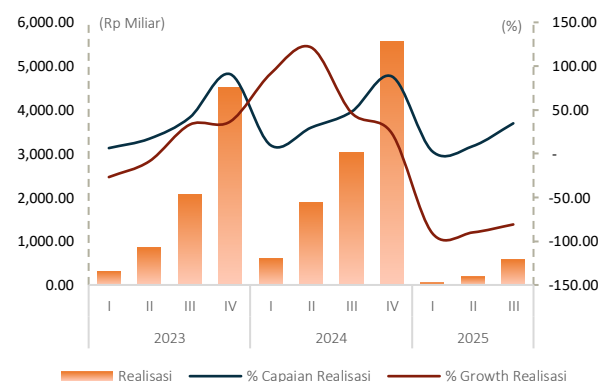
Grafik 2. 12 Perkembangan Belanja Barang Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja modal terkontraksi dipengaruhi Kebijakan efisiensi anggaran. Realisasi belanja modal wilayah Sumsel sampai triwulan III 2025 terealisasi Rp576,71 miliar atau 34,64% dari pagu, terkontraksi signifikan -80,89% (yoy). Capaian realisasi tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran sejak awal tahun yang menyebabkan eksekusi belanja belum dapat dilaksanakan dan/atau mengalami penundaan. Belanja modal sebagian besar dipergunakan untuk pelaksanaan program ketahanan sumber daya air, infrastruktur konektivitas, dan dukungan operasional kantor

Grafik 2. 13 Perkembangan Belanja Modal Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)

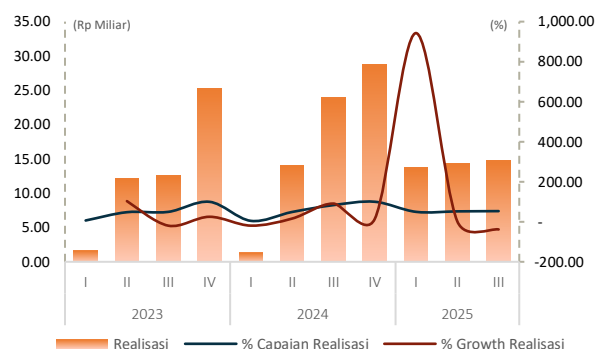


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja Bantuan Sosial Sumsel tumbuh negatif disebabkan belum disalurkannya KIP Semester Ganjil 2025. Belanja Bantuan Sosial hingga triwulan III 2025 terealisasi Rp14,74 miliar atau 53,27% dari pagu, mengalami pertumbuhan negatif -38,36% (yoy) dibanding tahun 2024. Realisasi Bansos terutama digunakan untuk Bantuan Pendidikan KIP kepada mahasiswa serta Program ATENSI bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang disalurkan melalui satuan kerja

Sentra Budi Perkasa, Kementerian Sosial. Kinerja belanja Bansos terkontraksi oleh belum tersalurkannya KIP Semester Ganjil 2025 pada Satker UIN Raden Fatah Palembang.

Grafik 2. 14 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)

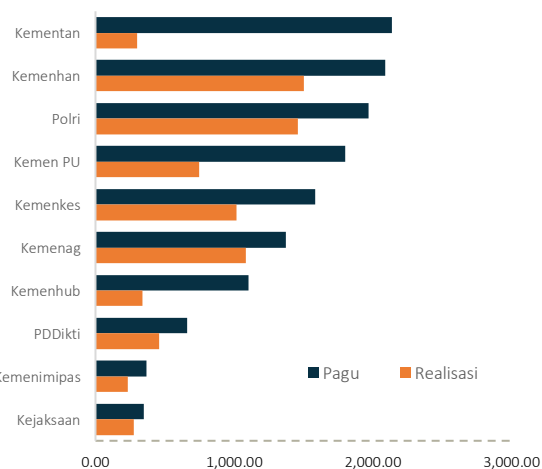


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.1.1 Belanja Berdasarkan Kementerian Negara/ Lembaga (K/L)

Berdasarkan unit organisasi, BPP di Sumsel dengan 10 pagu belanja terbesar terdapat pada Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kemen PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kejaksaan yang menyumbang sebesar 86,78% pagu BPP di Sumsel TA 2025. Dari 10 kementerian tersebut, kinerja realisasi belanja pada Kementerian Agama menjadi yang tertinggi yaitu sebesar 79,10%. Diikuti oleh Kejaksaan RI sebesar 78,70% dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 74,03%. Hal ini tidak terlepas dari jumlah blokir anggaran yang relatif kecil pada ketiga kementerian tersebut sehingga tetap mampu mengoptimalkan belanja. Sementara itu, Kementerian Pertanian yang memiliki pagu tertinggi namun realisasinya masih sangat rendah yaitu sebesar 14,13% dari pagu. Hal ini tidak terlepas dari blokir efisiensi belanja yang besar hingga awal triwulan III 2025.

Grafik 2. 15 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Unit Organisasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (Rp Miliar)



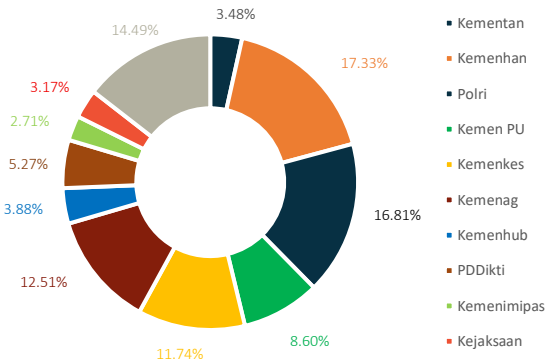
Grafik 2.15. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Unit Organisasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (Rp Miliar)

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Ditinjau dari kontribusi terhadap perekonomian, sumbangan tertinggi BPP di Sumsel ada pada Kementerian Pertahanan sebesar 17,33%, Kepolisian Negara RI sebesar 16,81%, dan

Kementerian Kesehatan 11,74%. Selain blokir efisiensi yang relatif lebih kecil belanja pegawai yang cukup tinggi juga menjadi pendukung optimalisasi belanja pada ketiga Kementerian tersebut.

Grafik 2. 16 Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat per Unit Organisasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan II 2025

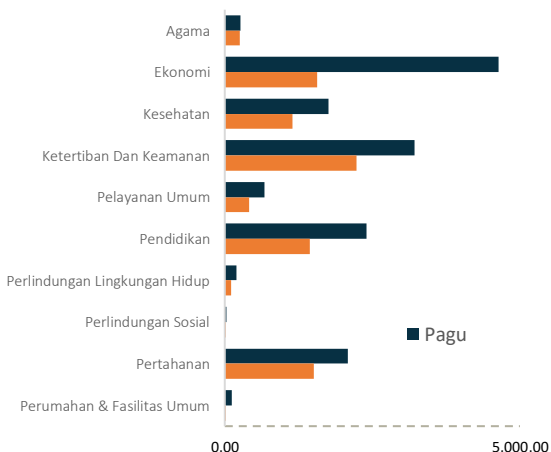


Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.1.2 Belanja Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan fungsi, BPP di Sumsel pagu terbesar berasal dari belanja fungsi ekonomi. Realisasi belanja fungsi ekonomi mencapai Rp1.561,89 miliar atau menyumbang 17,99% dari total BPP Sumsel di triwulan III 2025. Meskipun menjadi pagu terbesar, capaian belanja fungsi ekonomi relatif belum optimal dengan persentase capaian 33,67% dari pagu dipengaruhi adanya blokir efisiensi yang masih cukup hingga pertengahan triwulan III 2025. Fungsi ekonomi sebagian besar ada pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dimana beberapa kegiatan belum terlaksana dengan maksimal.

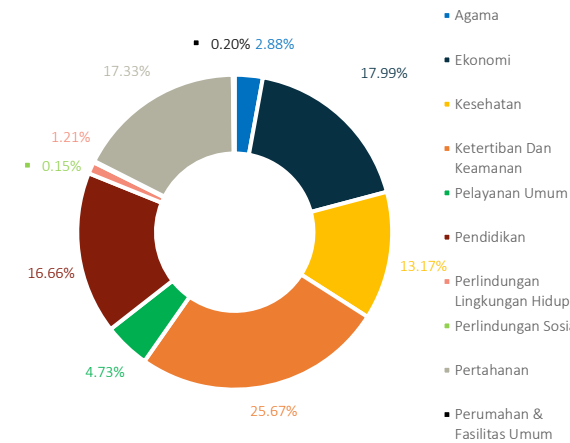
Grafik 2. 17 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Ditinjau dari capaiannya, fungsi agama memiliki persentase realisasi tertinggi yaitu 93,73% dari pagu. Fungsi ini terdapat pada Kementerian Agama. Sementara persentase realisasi terendah terdapat pada fungsi Perumahan & Fasilitas Umum yang sebesar 14,96%. Dari sisi nominal, Fungsi Ketertiban dan Keamanan menjadi kontributor terbesar yaitu 25,67% dari total realisasi. Sedangkan penyumbang terendah juga terdapat pada Fungsi Perumahan & Fasilitas Umum yang sebesar 0,20% dari total realisasi

Grafik 2. 18 Kontribusi BPP per Fungsi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.1.3 Proyeksi Belanja Negara

Kinerja penyerapan masih menunjukkan pola fluktuatif dengan deviasi positif sampai dengan akhir September 2025. Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat triwulan III 2025 sebesar Rp3.524,47 miliar dengan realisasi sebesar Rp3.299,96, terjadi deviasi negatif Rp224,51 miliar sehingga deviasi kumulatif hingga triwulan III 2025 menjadi Rp15,77 miliar. Namun terdapat Penurunan realisasi terutama terjadi pada belanja barang dan modal, yang masih tertahan akibat keterlambatan penyelesaian kegiatan fisik dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun. Meskipun demikian, secara kumulatif, capaian belanja pegawai tetap berada pada tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program rutin dan gaji ASN.

Belanja pegawai tumbuh stabil didorong penyaluran gaji ke-13 serta kenaikan tunjangan kinerja ASN dan PPPK. Sementara itu, belanja barang menunjukkan perlambatan karena kebijakan efisiensi serta rasionalisasi kegiatan perjalanan dinas dan operasional satker. Belanja modal baru mencapai 35,4% dari pagu, masih di bawah pola ideal penyerapan triwulan III, yang umumnya di atas 50%. Untuk menjaga peran fiskal sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, perlu percepatan penyelesaian kontrak dan penyerapan belanja produktif, khususnya pada sektor infrastruktur dan layanan publik di triwulan IV 2025.

Tabel 2. 10 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	2.404,21	2.528,77	124,57
Tw II	2.737,42	2.853,13	115,71
Tw III	3.524,47	3.299,96	-224,51
Tw IV	6.800,61	0,00	-

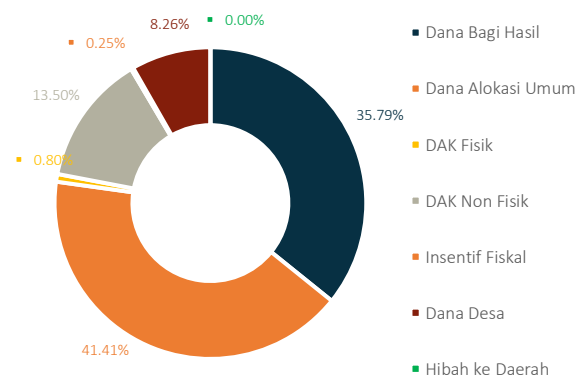
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.2 Transfer ke Daerah (TKD)

Kinerja realisasi TKD di Sumatera Selatan tumbuh positif untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Hingga periode triwulan III tahun 2025, realisasi TKD mencapai Rp25,59 triliun dan mengalami kenaikan 6,90% (yoy). Dari sisi capaiannya mencatatkan kinerja yang cukup baik pada triwulan III yaitu mencapai 74,16% dari pagu untuk mendukung kinerja APBD Sumsel. Meskipun alokasi TKD Sumsel di 2025 turun 2,56% dari pagu awal akibat adanya penyesuaian kebijakan efisiensi TKD (sesuai KMK 29/2025), peran TKD dalam mendorong belanja daerah tetap kuat di tengah belanja pemerintah pusat yang signifikan turun terdampak karena kebijakan efisiensi anggaran. Optimalnya kinerja TKD di Sumsel, utamanya ditopang dari kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik. Hal ini dipengaruhi perubahan kebijakan penyaluran di tahun 2025, dimana untuk DBH disalurkan setiap 2 bulan, yang sebelumnya hanya dilakukan setiap triwulan. Sementara untuk DAK Non Fisik, telah diberlakukannya kebijakan baru mengenai percepatan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang disalurkan langsung menuju ke rekening penerima.

Grafik 2. 19 Kontribusi Transfer ke Daerah per Jenis Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

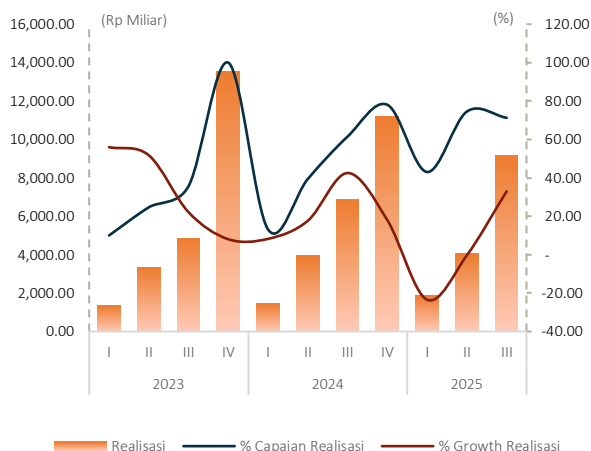
Berdasarkan jenisnya, TKD di Sumsel didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Kontribusi realisasi DAU mencapai 41,41% dari total realisasi TKD Sumsel hingga triwulan III 2025. Hal ini lazim terjadi karena alokasi DAU selalu menjadi yang paling tinggi sejalan dengan kebijakan *hold harmless* yang mengharuskan alokasi DAU tidak berkurang dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kontributor kedua penyaluran TKD Sumsel berasal dari DBH yang mencapai 35,79%, yang utamanya berasal dari DBH Sumber Daya Alam. Hal ini sejalan dengan struktur ekonomi Sumsel yang ditopang dari sektor pertambangan dan penggalan, dimana Sumsel sebagai daerah penghasil minerba dan migas sehingga alokasi DBH Sumsel memang cukup besar. Diikuti dengan kontribusi DAK NonFisik, Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, DAK Fisik, dan Hibah ke Daerah secara berturut-turut.

2.1.2.2.1 Dana Bagi Hasil

Penyaluran DBH Sumsel hingga triwulan III 2025 optimal dan berperan penting mengurangi *vertical imbalance* dan meningkatkan pemerataan di Sumsel. Realisasi DBH Sumsel mencapai Rp9,16 triliun (71,26% dari pagu) dan mengalami pertumbuhan positif 32,95% (yoy). Capaian tersebut tumbuh positif dibandingkan tahun 2024 dipengaruhi perubahan kebijakan penyaluran DBH di tahun 2025 yang dipercepat dengan cara disalurkan setiap 2 bulan, dimana pada tahun sebelumnya dilakukan setiap triwulan. Selain itu, meningkatnya kinerja DBH tahun 2025 juga dipengaruhi oleh

penyaluran DBH Kurang Bayar (KB) tahun anggaran 2023 mencapai Rp323,57 miliar, yang penyalurannya dilakukan pada Agustus 2025.

Grafik 2. 20 Perkembangan Dana Bagi Hasil Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Isu utama DBH di Sumsel hingga Triwulan III 2025 adalah masih terjadinya keterlambatan rekonsiliasi pajak pusat sehingga memicu penundaan salur DBH Pajak di sejumlah pemda. Pemerintah Provinsi Sumsel, Kab. OKI, Kab. Ogan Ilir, dan Kota Palembang terlambat menyelesaikan rekonsiliasi pajak Semester I 2025 sehingga dikenakan penundaan salur DBH Pajak Agustus bahkan untuk Kota Prabumulih belum menyelesaikan rekonsiliasi pajak Semester I 2025 sehingga belum terdapat salur DBH Pajak di tahun 2025 (kecuali pembayaran Kurang Bayar/KB DBH). Pola serupa juga muncul di Pemerintah Kab. Muara Enim yang belum menuntaskan rekonsiliasi pajak pusat Semester I 2025, sementara Empat Lawang dan Pagar Alam sempat terlambat menerima salur DBH karena lupa mengirimkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pajak pusat ke DJPK meski BAR telah ditandatangani sebelum batas waktu. Di sisi lain, di wilayah Musi Banyuasin dan Banyuasin tidak terdapat kendala substantif pada penyaluran DBH, namun pemda tetap diminta menuntaskan penyelesaian deposit setoran di sistem *Coretax* pasca rekonsiliasi agar ke depan penyaluran DBH tidak terganggu.

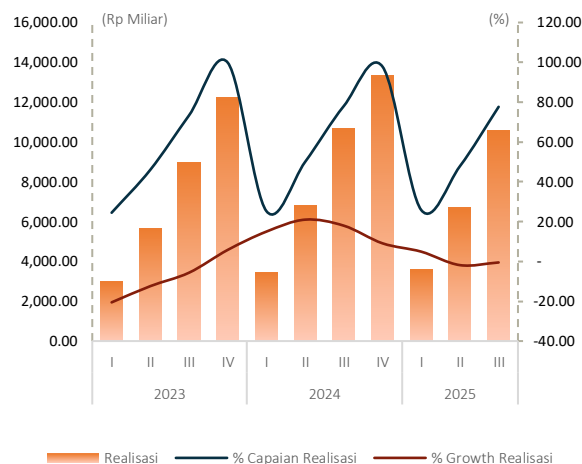
Isu lain terkait DBH adalah pergeseran struktur penyaluran akibat pembayaran Kurang Bayar DBH serta pemanfaatan DBH Sawit yang belum optimal di beberapa pemerintah daerah. Di wilayah Sumsel, alokasi DBH meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi pengalokasian DBH Kurang Bayar (KB) Tahun Anggaran 2023 pada tahun berjalan. Kondisi tersebut mendorong kinerja penyaluran DBH tahun 2025 tumbuh kuat, terutama setelah terealisasinya penyaluran DBH KB Tahun Anggaran 2023 pada bulan Agustus 2025. Namun demikian, beberapa pemerintah daerah mencatatkan realisasi penyerapan DBH Sawit di sisi APBD masih rendah dan syarat salur DBH Sawit Tahap II terlambat disampaikan, sehingga terjadi penundaan penyaluran DBH Sawit Tahap II kepada pemda. Di sisi lain, variasi kapasitas pengelolaan keuangan daerah tetap menjadi catatan agar momentum tambahan fiskal dari DBH KB dan DBH Sawit benar-benar dimanfaatkan untuk memperkuat belanja prioritas daerah.

2.1.2.2.2 Dana Alokasi Umum

Kinerja Penyaluran DAU Sumsel tetap menjadi penopang utama dalam menjaga pemerataan keuangan daerah dan

upaya memperbaiki kualitas layanan publik meskipun mengalami sedikit penurunan. Hingga triwulan III tahun 2025 realisasi DAU mencapai Rp10,59 triliun (77,66% dari pagu), dengan kinerja penyaluran yang sedikit terkontraksi sebesar 0,51% (yoy). Penurunan kinerja penyaluran DAU dipengaruhi oleh menurunnya pagu DAU Sumsel sebesar 2,56% dibandingkan pagu awal karena penyesuaian imbas kebijakan efisiensi TKD sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025.

Grafik 2. 21 Perkembangan Dana Alokasi Umum Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Selain dipengaruhi kebijakan efisiensi TKD, kinerja penyaluran DAU Sumsel juga dibayangi isu serapan yang belum optimal pada komponen DAU *Specific Grant*. Permasalahan utama berasal dari rendahnya realisasi DAU PPPK karena sebagian besar pemda baru melakukan pengangkatan PPPK pada bulan Juni–Juli, sehingga penyaluran hanya dapat dilakukan setelah SK pengangkatan terbit dan dokumen syarat salur dilengkapi. Kondisi ini tercatat pada Pemerintah Daerah Palembang dan Prabumulih yang hingga 30 September 2025 bahkan belum menerima penyaluran DAU PPPK.

Isu serapan juga muncul pada DAU Kelurahan akibat dinamika pergantian Lurah yang berdampak pada keterlambatan administrasi anggaran dan proses input data. Beberapa pemerintah daerah mengalami kendala penyerapan DAU Kelurahan karena perlu menyesuaikan dokumen dan tanda tangan pejabat baru, sehingga memperlambat pencairan dan perekaman realisasi. Dampak tersebut tidak hanya memperlambat pencairan tetapi juga mengganggu perencanaan kas daerah yang mengandalkan pendanaan rutin DAU Kelurahan untuk menjaga kualitas layanan publik dasar.

Selain itu, di beberapa wilayah, terjadi pemotongan DAU sebagai konsekuensi adanya sisa dana DAK Nonfisik tahun sebelumnya yang belum disetorkan kembali ke RKUN, mencerminkan lemahnya disiplin fiskal pemerintah daerah. KPPN Baturaja mencatat pemotongan DAU bulan Oktober untuk Pemda OKU dan OKU Timur karena masih terdapat sisa dana DAK Nonfisik 2024 di RKUD yang belum disetor kembali sebelum akhir tahun. Kebijakan *offset* ini menjadi pengingat penting bagi pemda untuk menjaga kepatuhan laporan dan ketepatan waktu penyelesaian sisa dana transfer.

Beberapa pemda juga belum menyelesaikan syarat salur DAU Pendidikan dan Kesehatan tahap III, sehingga penyaluran di sejumlah daerah tertunda hingga penyelesaian dokumen oleh dinas teknis. Kondisi ini ditemukan pada Kabupaten PALI,

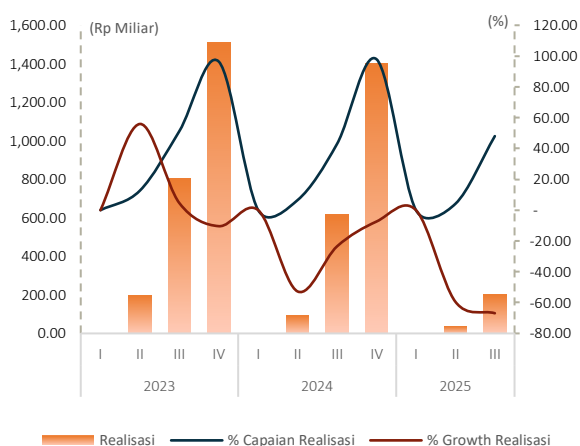


Muara Enim, dan Pagar Alam, yang semuanya masih menunggu kelengkapan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendidikan/kesehatan. Keterlambatan penyusunan dokumen ini menjadi risiko tahunan yang berulang dan mempengaruhi kelancaran penyediaan layanan dasar di daerah.

2.1.2.2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik

Kinerja Penyaluran DAK Fisik hingga triwulan III 2025 berkontraksi dipengaruhi kebijakan efisiensi TKD di tahun 2025. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025, pagu DAK Fisik di Sumsel tercatat mengalami penurunan signifikan 54,25% dari pagu awal atau mencapai Rp502,90 miliar. Sehingga, hal ini berdampak pada penurunan kinerja realisasi DAK Fisik yang berkontraksi hingga 66,90% (yoy). Hingga triwulan III 2025, realisasi DAK Fisik Sumsel tercatat Rp203,72 miliar atau 48,03% dari pagu.

Grafik 2. 22 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Keterlambatan pengajuan dokumen dan lemahnya administrasi OPD menjadi isu dominan hampir di seluruh pemerintah daerah, yang menyebabkan penyaluran Tahap I dan Tahap II berlangsung tidak ideal. Sebagian besar pemda mengajukan DAK Fisik Tahap I pada hari-hari terakhir meskipun batas waktu telah diperpanjang hingga 29 Agustus 2025, bahkan satu kontrak di Kota Lubuklinggau ditolak APIP karena ketidaksesuaian jenis belanja (rapat koordinasi direkam sebagai pengadaan seragam). Selain itu juga sebagian besar SKPD sering terlambat merekam realisasi dan output sehingga menghambat pengajuan tahap berikutnya.

Beberapa pemda mengalami kendala hukum dan kesalahan perekaman akun yang membuat sebagian DAK Fisik tidak dapat disalurkan. DAK Fisik di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam tidak dapat disalurkan karena adanya kasus hukum terkait pengadaan *Chromebook*, sementara Kabupaten Empat Lawang mengalami kendala karena kesalahan perekaman akun (belanja buku/TIK justru direkam sebagai *meubelair*), sehingga seluruh paket tertolak dan tidak dapat diproses. Kendala ini menurunkan tingkat penyerapan DAK Fisik meskipun secara nominal beberapa daerah tampak telah menyelesaikan tahapan salur awal.

Keterlambatan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) turut muncul di beberapa daerah, menunjukkan bahwa koordinasi pusat-daerah masih perlu diperkuat. Pada wilayah kerja KPPN Lubuklinggau, terdapat penundaan rekomendasi DAK Fisik dari DJPK yang

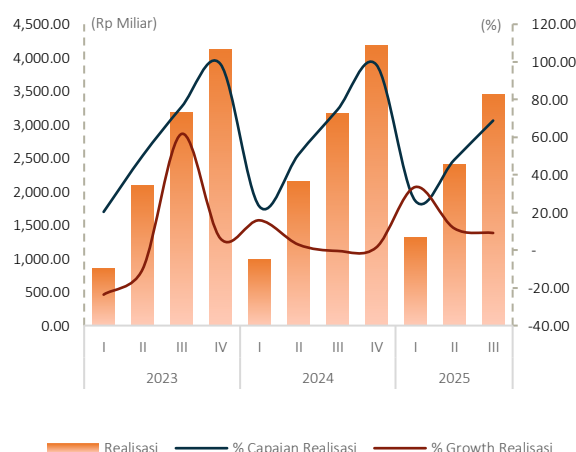
diduga dipicu keterlambatan pemda dalam menyampaikan syarat salur, sehingga proses verifikasi menjadi mundur. Walaupun bukan merupakan kendala di tingkat KPPN, hal ini berdampak langsung pada arus kas dan progres kegiatan fisik di daerah.

Selain itu, cuaca dan musim penghujan di triwulan IV menjadi risiko tambahan bagi percepatan penyelesaian pekerjaan fisik, sehingga keterlambatan administratif di triwulan III berpotensi menimbulkan gagal salur di akhir tahun. Musim penghujan pada triwulan IV berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan konstruksi, sehingga pemerintah daerah yang menunda pengajuan dokumen salur hingga mendekati batas waktu menghadapi risiko tinggi tidak dapat mencairkan DAK Fisik tepat waktu.

2.1.2.2.4 Dana Alokasi Khusus NonFisik

Penyaluran DAK Non Fisik Sumsel tumbuh positif dipengaruhi utamanya perbaikan kebijakan penyaluran Tunjangan Profesi Guru yang disalurkan langsung ke rekening penerima. Hingga triwulan III tahun 2025 realisasi DAK Non Fisik mencapai Rp3,45 triliun atau 68,85% daripada pagu dan tumbuh positif 9,17% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun realisasi dinilai cukup baik, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan proses penyaluran DAK Non Fisik di wilayah Sumsel.

Grafik 2. 23 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Tantangan retur pembayaran dan variasi kesiapan administrasi antar daerah masih membayangi pelaksanaan penyaluran DAK Non Fisik di Sumsel. Di beberapa daerah, lambatnya proses perekaman realisasi pada SKPD serta munculnya retur SP2D, terutama untuk pembayaran Tunjangan Guru ASN (TGASN). Retur terjadi akibat inkonsistensi data rekening supplier antara sistem Kemendikdasmen dan SPAN sehingga SP2D ditolak dan harus dilakukan perbaikan berulang. Temuan ini konsisten di wilayah lain, dimana retur juga muncul pada penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru, BOSP, dan BOP Kesetaraan akibat rekening yang tidak aktif dan kesalahan perekaman bank.

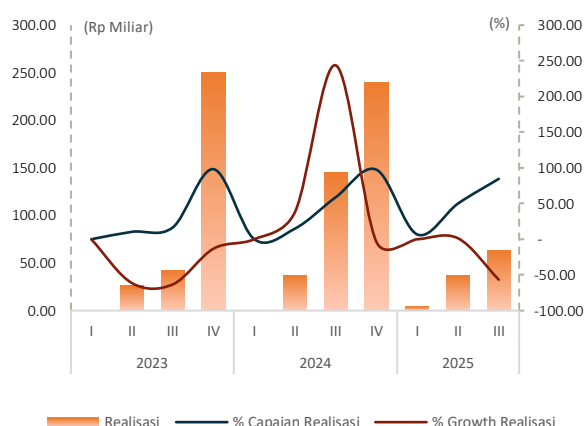
Selain itu, variasi jenis DAK Nonfisik baru dan kompleksitas juknis berdampak pada keterlambatan pemahaman dan implementasi di daerah. Beberapa KPPN di wilayah Sumsel mencatat bahwa skema baru seperti BOK POM, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian belum tersosialisasi dengan baik kepada pemda maupun KPPN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) Penyaluran Dana Transfer Khusus (DTK). Kurangnya kejelasan teknis pada awal tahun menyebabkan beberapa pemda terlambat menyusun laporan realisasi dan persyaratan salur yang menjadi dasar pencairan tahap berikutnya. Kondisi ini mencerminkan pentingnya *early guidance* sebelum tahun anggaran berjalan.

2.1.2.2.5 Dana Insentif Fiskal

Penyaluran Insentif Fiskal di tahun 2025 lebih rendah dipengaruhi belum ditetapkan penerima insentif fiskal tahun anggaran berjalan untuk kategori kesejahteraan rakyat dan pengendalian inflasi. Hingga triwulan III 2025, realisasi insentif fiskal mencapai Rp63 miliar (84,64% dari pagu) dan secara nominal realisasi mengalami penurunan 56,61% (yoy). Meskipun secara nominal lebih rendah, capaian realisasi insentif fiskal di tahun 2025 lebih baik dengan capaian 84,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 58,90%.

Grafik 2. 24 Perkembangan Insentif Fiskal Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



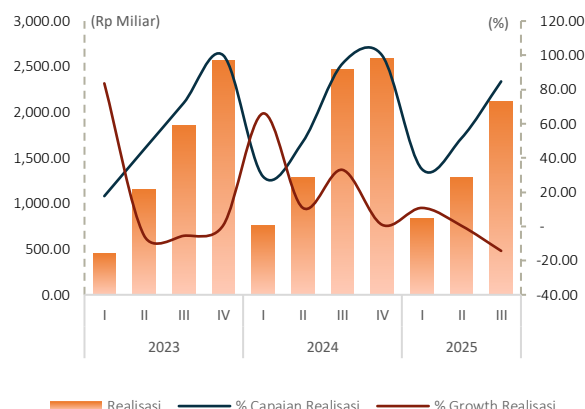
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Secara umum, tantangan utama Insentif Fiskal di Sumsel bukan berasal dari mekanisme salur, tetapi sebagian besar pemda belum memenuhi kriteria kinerja sehingga hanya beberapa mendapatkan alokasi. Di wilayah KPPN Lahat, misalnya, hanya Kabupaten Lahat yang menerima penyaluran Insentif Fiskal pada Semester I 2025, sementara daerah lain belum memenuhi indikator yang dipersyaratkan. Hal ini mengindikasikan masih terbatasnya capaian indikator prioritas nasional di beberapa daerah, termasuk pengendalian inflasi, penurunan stunting, percepatan belanja daerah, dan peningkatan kualitas tata kelola. Hal ini menegaskan perlunya penguatan *capacity building*, peningkatan disiplin pelaporan, serta pendampingan lebih intensif kepada pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan kinerja antar daerah.

2.1.2.2.6 Dana Desa

Kinerja penyaluran Dana Desa Sumsel hingga triwulan III 2025 berkontraksi. Realisasi dana desa Sumsel mencapai Rp2,11 triliun atau 84,69% dari pagu dan tumbuh negatif 14,35% (yoy). Hal ini utamanya didorong oleh adanya kebijakan penghentian sementara penyaluran tahap II dana desa di 2025 terkait optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penghentian ini menjadi faktor struktural penyebab merosotnya kinerja Dana Desa Triwulan III di seluruh Sumsel.

Grafik 2. 25 Perkembangan Dana Desa Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Di luar penghentian kebijakan, persyaratan tambahan pada Dana Desa Tahap II juga menjadi isu utama yang memperlambat pengajuan dan pencairan di daerah. Syarat tambahan berupa Akta Notaris pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDes terbukti memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan oleh pemerintah desa. Banyak desa pada akhirnya tertahan karena belum menyelesaikan syarat ini, sementara sebagian lainnya menunggu kepastian waktu diperbolehkannya salur kembali. Persoalan ini memperlihatkan bahwa kesiapan administrasi desa belum seragam dan sangat dipengaruhi kapasitas pendamping serta perangkat desa.

Keterlambatan penetapan APBDes dan lambatnya perekaman penyerapan oleh desa juga turut menjadi faktor perlambatan penyaluran Dana Desa, terutama di pemda dengan jumlah desa besar atau kapasitas SDM rendah. Adanya desa yang mengalami hambatan karena APBDes terlambat ditetapkan, sehingga syarat salur Tahap I ikut mundur dan berdampak pada Tahap II. Selain itu, perekaman realisasi dan dokumen pendukung yang masih lambat menyebabkan desa tidak dapat mengajukan pencairan tepat waktu. Hambatan ini memperlihatkan bahwa tata kelola fiskal tingkat desa menjadi faktor penentu kecepatan salur.

Selain itu, perilaku *fraud*, rekening desa yang *dormant*, dan lemahnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) desa masih ditemukan dan berkontribusi pada tertahannya penyaluran Dana Desa di beberapa wilayah. KPPN Palembang mencatat adanya indikasi perilaku *fraud*/koruptif dalam pengelolaan Dana Desa yang menghambat proses verifikasi dan penyaluran. Di wilayah KPPN Lahat dan KPPN Lubuklinggau, keterlambatan perekaman dan rekening desa yang tidak aktif menjadi penyebab utama lambatnya verifikasi dan diperlukannya penerbitan SP2D retur untuk beberapa desa. Masalah fundamental seperti ini memperlihatkan pentingnya peningkatan integritas dan literasi keuangan desa oleh pihak yang terlibat.

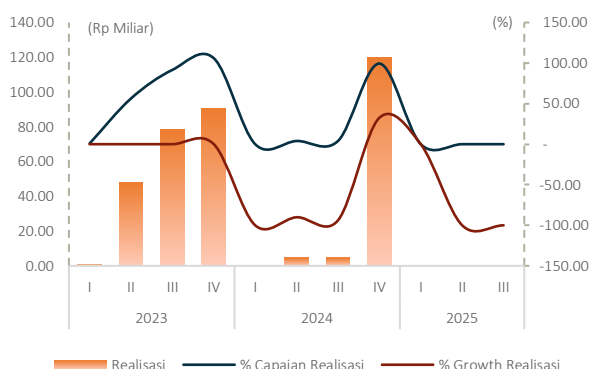
2.1.2.2.7 Hibah ke Daerah

Penyaluran hibah ke daerah di Sumsel hingga triwulan III 2025 tidak menunjukkan aktivitas penyaluran karena pada tahun anggaran ini tidak terdapat alokasi hibah terencana. Hal ini karena kebijakan dari pemerintah terkait hibah ke daerah utamanya digunakan untuk membiayai proyek *Mass Rapid Transit (MRT)*, *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project*, serta *Bio Carbon Fund Initiative for*



Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL) dimana Sumsel bukan menjadi lokus daerah yang ditargetkan. Selain itu, alokasi hibah langsung tahun berjalan juga belum ada di tahun 2025 hingga triwulan III 2025 yang utamanya digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Grafik 2. 26 Perkembangan Hibah ke Daerah Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.1.2.2.8 Proyeksi Transfer ke Daerah

Hingga September 2025, realisasi TKD Sumsel mencapai Rp25,59 triliun atau sekitar 74,2% dari proyeksi kumulatif. Proyeksi Transfer ke Daerah pada triwulan III 2025 diproyeksikan mencapai Rp11.367,51 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp11.050,72 sehingga menyebabkan deviasi proyeksi sebesar negatif Rp316,79 dan menjadikan deviasi kumulatif menjadi negatif Rp1.006,96. Hal ini disebabkan belum optimalnya penyaluran DAK Fisik dan DBH, yang hingga akhir triwulan III baru mencapai masing-masing sekitar 48,03% dan 71,26% dari proyeksi pagu, walaupun telah dioptimalkan oleh kinerja realisasi penyaluran Dana Desa dan DAK Non Fisik, khususnya komponen pendidikan (BOS) dan kesehatan (BOK).

Jenis TKD berbasis formula seperti DAU dan Dana Desa tetap menjadi penopang utama. DAU terealisasi stabil, sementara Dana Desa terakselerasi signifikan sejak Agustus seiring dengan percepatan penyaluran tahap II. Sebaliknya, penyaluran DAK Fisik dan DBH masih menghadapi kendala administrasi, terutama terkait verifikasi dokumen oleh beberapa pemda. Untuk menjaga kesinambungan belanja daerah di triwulan IV, optimalisasi asistensi teknis kepada pemda dan percepatan konfirmasi penyaluran dari K/L penyalur menjadi krusial, agar sisa anggaran dapat tersalur tepat waktu dan mendukung pemulihan ekonomi daerah.

Tabel 2. 11 Proyeksi Transfer ke Daerah s.d. Triwulan II 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Triwulan	Proyeksi	Realisasi	Deviasi
Tw I	7.885,87	7.675,87	-210,00
Tw II	7.345,58	6.865,40	-480,18
Tw III	11.367,51	11.050,72	-316,79
Tw IV	7.912,52	0,00	

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

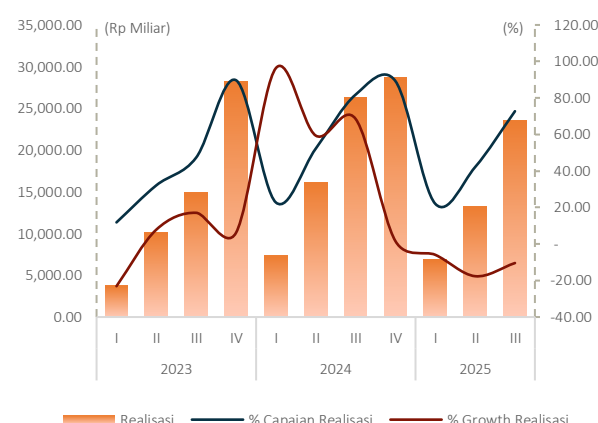
2.1.3 Surplus/Defisit APBN

Sampai dengan triwulan III 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 23,59 triliun, atau senilai 72,73% dari target. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 10,43% (yoy), mencerminkan perbaikan

kinerja fiskal, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Penurunan defisit ini didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan serta penerimaan kepabeaan dan cukai. Di sisi lain, belanja negara mengalami penurunan terutama pada belanja pemerintah pusat. Pertumbuhan minus defisit anggaran hingga akhir September 2025 menunjukkan kinerja APBN masih *on-track* dan bekerja keras untuk membiayai program prioritas pemerintah. Capaian ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta menerapkan pengendalian belanja yang lebih disiplin dan terukur.

Grafik 2. 27 Perkembangan Surplus/Defisit APBN Sumsel Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.2 Pelaksanaan APBD Sumsel

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan III TA 2025 menunjukkan capaian yang positif di tengah pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mendorong pemerintah daerah untuk merasionalisasi anggaran, terutama dengan membatasi belanja pada kegiatan nonprioritas. Di tengah penyesuaian tersebut, pengelolaan fiskal tetap stabil dan menunjukkan arah yang konstruktif. Sejalan dengan itu, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) turut mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta melaksanakan belanja yang lebih berkualitas.

Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga akhir triwulan III TA 2025 menunjukkan pertumbuhan positif di seluruh jenis pendapatan, dengan capaian sebesar Rp32,27 triliun atau 66,42% dari target tahunan, meningkat 21,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didorong oleh peningkatan kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dampak dari kebijakan opsen pajak dan restrukturisasi retribusi daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat turut menunjukkan kinerja yang baik, sementara transfer antar pemerintah daerah mengalami perlambatan akibat perubahan skema bagi hasil pajak daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan opsen pajak. Selain itu, komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah turut mencatat pertumbuhan signifikan, terutama dari kategori pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Realisasi belanja daerah mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi belanja, realisasi hingga triwulan III TA 2025 mencapai Rp25,28 triliun, atau sekitar 50,26% dari total pagu anggaran. Kinerja belanja daerah mengalami perlambatan sebesar -3,31% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut hampir terjadi pada semua jenis belanja daerah, kecuali jenis belanja operasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,17% (yoy). Hal tersebut dikarenakan penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi anggaran, khususnya dengan membatasi alokasi belanja pada kegiatan non-prioritas seperti seremoni, kajian, studi banding, publikasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Surplus APBD Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai Rp6,98 triliun hingga triwulan III TA 2025 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup besar untuk mengoptimalkan belanja. Surplus ini merupakan hasil dari meningkatnya pendapatan daerah yang signifikan, sementara realisasi belanja masih terkendali di tengah penerapan kebijakan efisiensi. Namun, efisiensi belanja tidak semata-mata berarti menahan pengeluaran, melainkan

memastikan bahwa belanja diarahkan secara tepat dan memberikan dampak maksimal. Oleh karena itu, keberadaan surplus ini menjadi peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mengakselerasi belanja yang berkualitas, khususnya pada program-program prioritas, agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan oleh masyarakat sebelum tahun anggaran berakhir.

Dengan pertumbuhan Pendapatan Daerah yang solid dan surplus anggaran yang meningkat, Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan memiliki ruang fiskal yang cukup besar untuk mendorong ekspansi belanja yang lebih produktif. Kondisi ini memberikan peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan belanja pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja positif APBD hingga Triwulan III 2025 menjadi landasan penting dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan layanan publik, serta penguatan kapasitas fiskal menuju tata kelola keuangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Rincian mengenai pelaksanaan APBD Sumatera Selatan tergambar pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2. 12 Laporan Realisasi APBD Konsolidasian Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2024-2025 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			% Growth 2024-2025
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	52,778.75	26,593.57	50.39%	48,583.43	32,271.32	66.42%	21.35%
Pendapatan Asli Daerah	10,782.31	4,780.44	44.34%	10,268.11	6,682.52	65.08%	39.79%
Pajak daerah	6,956.33	3,476.88	49.98%	7,166.51	4,822.12	67.29%	38.69%
Retribusi daerah	453.10	97.47	21.51%	640.85	325.58	50.81%	234.02%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	425.37	333.89	78.49%	418.65	343.02	81.93%	2.73%
Lain-lain PAD yang sah	2,947.52	872.19	29.59%	2,042.10	1,191.80	58.36%	36.64%
Pendapatan Transfer	41,455.86	21,744.41	52.45%	38,156.51	25,479.31	66.78%	17.18%
Transfer Pemerintah Pusat	36,490.25	19,849.01	54.40%	35,463.97	23,989.31	67.64%	20.86%
Transfer Antar Daerah	4,965.61	1,895.40	38.17%	2,692.54	1,490.01	55.34%	-21.39%
Lain-lain Pendapatan yang sah	540.58	68.73	12.71%	158.81	109.49	68.95%	59.32%
Pendapatan Hibah	93.47	6.90	7.38%	11.05	7.63	69.03%	10.56%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	447.10	61.83	13.83%	147.76	101.86	68.94%	64.76%
Belanja Daerah	55,066.92	26,146.43	47.48%	50,299.93	25,282.13	50.26%	-3.31%
Belanja Operasi	32,735.26	17,438.35	53.27%	32,277.70	17,641.65	54.66%	1.17%
Belanja Pegawai	15,949.87	10,129.41	63.51%	17,833.33	10,728.04	60.16%	5.91%
Belanja Barang dan Jasa	14,328.66	5,916.18	41.29%	12,844.84	6,262.01	48.75%	5.85%
Belanja Bunga	33.86	22.85	67.50%	21.63	12.27	56.74%	-46.31%
Belanja Subsidi	20.13	11.20	55.62%	35.85	14.94	41.68%	33.44%
Belanja Hibah	2,305.56	1,328.22	57.61%	1,410.05	573.15	40.65%	-56.85%
Belanja Bantuan sosial	97.18	30.49	31.37%	132.00	51.25	38.82%	68.07%



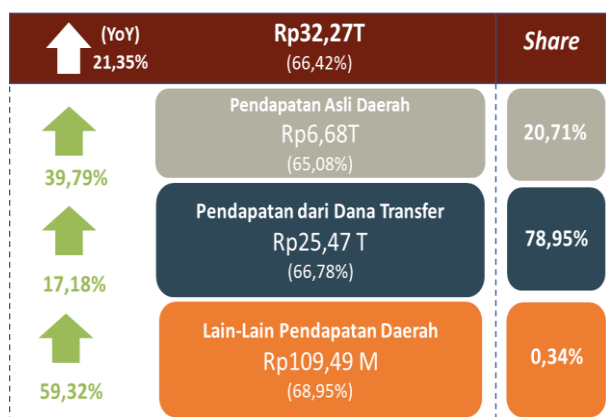
I-Account (dalam Miliar Rupiah)	TA 2024			TA 2025			% Growth 2024-2025
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Belanja Modal	13,036.24	3,680.30	28.23%	9,389.07	3,011.90	32.08%	-18.16%
Belanja Tidak Terduga	381.70	10.01	2.62%	241.15	3.35	1.39%	-66.57%
Belanja Transfer	8,913.72	5,017.77	56.29%	8,392.00	4,625.24	55.11%	-7.82%
Surplus/Defisit	-2,288.17	447.14	-19.54%	-1,716.50	6,989.19	-407.18%	1463.09%
Pembiayaan	2,405.03	1,332.75	55.42%	1,700.56	2,199.13	129.32%	65.01%
Penerimaan Pembiayaan	2,740.75	1,566.24	57.15%	1,858.60	2,272.53	122.27%	45.09%
Pengeluaran Pembiayaan	335.72	233.49	69.55%	158.04	73.39	46.44%	-68.57%
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		1,779.89			9,188.33		416.23%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren positif hingga akhir triwulan III TA 2025, dengan realisasi mencapai Rp32,27 triliun atau 66,42% dari target tahunan. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 21,35% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan terjadi pada seluruh jenis pendapatan daerah. Meskipun pendapatan masih didominasi oleh dana transfer, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan opsen pajak daerah dan restrukturisasi retribusi daerah mulai memberikan dampak terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah.

Grafik 2. 28 Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi per Jenis Pendapatan Daerah Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan kontribusi mencapai 78,95% dari total pendapatan hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer ini menjadikan kapasitas fiskal daerah sangat bergantung dan dipengaruhi oleh arah kebijakan fiskal nasional. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap ketersediaan kas daerah, yang pada akhirnya menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja dan menjalankan program pembangunan daerah secara optimal.

2.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

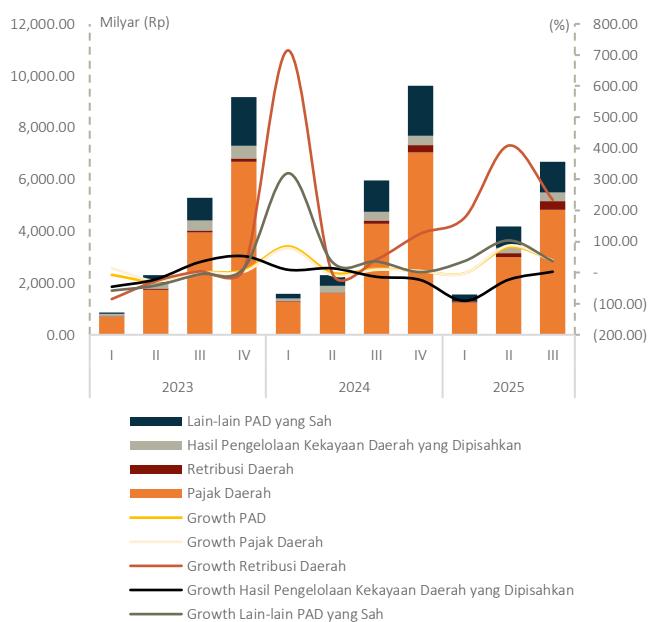
Menunjukkan pertumbuhan positif pada seluruh jenis pendapatan hingga Triwulan III TA 2025. Realisasi PAD tercatat sebesar Rp6,68 triliun atau 65,08% dari target tahunan, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 39,79% (yoy). Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 20,71%, menandakan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah. Kinerja ini didorong oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta didukung oleh membaiknya kondisi perekonomian di Sumatera Selatan.

Kebijakan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) turut mendorong pertumbuhan Pajak Daerah, khususnya melalui pengaturan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten/kota. Kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap kinerja Pajak Daerah di Sumatera Selatan, yang hingga Triwulan III Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp4,82 triliun atau 67,29% dari target tahunan. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 38,69% (yoy), dan menjadi indikasi awal bahwa perubahan kebijakan pajak daerah mulai menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Retribusi Daerah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga triwulan III TA 2025, dengan realisasi sebesar Rp325,58 miliar atau 50,81% dari target tahunan, tumbuh sebesar 234,02% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh penerimaan dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya layanan kesehatan. Selain itu, peningkatan retribusi juga dipengaruhi oleh kebijakan dalam Undang-Undang HKPD yang mereklasifikasi penerimaan dari layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi bagian dari retribusi daerah, sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Kebijakan ini turut memperkuat posisi retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.



Grafik 2. 29 Pertumbuhan Realisasi per Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

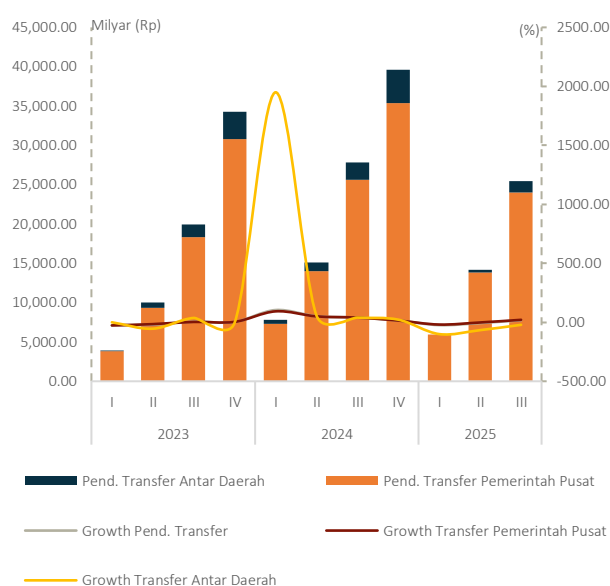
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan pertumbuhan positif hingga triwulan III TA 2025, dengan realisasi sebesar Rp343,02 miliar atau 81,93% dari target tahunan. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,73% (yoy), yang sebagian besar didorong oleh pencatatan dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menunjukkan pertumbuhan positif hingga triwulan III TA 2025, dengan realisasi sebesar Rp1,19 miliar atau 58,36% dari target tahunan, tumbuh sebesar 36,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan seperti Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lainnya, serta Pendapatan dari Pengembalian. Capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam pencatatan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang bersifat insidental namun sah secara regulasi.

2.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pertumbuhan pendapatan dari Dana Transfer hingga triwulan III TA 2025 didorong oleh kinerja positif pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Secara keseluruhan, Dana Transfer mengalami pertumbuhan sebesar 17,18% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp25,48 triliun atau 66,78% dari target tahunan. Dana Transfer tetap menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah, dengan kontribusi sebesar 78,95% terhadap total pendapatan. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah di Sumatera Selatan masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan Dana Transfer terutama berasal dari peningkatan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, yang tumbuh sebesar 20,86% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp23,98 triliun atau 67,64% dari target. Kontribusi utama pertumbuhan tersebut berasal dari dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Grafik 2. 30 Pertumbuhan Realisasi per Jenis Pendapatan dari Dana Transfer Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Kebijakan opsen pajak turut memengaruhi alokasi bagi hasil pajak daerah, khususnya dalam mekanisme pencatatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Sebelumnya, penerimaan dari pajak tersebut dibagi hasilkan kepada pemerintah kabupaten/kota, namun dengan adanya perubahan kebijakan, kini langsung dicatat sebagai pendapatan pajak daerah oleh pemerintah provinsi. Perubahan ini berdampak pada penurunan alokasi bagi hasil, yang tercermin dari realisasi Transfer Antar Daerah hingga Triwulan III TA 2025 sebesar Rp1,49 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2. 13 Kondisi Kemandirian Fiskal Pemda di Wilayah Sumatera Selatan Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025

Pemerintah Daerah	IKF	Kategori
Provinsi Sumatera Selatan	0.49	Menuju Kemandirian
Kab. Musi Banyuasin	0.12	Belum Mandiri
Kab. Ogan Komering Ulu	0.11	Belum Mandiri
Kab. Muara Enim	0.08	Belum Mandiri
Kab. Lahat	0.09	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas	0.08	Belum Mandiri
Kab. Ogan Komering Ilir	0.11	Belum Mandiri
Kab. Banyuasin	0.13	Belum Mandiri
Kab. OKU Timur	0.05	Belum Mandiri
Kab. OKU Selatan	0.04	Belum Mandiri
Kab. Ogan Ilir	0.08	Belum Mandiri
Kab. Empat Lawang	0.04	Belum Mandiri
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0.06	Belum Mandiri
Kab. Musi Rawas Utara	0.08	Belum Mandiri
Kota Palembang	0.39	Menuju Kemandirian
Kota Prabumulih	0.16	Belum Mandiri
Kota Pagar Alam	0.12	Belum Mandiri
Kota Lubuklinggau	0.16	Belum Mandiri

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)



Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Di Provinsi Sumatera Selatan, pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif rendah. Hingga September 2025, dari 18 pemerintah daerah, sebanyak 16 daerah masih berada dalam kategori “Belum Mandiri” atau berada pada rentang nilai sama dengan 0,00 hingga lebih kecil dari 0,25, sementara hanya dua daerah yang masuk kategori “Menuju Kemandirian” atau pada rentang nilai lebih besar sama dengan 0,25 hingga lebih kecil dari 0,50, yaitu Kota Palembang dengan indeks 0,39 dan Provinsi Sumatera Selatan dengan indeks 0,49.

Ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer, khususnya dari Pemerintah Pusat, menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya kuat. Pemerintah Pusat telah mengupayakan peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah pengenaan opsen pajak daerah. Namun, penerapan kebijakan tersebut pada tahun 2025 belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan IKF daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan kebijakan sejauh ini lebih bersifat administratif dalam hal pencatatan, dan belum sepenuhnya mendorong peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan secara lebih optimal.

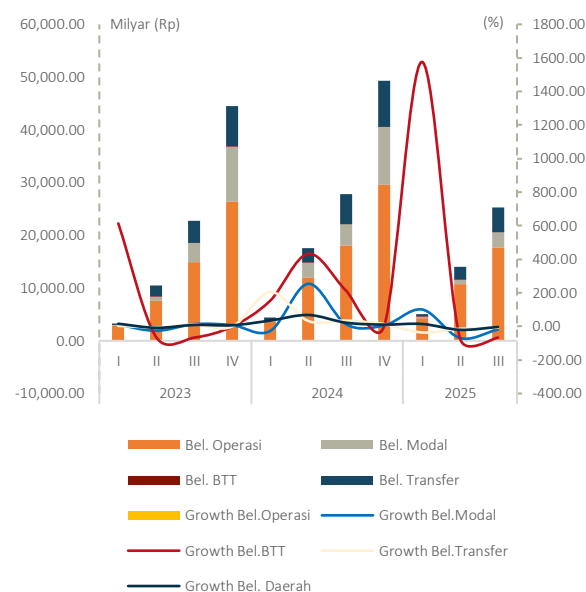
2.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDys)

Lain-lain Pendapatan Daerah mengalami kontraksi di triwulan III TA 2025. Realisasi lain-lain pendapatan daerah pada Triwulan III TA 2025 tercatat sebesar Rp109,49 miliar, atau 68,95% dari target tahunan. Kontribusinya terhadap total pendapatan daerah sangat kecil, yaitu hanya 0,34%, dan mengalami pertumbuhan sebesar 59,32% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh realisasi lain-lain pendapatan daerah pada periode ini berasal dari komponen Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga Triwulan III TA 2025 menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga akhir September 2025, realisasi belanja tercatat sebesar Rp25,28 triliun atau 50,26% dari total pagu APBD, dengan kontraksi tahunan sebesar -3,31% (yoy). Penurunan ini terjadi pada hampir seluruh jenis belanja, kecuali belanja operasi yang justru mencatat pertumbuhan, sebagaimana tergambar dalam Grafik 2.26 berikut.

Grafik 2. 31 Pertumbuhan Realisasi per Jenis Belanja Daerah Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)



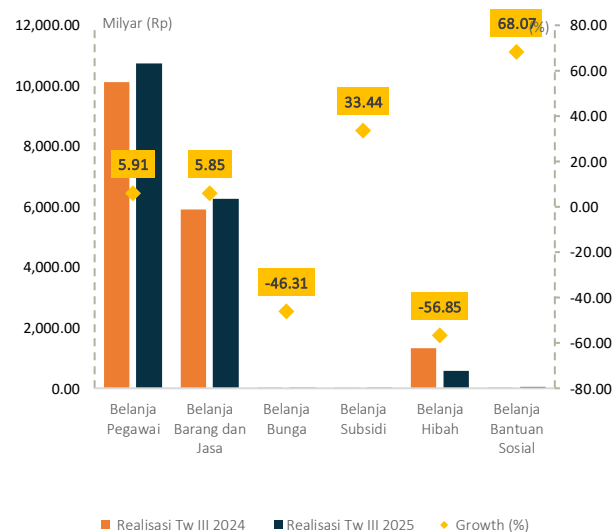
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Operasi

Belanja operasi tetap menjadi komponen dominan dalam struktur belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan III TA 2025. Realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp17,64 triliun atau 54,66% dari pagu, dengan kontribusi mencapai 69,78% terhadap total belanja daerah. Secara tahunan, belanja operasi mengalami pertumbuhan sebesar 1,17% (yoy), didorong oleh peningkatan pada beberapa pos utama, yaitu belanja pegawai yang tumbuh 5,91% (yoy), belanja barang dan jasa sebesar 5,85% (yoy), belanja subsidi sebesar 33,44% (yoy), serta belanja bantuan sosial yang mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 68,07% (yoy).

Grafik 2. 32 Pertumbuhan Realisasi per Jenis Belanja Operasi Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2025 (c-to-c)





Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Belanja Pegawai

Belanja pegawai mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,91% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp 10,73 triliun atau 60,16% dari pagu. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS daerah, termasuk anggota dan pimpinan DPRD, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025. Selain itu, realisasi belanja pegawai untuk program Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya turut mendorong pertumbuhan jenis belanja ini.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tumbuh sebesar 5,85% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp6,26 triliun atau 48,75% dari pagu. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh belanja barang untuk pelayanan masyarakat, seperti Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas serta Belanja Barang dan Jasa BLUD. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa perkantoran juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan jenis belanja ini.

Belanja Bunga

Belanja Bunga mengalami penurunan tajam sebesar -46,31% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp12,27 miliar atau 56,74% dari pagu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembayaran bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, serta pembayaran bunga pinjaman dari pemerintah pusat.

Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tumbuh sebesar 33,44% (yoy) dengan realisasi mencapai Rp14,94 miliar atau 41,68% dari pagu. Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta, antara lain subsidi transportasi untuk kendaraan *Feeder* LRT, subsidi bunga pinjaman UMKM melalui koperasi, serta subsidi lainnya yang diberikan sebagai upaya pengendalian pasokan dan harga komoditas.

Belanja Hibah

Belanja Hibah mengalami kontraksi sebesar -56,85% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp573,15 miliar atau 40,65% dari pagu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat serta kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial mencatat pertumbuhan yang sangat positif sebesar 68,07% (yoy), dengan realisasi mencapai Rp51,52 miliar atau 38,82% dari pagu. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, khususnya belanja sosial kepada individu yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Belanja Modal

Belanja Modal mengalami kontraksi s.d triwulan III TA 2025. Belanja modal menunjukkan perlambatan dengan realisasi sebesar Rp3,01 triliun atau 32,08% dari pagu. Secara yoy, belanja modal terkontraksi 18,16% (yoy) dan berkontribusi sebesar 11,91% dari seluruh realisasi belanja daerah. Perlambatan realisasi belanja modal diindikasikan oleh realisasi

belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pemda lingkup Sumsel lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga mencapai Rp3,35 miliar atau 1,39% dari pagu, dengan kontraksi sebesar -66,57% (yoy). Realisasi belanja ini terjadi di beberapa daerah, seperti Pemprov. Sumatera Selatan, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Muara enim, Kab. OKU Selatan, Kab. Ogan Ilir, Kab. Empat lawang, Kab. PALI, Kota Prabumulih, Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau. Realisasi belanja tidak terduga dilakukan untuk pengeluaran yang tidak berulang seperti penanganan bencana alam, pengembalian kelebihan penerimaan atas tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer

Belanja Transfer terkontraksi di triwulan III 2025. Realisasi belanja transfer sebesar Rp4,62 triliun atau 55,11% dari pagu APBD. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi belanja transfer terkontraksi sebesar -7,82% (yoy) dikontribusi oleh realisasi belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan opsen pajak menjadi indikasi berkurangnya alokasi belanja bagi hasil pajak daerah dari Pemprov ke Kab/Kota di Sumsel.

2.2.3 Surplus/Defisit APBD

APBD Sumatera Selatan mencatatkan surplus pada triwulan III TA 2025 sebesar Rp6,98 triliun, berbalik dari posisi defisit Rp447,14 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Surplus ini mencerminkan pengendalian belanja yang relatif efektif di tengah kebijakan efisiensi, sementara sisi penerimaan menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan pada seluruh jenis pendapatan daerah. Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengekspansi belanja. Namun, dengan realisasi belanja baru mencapai sekitar 50% dari pagu, terdapat potensi meningkatnya SiLPA di akhir tahun jika percepatan tidak dilakukan.

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sisa waktu anggaran di triwulan IV TA 2025 untuk mendorong kinerja belanja daerah, khususnya belanja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti Belanja Modal yang baru terealisasi sekitar 30%.

2.2.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah mencatat pertumbuhan signifikan pada Triwulan III TA 2025, dengan nilai sebesar Rp2,19 triliun atau 129,32% dari pagu APBD. Secara tahunan, pembiayaan daerah tumbuh 65,01% (yoy). Dari sisi Penerimaan pembiayaan mencapai Rp2,27 triliun, terutama berasal dari penggunaan SiLPA tahun-tahun sebelumnya, yang tumbuh 45,09% (yoy). Hal ini mengindikasikan pemanfaatan SiLPA untuk mendanai kegiatan yang menjadi utang belanja tahun sebelumnya serta program yang telah direncanakan namun belum memperoleh pendanaan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tercatat Rp73,39 miliar dan terkontraksi -68,57% (yoy), yang dikontribusikan oleh penurunan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri.

2.2.5 Proyeksi APBD

Proyeksi realisasi pendapatan daerah Sumatera Selatan pada akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 95,50% dari target. Penerimaan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan terealisasi sebesar



99,82% dari target, didorong oleh pertumbuhan positif pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Transfer diperkirakan mencapai 94,40% dari target, seiring penyaluran Transfer ke Daerah hingga akhir tahun anggaran. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah diperkirakan hanya mencapai sekitar 80,00% dari target.

Di sisi proyeksi belanja, realisasi akhir tahun mencapai 81,92%, indikasi perlu dilakukan percepatan belanja. Belanja Operasi diperkirakan terealisasi sebesar 77,40% didorong oleh realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial. Belanja Modal diperkirakan terealisasi sebesar 90,56%, melihat alokasi pagu belanja modal tidak sebesar tahun sebelumnya dan adanya dana yang tersedia dari pendapatan daerah. Belanja Tidak Terduga diperkirakan akan terealisasi sebesar 12,25% dari pagu dan Belanja Transfer diperkirakan terealisasi sebesar 94,73% dari pagu didorong oleh realisasi bantuan keuangan kabupaten/kota kepada pemda (ADD).

Proyeksi akhir tahun anggaran 2025 menunjukkan surplus/defisit sebesar -237,70%, yang mengindikasikan bahwa APBD direncanakan defisit namun dalam pelaksanaannya terjadi surplus. Surplus yang cukup besar ini berpotensi menjadi perhatian pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja daerah. Kondisi tersebut menekankan perlunya optimalisasi realisasi belanja agar tidak menimbulkan SiLPA yang tinggi di akhir tahun.

Tabel 2. 14 Proyeksi Realisasi APBD Lingkup Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2025

I-Account	%Q1 (Real)	%Q2 (Real)	%Q3 (Real)	%Q4 (Proy)
Pendapatan Daerah	15.44%	26.48%	66.42%	95.50%
Pendapatan Asli Daerah	15.11%	40.81%	65.08%	99.82%
Pendapatan dari Dana Transfer	15.55%	37.13%	66.78%	94.40%
Lain-Lain Pendapatan Daerah	10.72%	43.21%	68.95%	80.0%
Belanja Daerah	10.02%	27.78%	50.26%	81.92%
Belanja Operasi	13.44%	33.40%	54.66%	77.44%
Belanja Modal	2.55%	9.28%	32.08%	90.56%
Belanja Tidak Terduga	15.57%	1.04%	1.39%	12.25%
Belanja Transfer	5.06%	27.63%	55.11%	94.73%
Surplus/(Defisit)	-143.18%	64.66%	-407%	237.70%
Pembiayaan Daerah	13.96%	76.41%	138%	160.57%
Penerimaan Pembiayaan Daerah	13.64%	67.33%	122.3%	137.97%
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.26%	30.45%	46.4%	97.60%

Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

2.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. LRA Pemerintah Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dilakukan eliminasi akun-akun

resiprokal. Dalam hal ini eliminasi dilakukan terhadap belanja transfer ke daerah dari sisi LRA pemerintah pusat di eliminasi dengan pendapatan transfer dari sisi LRA pemerintah daerah.

2.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan konsolidasian wilayah Sumsel sampai dengan triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp18,09 triliun atau terkontraksi sebesar 19,59% (yoy). Pendapatan Konsolidasian masih didominasi Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp11,02 triliun atau 60,97% dari total pendapatan konsolidasian. Pada aspek pendapatan yang bersumber dari perpajakan, Pemerintah Pusat masih mendominasi dengan porsi 64,96% dari total pendapatan perpajakan konsolidasian. Penurunan Pendapatan konsolidasian s.d. Triwulan III Tahun 2025 tersebut mayoritas terdapat pada penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian yang turun hingga 31,95% yoy. Angka PNPB pada pemerintah daerah dan Belanja Transfer pada pemerintah pusat merupakan angka setelah dilakukan eliminasi akun resiprokal antara pendapatan transfer pemda dan belanja transfer pempus. Hal ini mengindikasikan peran dana transfer sangat mendominasi sebagai sumber pendapatan daerah di Sumsel. Sementara itu, di sisi Pendapatan hibah konsolidasi menunjukkan kontraksi sebesar 58,17% (yoy) dibandingkan pendapatan hibah pada triwulan III tahun 2024 sebesar Rp7,60 miliar rupiah

2.3.2 Belanja Konsolidasian

Belanja konsolidasian wilayah Sumsel hingga triwulan III tahun 2025 sebesar 34,44 triliun dan terkontraksi sebesar 10,36% (yoy). Belanja Konsolidasian terdiri atas Belanja Pemerintah Konsolidasian Rp29,43 triliun atau 85,47% dari keseluruhan Belanja Konsolidasian dan Transfer sebesar Rp5,01 triliun atau 14,53% dari keseluruhan Belanja Konsolidasian. Dari sisi belanja dan transfer, kontribusi dari belanja pemerintah daerah lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat hingga periode triwulan III 2025. Pemerintah daerah berkontribusi sebesar 69,08% sementara Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 30,92% dalam menggerakkan aktivitas perekonomian melalui kebijakan fiskal di Sumsel. Belanja pegawai masih mendominasi belanja s.d. triwulan III tahun 2025 dengan proporsi sebesar 53,13% dari keseluruhan belanja pemerintah konsolidasian.

2.3.3 Surplus/Defisit

Hingga triwulan III tahun 2025, defisit konsolidasian sebesar Rp16,35 triliun terkontraksi 2,68% (yoy). Defisit dikontribusi oleh pemerintah daerah sebesar Rp16,73 triliun dan di sisi lain pemerintah pusat mengalami Surplus sebesar Rp0,38 triliun. Hal tersebut didorong oleh tingginya belanja pemerintah pada pemerintah daerah yang tidak diikuti peningkatan dari sisi Pendapatan s.d. triwulan III 2025.

2.3.4 Pembiayaan Konsolidasian

Pembiayaan konsolidasian di wilayah Sumsel sebesar Rp2,2 triliun, meningkat hingga 18,89% (yoy). Realisasi penerimaan pembiayaan Rp2,27 triliun atau naik hingga 10,62% (yoy) dan pengeluaran pembiayaan Rp0,07 triliun atau terkontraksi sebesar 64,16% (yoy). Pembiayaan konsolidasian seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah yang berasal dari penggunaan SiLPA di sisi penerimaan dan pembayaran pokok utang dan penyertaan modal di sisi pengeluaran.

Tabel 2. 15 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Sumatera Selatan s.d. Triwulan III 2024-2025 (c-to-c)

I-Account (dalam Miliar Rupiah)		2024	2025				Growth 2024-2025	
		Konsolidasian	Konsolidasian	Pusat	Daerah	Kontribusi		
						Pusat		Daerah
A.	PENDAPATAN	22.493,10	18.087,32	11.027,55	7.059,77	60,97%	39,03%	-19,59%
I.	Perpajakan	16.136,92	13.763,67	8.941,55	4.822,12	64,96%	35,04%	-14,71%
II.	PNBP	6.348,58	4.320,47	2.086,00	2.234,47	48,28%	51,72%	-31,95%
III.	Hibah	7,60	3,18	0.00	3,18	0,00%	100,00%	-58,17%
B.	BELANJA	38.419,40	34.440,45	10.648,33	23.792,13	30,92%	69,08%	-10,36%
I.	Belanja Pemerintah	34.560,91	29.434,78	8.777,88	20.656,89	29,82%	70,18%	-14,83%
II.	Transfer	3.858,48	5.005,68	1.870,44	3.135,23	37,37%	62,63%	29,73%
C.	SURPLUS/DEFISIT	-15.926,30	-16.353,13	379,22	-16.732,36	-2,32%	102,32%	2,68%
D.	PEMBIAYAAN	1.849,65	2.199,13	0.00	2.199,13	0,00%	100,00%	18,89%
I.	Penerimaan	2.054,42	2.272,53	0.00	2.272,53	0,00%	100,00%	10,62%
II.	Pengeluaran	204,76	73,39	0.00	73,39	0,00%	100,00%	-64,16%
E.	SILPA (SIKPA)	-14.076,64	-14.154,00	379,22	-14.533,23	-2,68%	102,68%	0,55%

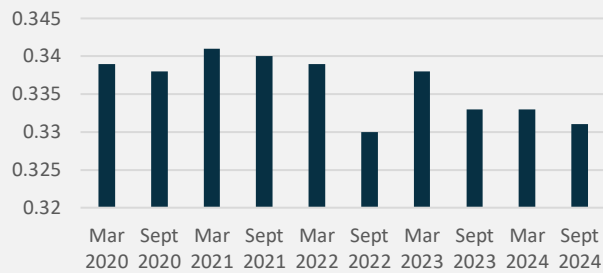
Sumber: Kanwil DJPb Sumsel (diolah)

Boks 2

Disparitas Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan

Daffa Kumara (Universitas Brawijaya)

Latar Belakang: Ketimpangan wilayah

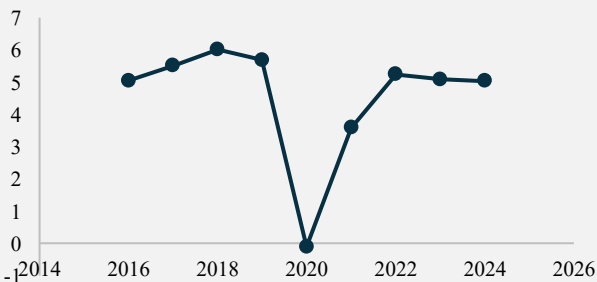


Sumber: BPS (2025)

Ketimpangan wilayah di Sumatera Selatan merupakan permasalahan struktural yang tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi antar individu, tetapi juga antarwilayah kabupaten dan kota. Salah satu indikator resmi yang digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah Indeks Gini (Gini Ratio), yang secara rutin dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap dua kali setahun, yaitu pada periode Maret dan September. Indeks ini menggambarkan distribusi pengeluaran per kapita rumah tangga, dengan nilai antara 0 (pemerataan sempurna) dan 1 (ketimpangan absolut).

Dalam lima tahun terakhir, Gini Ratio Sumatera Selatan cenderung stagnan pada level 0,33 hingga 0,34, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum disertai dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara optimal. Misalnya, data BPS menunjukkan nilai Gini 0,339 pada Maret 2020, turun menjadi 0,331 pada September 2024. Penurunan sebesar 0,008 selama empat tahun tersebut terlihat positif secara numerik, namun secara substantif menunjukkan perubahan yang sangat lambat. Artinya, distribusi pendapatan antar masyarakat masih mengalami ketimpangan moderat, dan ini menjadi bukti bahwa transformasi pembangunan belum sepenuhnya inklusif.

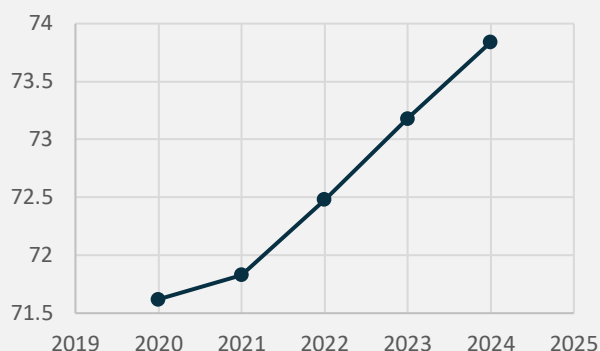
Pertumbuhan PDRB



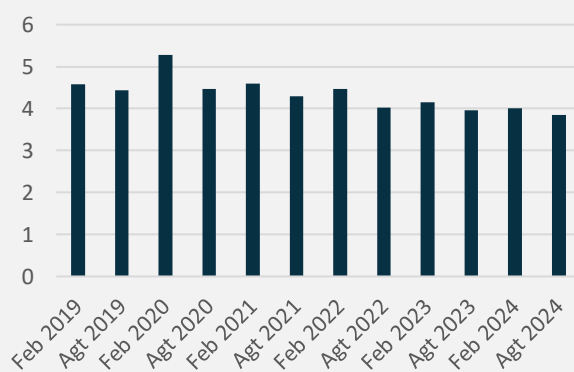
Sumber: BPS (2025)



Indeks Pembangunan Manusia



Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: BPS (2025)

Di sisi lain, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,62 menjadi 73,84 dalam periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Namun, seperti ditegaskan oleh Todaro dan Smith (2012), pertumbuhan agregat IPM belum menjamin tercapainya pemerataan kesejahteraan, terutama jika peningkatan tersebut terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Akses terbatas terhadap layanan dasar di daerah tertinggal membuat peningkatan IPM tidak serta merta berkontribusi pada penurunan Gini Ratio secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan spasial dalam pembangunan manusia, sejalan dengan temuan Myrdal (1957) bahwa backwash effect dari wilayah maju dapat memperlebar jurang kesenjangan.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,28% menjadi 3,85% juga mencerminkan pemulihan pasar kerja, namun belum cukup menyelesaikan masalah struktural ketenagakerjaan. Sebagian besar penyerapan tenaga kerja terjadi di sektor informal dengan kualitas kerja rendah dan tanpa jaminan sosial. Sjafrizal (2018) menekankan bahwa pengangguran terbuka, terutama di daerah pedesaan dan kalangan muda, menjadi indikator penting ketimpangan ekonomi karena mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. Oleh karena itu, penggunaan variabel IPM dan TPT dalam mengkaji ketimpangan melalui pendekatan Gini Ratio dan konvergensi ekonomi menjadi relevan untuk memahami secara lebih komprehensif penyebab dan arah pergeseran disparitas antarwilayah di Sumatera Selatan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan

Meskipun pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan menunjukkan tren positif pasca-pandemi, tingkat ketimpangan wilayah relatif tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan temuan Myrdal (1957) terkait dominasi backwash effect, di mana kemajuan wilayah pusat menarik sumber daya dari daerah pinggiran tanpa memberikan efek sebaran yang cukup. Fenomena ini juga diperkuat oleh argumen Todaro dan Smith (2012), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak akan memperdalam kesenjangan.

Fenomena stagnasi ketimpangan ini selaras dengan pandangan Myrdal (1957) melalui konsep backwash effect, di mana pertumbuhan di wilayah maju justru menarik sumber daya dari wilayah tertinggal, memperkuat polarisasi ekonomi regional. Hal ini terjadi ketika pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Kota Palembang, mengalami ekspansi ekonomi yang signifikan, sementara kabupaten-kabupaten hinterland tetap stagnan atau tumbuh sangat lambat. Sjafrizal (2018) juga menegaskan bahwa perbedaan dalam kapasitas fiskal, ketersediaan infrastruktur, dan konsentrasi investasi menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah semakin melebar, bahkan ketika indikator makroekonomi secara agregat menunjukkan pertumbuhan. Selain itu, menurut Todaro dan Smith (2012), distribusi hasil pembangunan yang timpang tidak hanya menghambat pemerataan kesejahteraan, tetapi juga berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, stagnansi Gini Ratio di Sumatera Selatan bukan sekadar masalah statistik, melainkan cerminan dari struktur ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif dan responsif terhadap disparitas spasial.

Struktur dan dinamika PDRB Sumatera Selatan turut menjelaskan akar dari ketimpangan ini. Pertumbuhan ekonomi provinsi menunjukkan tren pemulihan pasca-pandemi, dari -0,11% pada 2020 menjadi 5,03% pada 2024. Namun, kontribusi sektoral masih didominasi oleh sektor ekstraktif seperti pertambangan (24,6%) dan industri pengolahan (18,3%), yang cenderung padat modal dan terpusat pada wilayah tertentu. Sektor-sektor ini tidak menciptakan pemerataan karena efek penggandanya lemah terhadap daerah hinterland. Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi tumpuan masyarakat pedesaan masih tumbuh lambat dan belum mengalami transformasi struktural, sehingga kontribusinya terhadap pengurangan ketimpangan relatif terbatas.



Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Ketimpangan wilayah diukur menggunakan Gini Ratio sebagai variabel dependen, sementara data panel dihimpun dari kabupaten/kota di Sumatera Selatan selama periode 2020 hingga 2024. Model estimasi menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS).

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), ketiga variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM, dan TPT tidak signifikan terhadap Gini Ratio pada tingkat kepercayaan 95%, dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,4612; 0,8428; dan 0,5940. Meskipun tidak signifikan, seluruh koefisien regresi menunjukkan arah negatif, yakni pertumbuhan ekonomi (-0,0004), IPM (-0,0005), dan TPT (-0,0007), yang secara teori mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta penurunan pengangguran berpotensi menurunkan ketimpangan. Nilai R-squared sebesar 0,6735 menunjukkan bahwa 67,35% variasi ketimpangan dapat dijelaskan oleh model, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

Temuan ini memperkuat argumentasi Myrdal (1957) tentang backwash effect, di mana pertumbuhan di pusat-pusat ekonomi menarik sumber daya dari daerah pinggiran tanpa efek pemerataan yang memadai. Selain itu, sesuai dengan pandangan Todaro dan Smith (2012), pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak cenderung memperparah ketimpangan. Dalam konteks ini, meskipun pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pasca-pandemi menunjukkan tren positif, hasil estimasi mengindikasikan bahwa perbaikan indikator makro belum cukup untuk mengurangi ketimpangan wilayah secara substansial. Oleh karena itu, intervensi pembangunan yang bersifat struktural dan berorientasi pemerataan tetap menjadi urgensi utama.

Penelitian ini menyarankan agar pengukuran ketimpangan wilayah di masa depan dilakukan dengan data panel yang lebih panjang secara waktu dan lebih kaya secara spasial. Pendekatan spasial-ekonometrik dapat digunakan untuk menangkap pengaruh wilayah sekitar dan efek interdependensi antar kabupaten/kota. Selain itu, memasukkan variabel lain seperti belanja publik, akses infrastruktur, atau kualitas institusi lokal juga akan memperkaya analisis dan memperkuat validitas hasil. Pemerintah daerah diharapkan menggunakan indikator ketimpangan sebagai bagian integral dalam evaluasi kebijakan pembangunan, bukan sekadar indikator tambahan.



BAB III

Analisis Tematik



Dalam rangka mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah mencanangkan beberapa program strategis nasional diantaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Atas program strategis nasional tersebut terus dilakukan upaya percepatan dan perbaikan kebijakan agar pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

- Perkembangan MBG di Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada semua kabupaten/kota. Hingga akhir September 2025 tercatat ada 335 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dari target 969 SPPG (34,57%) dan 1.003.551 penerima manfaat dari target 2.047.861 orang (49%). Kinerja ekonomi Sumsel yang positif pada triwulan III 2025, mengindikasikan bahwa program MBG memberikan kontribusi dalam mendorong kinerja ekonomi. Masih terdapat kendala yaitu isu kualitas makanan yang disajikan, dimana di Kota Palembang dilaporkan beberapa orang mengalami kejadian dugaan keracunan. Atas kendala tersebut diperlukan sinergitas dan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk mengatasinya.
- Pasca terbentuknya 3.258 KDKMP di Sumsel, pada saat ini terdapat 363 koperasi (11,14%) yang memiliki kantor, 225 koperasi (6,90%) yang telah beroperasi, dan 1.994 koperasi (61,20%) yang telah memiliki modal sendiri. Kementerian Koperasi telah melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi pendamping dan pengurus dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kualitas SDM KDKMP dengan materi antara lain hubungan Industrial, Pancasila, tata kelola koperasi, digitalisasi, model bisnis koperasi modern, pembukuan, serta pengembangan inovasi desa.
- Pemerintah mempercepat realisasi infrastruktur berupa pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapan KDKMP dengan menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara. Kementerian Keuangan merancang skema pembiayaannya dengan mekanisme pemotongan dana transfer daerah (DAU/DBH) dan Dana Desa sebagai jaminan pembayaran.
- Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan KDKMP di antaranya adalah tata kelola, literasi, kolaborasi, regulasi, digitalisasi. Adapun strategi pengoperasian yang dapat dilakukan atas tantangan tersebut adalah pembinaan dan pendampingan, agregasi potensi ekonomi lokal, optimalisasi bonus demografi, transformasi digital, sinergi lintas sektoral.



3.1. Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

3.1.1. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang bertujuan ganda, yaitu untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui penyediaan akses makanan bergizi bagi kelompok rentan (anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sekaligus berfungsi sebagai penggerak ekonomi regional. Program ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting dan gizi buruk akibat ketidakmampuan masyarakat miskin mengakses gizi seimbang. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kontribusinya dalam memotong rantai kemiskinan dan mendorong perekonomian lokal melalui keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3.1.2. Perkembangan Pelaksanaan Program MBG di Sumatera Selatan

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, bersama seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayah kerjanya, berperan krusial sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Peran ini mencakup monitoring dan evaluasi aktif dilapangan termasuk kunjungan ke SPPG di berbagai kabupaten/kota seperti Palembang, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas Utara serta penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengidentifikasi perkembangan dan kendala pelaksanaan.

Secara nasional, implementasi Program MBG dimulai pada 6 Januari 2025. Hingga akhir triwulan II, Kanwil DJPb mencatat bahwa dari 17 Kabupaten/Kota di Sumsel, hanya Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan yang belum melaksanakan program MBG. Data lapangan juga mengindikasikan adanya perbaikan kualitas layanan yang berkelanjutan, meliputi higienitas dapur, penyusunan menu, hingga dokumentasi pelaporan.

Kesenjangan implementasi regional yang teridentifikasi pada triwulan II, di mana Kabupaten OKU Selatan menjadi satu-satunya wilayah yang belum aktif, telah menunjukkan pergerakan signifikan pada triwulan III. Perkembangan ini merupakan tonggak penting dalam pencapaian ekuitas jangkauan program di seluruh wilayah Sumsel. Pada 28 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan melalui Sekretaris Daerah memimpin rapat koordinasi untuk membahas tugas pembangunan MBG. Rapat ini menandai dimulainya proses administrasi dan operasional untuk memenuhi ketentuan dari pemerintah pusat. Tindak lanjut dari koordinasi ini menunjukkan hasil konkret, di mana OKU Selatan menargetkan sebanyak 42.000 siswa akan menerima manfaat MBG. Meskipun sosialisasi program kepada 42 ribu siswa baru dilakukan pada Oktober 2025 (pasca Q3), komitmen dan koordinasi yang dilakukan di triwulan III memastikan bahwa seluruh 17 Kabupaten/Kota di Sumsel telah bergerak menuju implementasi penuh. Hal ini menunjukkan komitmen Pemda Sumsel dalam menyukseskan program prioritas nasional, meskipun tantangan logistik dan operasional yang terkait dengan pengaktifan SPPG di daerah terpencil masih harus terus diawasi.

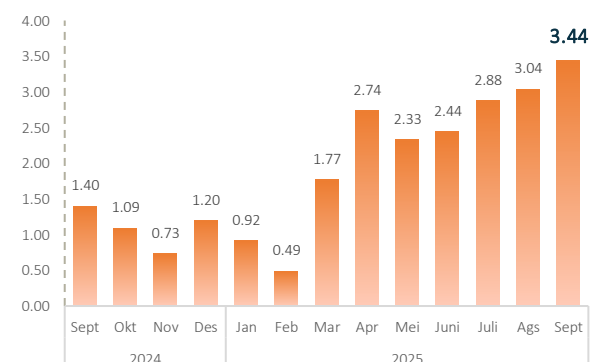
Hingga akhir September 2025 (triwulan III), tercatat 335 SPPG aktif dari target 969 SPPG (34,57%) dan 1.003.551 penerima manfaat dari target 2.047.861 orang (49%).

3.1.3. Dampak MBG Terhadap Keseimbangan Perekonomian Regional

Kinerja ekonomi Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang positif. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumsel tercatat mencapai 5,20% (yoy), yang merupakan capaian tertinggi kedua di Pulau Sumatera dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,04%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa program MBG secara umum memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong kinerja ekonomi pada periode tersebut. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan permintaan agregat yang dihasilkan dari program MBG, melalui keterlibatan UMKM dan pembelian bahan baku lokal, secara langsung menambah likuiditas ke dalam rantai pasokan daerah, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan PDRB. Stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan merupakan faktor kritical dalam keberlanjutan MBG. Data menunjukkan bahwa inflasi tahunan (yoy) Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan sepanjang Triwulan III tahun 2025.

Grafik 3. 1 Rekapitulasi Inflasi Tahunan (yoy) Provinsi Sumatera Selatan, September 2024 s.d. September 2025



Sumber : BPS Sumsel

Meskipun angka inflasi Sumsel masih dalam rentang sasaran target inflasi dan penyumbang terbesar di triwulan II didominasi oleh kelompok non-makanan seperti emas perhiasan, tren kenaikan triwulan III (mencapai 3,44% pada September) perlu dicermati. Pada triwulan I, komoditas bahan makanan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih, adalah komoditas utama penyumbang inflasi. Ekspansi program MBG secara masif akan meningkatkan permintaan agregat terhadap bahan pangan. Walaupun pasokan beras di Sumsel, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, masih terjaga, peningkatan permintaan untuk komoditas hortikultura dan protein hewani harus dikoordinasikan dengan baik. Jika tidak, permintaan besar dari MBG berpotensi menimbulkan tekanan inflasi tambahan pada kelompok makanan di kuartal IV. Oleh karena itu, koordinasi antara BGN/SPPG dengan petani lokal harus diarahkan untuk menjamin pasokan stabil tanpa mengganggu keseimbangan harga pasar.

Tabel 3. 1 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi y-on-y Sep 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y Sep 2025 (%)
Umum (Headline)	3,44	3,44
Makanan, Minuman, dan Tembakau	6,11	1,85
Pakaian dan Alas Kaki	-0,07	0
Perumahan Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rutin Rumah Tangga	1,1	0,15
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,22	0,01
Kesehatan	1,11	0,03
Transportasi	0,46	0,06
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,41	-0,02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,32	0,02
Pendidikan	0,87	0,05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,28	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,67	1,18

Sumber : BPS Sumsel

Program MBG memiliki dampak positif yang signifikan dan terukur terhadap kesejahteraan petani di Sumatera Selatan. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang mengukur daya beli petani, di mana nilai di atas 100 menunjukkan bahwa Indeks Harga yang Diterima Petani (hasil produksi) lebih tinggi daripada Indeks Harga yang Dibayar Petani (biaya konsumsi dan produksi). Perkembangan NTP Sumsel pada Triwulan III menunjukkan pemulihan dan lonjakan signifikan:

Tabel 3. 2 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Provinsi Sumatera Selatan

NTP Subsektor	Agu-25	Sep-25	Perubahan (%)
Tanaman Pangan (NTPP)	102,61	102,78	0,16
Hortikultura (NTPH)	94,12	95,74	1,72
Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)	130,76	138,52	5,94
Peternakan (NTPT)	101,75	102,8	2,04
Perikanan (NTNP)	104,72	104,86	0,14
Nelayan (NTN)	114,58	115,13	0,48
Pembudidaya ikan (NTPi)	91,92	91,55	-0,4
NTP	112,19	127,77	4,57

Sumber : BPS Sumsel

NTP Gabungan Sumsel mencapai titik tertinggi 127,77 pada September 2025, meningkat tajam setelah sempat menurun di Juli (120,50) dan naik tipis di Agustus (122,19). Kenaikan ini didorong oleh kenaikan NTP pada hampir semua subsektor, terutama tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perikanan tangkap. Komoditas seperti karet, kopi biji kering, kelapa sawit, cabai merah, jagung, dan cabai rawit menjadi penyumbang utama kenaikan NTP September.

Fenomena ini memperkuat validasi studi terdahulu yang menunjukkan bahwa pelibatan UMKM dan petani lokal dalam penyediaan MBG dapat memberikan *multiplier effect* dengan meningkatkan produksi dan membuka lapangan kerja baru. Kenaikan substansial NTP di Q3 membuktikan bahwa peningkatan permintaan yang dimotori oleh MBG telah berhasil meningkatkan pendapatan petani (harga yang diterima) melebihi kenaikan biaya yang mereka keluarkan, sehingga tercapai perbaikan tingkat kesejahteraan.

3.1.4. Evaluasi Kualitas Layanan MBG

Isu paling kritis yang mengancam kredibilitas MBG di Sumsel adalah masalah kualitas dan keamanan pangan. Meskipun pada akhir triwulan II telah direkomendasikan perbaikan menyeluruh terkait pemilihan bahan baku, waktu pemasakan, pengiriman yang efisien, dan uji kelayakan, insiden keracunan kembali terulang pada triwulan III. Pada 5 Mei 2025 (Q2), 174 siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan MBG, yang menyebabkan penghentian sementara program di wilayah tersebut. Insiden serupa kembali terjadi pada 25 September 2025 di Kota Palembang, di mana 12 orang di SPPG Kalidoni dilaporkan mengalami gejala keracunan.

Pengulangan insiden pada triwulan III mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam rantai pengawasan, yang seperti masalah pemilihan bahan baku. Isu ini kemungkinan besar terletak pada proses kontrol operasional di dapur SPPG, termasuk higienitas, penanganan makanan pasca-masak, dan waktu tunggu sebelum makanan didistribusikan. Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mengakui tantangan besar dalam logistik dan jaminan standar keamanan pangan, terutama di daerah terpencil. Kanwil DJPb menyimpulkan bahwa pengawasan yang lebih ketat, penggunaan tenaga kerja profesional, dan penekanan pada kualitas/kebersihan bahan baku oleh SPPG yang direkomendasikan sebelumnya belum sepenuhnya diimplementasikan atau ditaati.

Selain isu keamanan pangan, tantangan logistik, terutama dalam menjamin ketersediaan dapur di daerah terpencil dan menjaga standar kualitas, tetap menjadi hambatan operasional. Tantangan ini akan semakin terasa seiring perluasan program ke daerah-daerah seperti OKU Selatan. Namun, evaluasi lapangan oleh Kanwil DJPb dan KPPN juga menunjukkan adanya inovasi positif di tingkat lokal. Beberapa SPPG telah menunjukkan inisiatif dengan mengembangkan dashboard harga bahan pangan dan menerapkan sistem shift kerja dapur. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjamin kelancaran rantai pasok. Model adaptasi lokal seperti ini harus didorong dan direplikasi, terutama di wilayah yang baru memulai program, untuk mengatasi tantangan operasional dan logistik secara efektif.

3.2. Analisis atas Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

3.2.1. Pendahuluan

Menuju Indonesia Emas tahun 2045, Presiden Prabowo Subianto menggelorakan visi, arah, dan strategi yang disebut dengan Asta Cita. Salah satu tujuan Asta Cita yang keenam adalah "Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan". Pernyataan dalam Asta Cita tersebut menggambarkan bahwa pemerintah fokus dalam menggerakkan ekonomi lokal

berbasis kerakyatan di wilayah pedesaan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi gap/kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa dan kota, serta meningkatkan kesejahteraan di lingkup pedesaan. Pemerintah menerapkan KDKMP sebagai instrument utama dalam rangka mewujudkan visi, arah, dan strategi Asta Cita adalah melalui konsep Koperasi Merah Putih di tingkat desa/kelurahan. Koperasi Merah Putih merupakan salah satu dari strategi nasional yang langsung menggerakkan level ekonomi masyarakat desa.

Perkoperasian di Indonesia secara tidak langsung merupakan imbas dari gerakan di Inggris Raya. Pada abad ke-18, kesenjangan pasar akibat kapitalisme liberal sebagai akibat dari revolusi industri mendorong munculnya model koperasi sebagai perlindungan terhadap eksploitasi kaum buruh. Robert Owen, William King, hingga Pioneer Rochdale mempelopori terbentuknya koperasi Rochdale. Di Indonesia, konsep koperasi dimulai pada tanggal 16 Desember 1886, ketika R. Aria Wiraatmadja, seorang Patih Purwokerto, mendirikan Hulp en Spaarbank. Lembaga dengan prototipe koperasi kredit Reiffeisen memiliki tujuan untuk menolong kaum priyayi dari cengkaman lintah darat.

Menurut beberapa ekonom terdahulu, termasuk Drs Mohammad Hatta atau Bung Hatta, kegiatan ekonomi kerakyatan yang dibangun berdasar pada asas kekeluargaan adalah ekonomi dengan pola koperasi. Sebagaimana kita ketahui bersama, koperasi merupakan badan usaha berbasiskan anggota yang dibuat untuk kesejahteraan anggota. Dasar pembentukan koperasi merah putih sama dengan pembentukan koperasi pada umumnya yaitu Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan” menjadi dasar pembentukan koperasi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pada pasal 4, koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kemandirian. Untuk penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian diatur lebih lanjut dengan Permenkop UKM No.9 Tahun 2018. Dan dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maka Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau disingkat KDKMP merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat dalam rangka menggairahkan ekonomi kerakyatan dengan konsep memberdayakan ekonomi pada tingkat desa atau kelurahan Sesuai Instruksi Presiden, target pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan sebagai basis dasar ekonomi yang berasas pada gotong royong. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Koperasi Merah Putih pada hari senin tanggal 12 Juli 2025, bertepatan dengan hari Koperasi Nasional. Peluncuran KDKMP diharapkan akan memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendorong perekonomian. KDKMP memiliki tujuan sebagai pemutus rantai kemiskinan di desa/kelurahan, mengurangi praktik tengkulak, rentenir, dan pinjaman *online* serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal desa. Layanan KDKMP meliputi unit simpan pinjam, Gudang pangan, klinik/apotik desa, dan fasilitas digital seperti *marketplace*. Isu pendirian KDKMP menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam rangka mengetahui efektivitas peran koperasi dan mengevaluasi strategi pengembangannya di tingkat daerah, diperlukan suatu pendekatan analisis yang sistematis dan berbasis data. Kajian ini bertujuan untuk menilai capaian peran KDKMP dalam pembangunan ekonomi lokal, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pengembangan koperasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah. Hasil analisis diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan kontekstual sesuai karakteristik wilayah.

3.2.2. Perkembangan KDKMP di Sumatera Selatan

3.2.2.1. Perkembangan KDKMP Aktif di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data pada www.merahputih.kop.id lingkup Provinsi Sumatera Selatan, terdapat sejumlah 3.258 koperasi yang terdiri dari 1.683 desa dan 327 kelurahan sehingga ini menunjukkan Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya.

Tabel 3. 3 Jumlah KDKMP Lingkup Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Desa/Kel sudah bentuk KMP	Jumlah KDKMP		Jumlah Modal (Ribuan Rupiah)
			Desa	Kel	
1	Banyuasin	313	159	15	945.189
2	Empat Lawang	156	69	6	3.859.460
3	Lahat	377	360	17	577.655
4	Muara Enim	256	171	10	336.365
5	Musi Banyuasin	242	121	7	2.322.840
6	Musi Rawas	199	182	12	444.097
7	Musi Rawas Utara	89	50	3	159.555
8	Ogan Ilir	241	145	10	490.450
9	Ogan Komering Ilir	327	60	9	154.705
10	Ogan Komering Ulu	157	82	6	159.493
11	Ogan Komering Ulu Selatan	259	33	3	20.425
12	Ogan Komering Ulu Timur	312	181	7	572.714
13	Penukal Abab Lematang Ilir	71	64	7	5.260
14	Lubuk Linggau	72	0	68	132.000
15	Pagar Alam	35	0	36	54.610
16	Palembang	107	0	85	243.820
17	Prabumulih	45	6	26	140.327
Jumlah		3.258	1.683	327	10.618.965

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Adapun seluruh KDKMP yang terbentuk pada Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan proses pendaftaran pada Kementerian Hukum sehingga telah memenuhi persyaratan secara legal.



Tabel 3. 4 Perkembangan KDKMP Per 5 November 2025

No	Kabupaten / Kota	Apakah Memiliki Kantor		Apakah Koperasi Telah Beroperasi		Apakah Sudah Ada Modal Koperasi	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Banyuasin	9	304	9	304	2	311
2	Empat Lawang	5	151	0	156	156	0
3	Lahat	31	346	31	346	20	357
4	Muara Enim	19	237	19	237	256	0
5	Musi Banyuasin	4	238	4	238	4	238
6	Musi Rawas	35	164	35	164	199	0
7	Musi Rawas Utara	38	51	1	88	4	85
8	Ogan Ilir	12	229	40	201	86	155
9	Ogan Komering Ilir	4	323	6	321	327	0
10	Ogan Komering Ulu	22	135	0	157	157	0
11	Ogan Komering Ulu Selatan	64	195	0	259	259	0
12	Ogan Komering Ulu Timur	9	303	9	303	312	0
13	Penukal Abab Lematang Ilir	1	70	1	70	1	70
14	Lubuk Linggau	7	65	2	70	24	48
15	Pagar Alam	35	0	0	35	35	0
16	Palembang	23	84	23	84	107	0
17	Prabumulih	45	0	45	0	45	0
Jumlah		363	2.895	225	3.033	1.994	1.264

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel, dari 3,258 KDKMP yang terbentuk di Sumatera Selatan, terdapat 363 Koperasi (11,14%) yang memiliki kantor. Sedangkan koperasi yang telah beroperasi sejumlah 225 koperasi (6,90%) dan koperasi yang telah memiliki modal sejumlah 1.994 koperasi (61,20%). KDKMP pada Kota Prabumulih telah beroperasi seluruhnya sebanyak 45 koperasi. Kondisi ini bertolak belakang dengan Kabupaten Empat Lawang (156 koperasi), Ogan Komering Ulu (157 koperasi), Ogan Komering Ulu Selatan (259 koperasi) dan Kota Pagar Alam (35 koperasi) dimana seluruh KDKMP belum operasional. Sedangkan pada Kabupaten Musi Rawas Utara (88 koperasi) dan Kabupaten PALI (70 koperasi) baru 1 KDKMP saja yang beroperasi pada kedua kabupaten tersebut.

Menurut data pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, tercatat ada lima jenis usaha yang dijalankan oleh KDKMP yaitu gerai sembako termasuk didalamnya penjualan gas, gerai obat (apotik), gerai klinik, gerai simpan pinjam, dan gerai gudang/cold storage. Dari 5 jenis usaha, gerai simpan pinjam merupakan jenis usaha yang paling banyak telah beroperasi yaitu sejumlah 79 gerai (2,43%). Sedangkan jenis usaha paling sedikit yang telah beroperasi adalah gerai klinik dan gerai cold storage/gudang yaitu sejumlah 2 gerai.

Tabel 3. 5 Perkembangan Gerai KDKMP Per 5 November 2025

Kabupaten / Kota	Apakah Gerai Sembako Telah Beroperasi		Apakah Gerai Obat Sudah Beroperasi		Apakah Gerai Klinik Sudah Beroperasi		Apakah Gerai Simpan Pinjam Sudah Beroperasi		Apakah Gudang/Cold Storage Sudah Beroperasi	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Banyuasin	1	312	0	313	0	313	1	312	2	311
Empat Lawang	0	156	0	156	0	156	0	156	0	156
Lahat	31	346	0	377	0	377	0	377	0	377
Muara Enim	1	255	0	256	0	256	0	256	0	256
Musi Banyuasin	0	242	0	242	0	242	3	239	0	242
Musi Rawas	2	197	2	197	0	199	0	199	0	199
Musi Rawas Utara	1	88	0	89	0	89	0	89	0	89
Ogan Ilir	6	235	0	241	0	241	1	240	0	241
Ogan Komering Ilir	3	324	0	327	0	327	0	327	0	327
Ogan Komering Ulu	1	156	0	157	0	157	0	157	0	157
Ogan Komering Ulu Selatan	0	259	0	259	0	259	0	259	0	259
Ogan Komering Ulu Timur	2	310	0	312	0	312	5	307	0	312
Penukal Abab Lematang Ilir	0	71	0	71	0	71	1	70	0	71
Lubuk Linggau	1	71	0	72	0	72	1	71	0	72
Pagar Alam	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35
Palembang	24	83	1	106	2	105	67	40	0	107
Prabumulih	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45
Jumlah	73	3185	3	3255	2	3256	79	3179	2	3256

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 3. 6 Gerai dan Kemitraan KDKMP Per 5 November 2025

No	Kab/Kota	Jumlah KDKMP	Gerai (Sektor Usaha Yang Sudah Berjalan)	Kemitraan (BUMN)	Pembinaan (Bank/NonBank)
1	Pagar Alam	35	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
2	Ogan Komering ilir	327	5	Belum Ada	288
3	Ogan Komering Ulu Selatan	259	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
4	Ogan Komering Ulu Timur	312	22	Belum Ada	312
5	Musi Rawas	199	13	17	199
6	Ogan Ilir	241	7	Belum Ada	Belum Ada
7	Palembang	107	132	19	107
8	Muara Enim	256	33	14	Belum Ada
9	Empat Lawang	156	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
10	Banyuasin	313	4	Belum Ada	Belum Ada
11	Penukal Abab Lematang Ilir	71	284	Belum Ada	Belum Ada
12	Lahat	377	34	33	31
13	Lubuk Linggau	72	24	14	8
14	Ogan Komering Ulu	157	22	Belum Ada	Belum Ada
15	Musi Banyuasin	242	6	Belum Ada	4
16	Musi Rawas Utara	89	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
17	Prabumulih	45	45	Belum Ada	45
Jumlah		3.258	631	97	994

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Dengan terbentuknya KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat Kabupaten/Kota yang sebagian KDKMPnya telah beroperasi, menjalin program kemitraan dengan BUMN dan telah memiliki pembiayaan dengan pihak perbankan atau dengan pihak selain bank. Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk KDKMP. Beberapa daerah sudah menjalankan gerai usaha, menjalin kemitraan dengan BUMN dan memperoleh pembiayaan. Kabupaten Musi Rawas memiliki 199 KDKMP. Sebanyak 13 koperasi sudah beroperasi, 17 koperasi bermitra dengan BUMN dan 199 koperasi memperoleh pembiayaan dengan total Rp428.505.000. Kota Palembang memiliki 107 KDKMP. Sebanyak 132 koperasi sudah beroperasi, 19 koperasi bermitra dengan BUMN dan 107 koperasi memperoleh pembiayaan senilai Rp367.875.000. Kabupaten Lahat memiliki 377 KDKMP. Sebanyak 34 koperasi beroperasi, 33 koperasi bermitra dengan BUMN dan 31 koperasi memperoleh pembiayaan senilai Rp950.412.000. Kota Lubuk Linggau memiliki 72 KDKMP. Sebanyak 24 koperasi sudah beroperasi, 14 koperasi bermitra dengan BUMN dan 8 koperasi memperoleh pembiayaan senilai Rp54.550.000.

Akan tetapi, terdapat beberapa daerah belum memiliki gerai usaha yang berjalan. Kota Pagaralam dengan 35 KDKMP, Kabupaten OKU Selatan dengan 259 KDKMP, Kabupaten Empat Lawang dengan 156 KDKMP dan Kabupaten Musi Rawas Utara dengan 89 KDKMP belum memiliki kemitraan dengan BUMN serta belum memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga lain.

KDKMP Mock Up di Provinsi Sumatera Selatan

Peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 21 Juli 2025 di seluruh Indonesia memiliki 92 koperasi yang menjadi percontohan (*mock up*) diantaranya 4 koperasi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu KDKMP Surya Adi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, KDKMP Muara Beliti Baru di Kabupaten Musi Rawas, KDKMP Mangun Harjo di Kabupaten Musi Rawas, dan KDKMP Sukodadi di Kota Palembang dan didukung oleh Bank Mandiri dan Bank BNI.

Adapun jenis usaha KDKMP Sukodadi di Kota Palembang memiliki lini usaha berupa budidaya jamur tiram, pembenihan ikan, budaya ikan konsumsi, budidaya kambing, bank sampah, usaha sembako, produksi sabun cuci, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga.

KDKMP Muara Beliti Baru dan KDKMP Mangunharjo di Kabupaten Musi Rawas membuka lini usaha simpan pinjam, penyediaan sembako, penyediaan pupuk, penyediaan sarana pertanian, penyediaan bahan baku usaha lain yang dilakukan anggota dan masyarakat sekitar.

Sedangkan KDKMP Surya Adi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) membuka lini usaha simpan pinjam, penyediaan sembako, penyediaan pupuk, penyediaan sarana pertanian, apotek dan klinik, penyediaan Gudang pertanian/perkebunan, dan persiapan usaha lapak (penghubung petani kecil ke perusahaan dalam bidang perkebunan/pertanian).

3.2.2.2. Pengembangan SDM dan Organisasi pada KDKMP

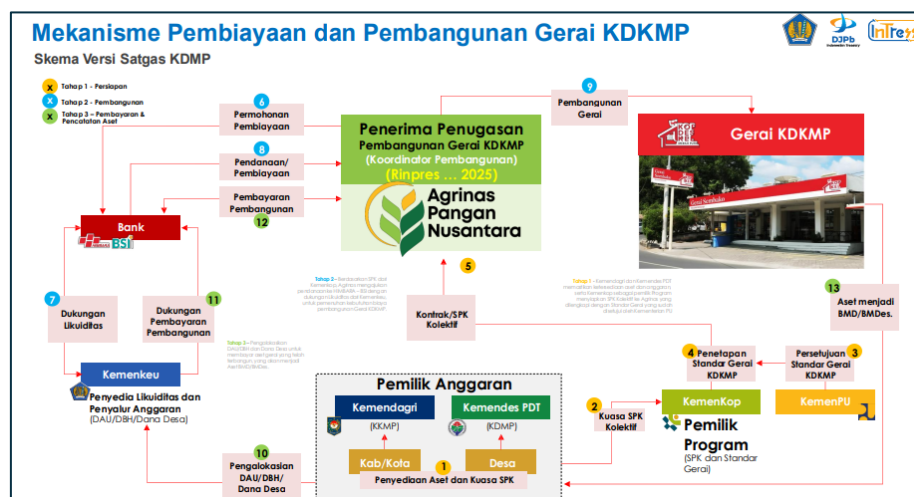
Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) KDKMP di seluruh Indonesia melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi pendamping dan pengurus Koperasi Merah Putih dimana Kemenkop memiliki target untuk melatih lebih dari 180 ribu orang di 38 provinsi pada tahun 2025. Program tersebut memiliki tujuan memperkuat kelembagaan KDKMP dengan meningkatkan profesionalitas pengurus. Untuk pelatihan pendamping, sebanyak 11.415 peserta telah mengikuti kegiatan dari target 18.839 (61%) dan dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi termasuk di dalamnya Sumatera Selatan.

Selain Kementerian Koperasi, program pelatihan tersebut dilaksanakan juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan model bisnis KDKMP.

Materi pelatihan didalamnya termasuk Hubungan Industrial, Pancasila, tata kelola koperasi, digitalisasi, model bisnis koperasi modern, pembukuan, serta pengembangan inovasi desa. Peserta pelatihan mendapat bimbingan teknis penyusunan proposal pembiayaan dan akses ke lembaga keuangan untuk memperluas peluang usaha. Narasumber kegiatan berasal dari berbagai kementerian, lembaga, serta praktisi profesional di bidang pengembangan SDM dan koperasi. Diharapkan dengan pelatihan ini, KDKMP mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM melakukan pelatihan pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih dimana peserta yang terlibat terbatas kepada KDKMP pada wilayah Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kabupaten PALI.

3.2.2.3. Perkembangan Pendanaan dan Pembiayaan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Grafik 3. 2 Mekanisme Pembiayaan dan Pembangunan Gerai KDKMP



Sumber : DJPb

Pendanaan KDKMP bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan termasuk diantaranya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan BLU. KDKMP dapat memperoleh pembiayaan modal awal sampai dengan Rp 3 miliar dimana modal tersebut bukan merupakan dana hibah melainkan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh KDKMP. Selain itu, Badan Layanan Umum (BLU) dapat juga memberikan pembiayaan kepada KDKMP. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) adalah BLU yang memberikan komitmen memberikan pembiayaan kepada KDKMP. Adapun ketentuan LPDB adalah bunga yang diberikan 3% pertahun dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diberikan *grace period* maksimal 12 bulan. Pinjaman yang diberikan LPDB paling tinggi sebesar Rp 5 miliar. Salah satu syarat pengajuan pembiayaan adalah pengurus dan pengawas KDKMP tidak memiliki kolektibilitas macet pada lembaga keuangan. Saat ini KDKMP Babat di Kabupaten PALI sebesar Rp 2,9 milyar sedang dalam proses pengajuan pembiayaan ke LPDB.

Dalam perhitungannya, Kemenkop mengkalkulasi kebutuhan dana dalam rangka pembangunan fisik KDKMP sekitar Rp2,5 miliar per lokasi. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi mengambil langkah agresif dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Sebanyak 7.923 titik KDKMP kini mulai memasuki tahap konstruksi fisik secara serentak. Langkah ini bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan ekosistem ekonomi terpadu. Dengan plafon kredit Rp3 miliar per unit dari Himbara, setiap KDKMP akan dilengkapi tujuh infrastruktur vital: mulai dari *cold storage* untuk menjaga kualitas komoditas, sarana logistik, hingga layanan kesehatan berupa klinik dan apotek desa.

Dalam skema pembiayaan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) memegang peran kunci sebagai pelaksana pembangunan fisik. Kemenkop melaporkan bahwa likuiditas proyek telah mengalir, ditandai dengan pencairan termin pertama mendekati Rp600 miliar sebagai uang muka kepada pelaksana lapangan.

Dukungan fiskal pemerintah pun tak main-main. Kementerian Keuangan sedang merampungkan revisi PMK Nomor 49 Tahun 2025. Revisi ini krusial untuk melegitimasi mekanisme pinjaman antara Agrinas dan Himbara. Dalam skema ini, pemerintah menjamin penuh pembayaran cicilan dengan nilai sangat besar yaitu Rp40 triliun per tahun selama kurun waktu enam tahun. Kemenkop menetapkan peta jalan yang ketat. Sepanjang November hingga Desember, akselerasi pendataan tanah ditargetkan menembus 80.000 bidang, dengan puluhan ribu titik konstruksi baru yang akan segera dimulai (*groundbreaking*). Jika sesuai jadwal, seluruh jaringan infrastruktur KDKMP ini akan beroperasi penuh pada Maret 2026, menandai era baru modernisasi koperasi Indonesia.

3.2.3. Dukungan Pemerintah untuk Pengembangan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan

3.2.3.1. Kebijakan Pemerintah terkait Pengembangan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan fundamental dalam ekonomi pedesaan lewat penerbitan Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Kebijakan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan pergeseran paradigma dalam memberdayakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan target ambisius mendirikan lebih dari 80.000 unit KDKMP, pemerintah tidak lagi membiarkan koperasi desa bertarung sendirian mencari modal. Dengan memangkas birokrasi kredit sebelumnya, pendirian gerai koperasi seringkali terhambat birokrasi perbankan yang mensyaratkan BI *Checking* ketat bagi

para pengurusnya. Dalam skema baru ini, hambatan tersebut diruntuhkan.

Melalui sinergi SKB empat menteri, pemerintah pusat mengambil alih peran sebagai penyedia likuiditas utama. PT Agrinas di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), ditunjuk sebagai pelaksana fisik yang didukung penuh kekuatan teritorial TNI untuk memastikan akurasi lahan dan kecepatan pembangunan.

Skema "Tanggung Renteng" Negara keunggulan skema ini terletak pada model pengembalian investasinya. Kementerian Keuangan merancang mekanisme pemotongan dana transfer daerah (DAU/DBH) dan Dana Desa sebagai jaminan pembayaran. Setiap unit yang mendapat suntikan modal hingga Rp3 miliar tidak akan membebani arus kas desa di awal. Dana ditalangi oleh lembaga pengelola investasi negara, Danantara. KDKMP mencicil kewajiban tersebut selama 6 tahun dengan jaminan berupa pemotongan Dana Desa, sementara untuk kelurahan, beban jaminan ditanggung melalui alokasi DAU/DBH pemerintah kota/kabupaten. Sehingga hal ini menjadi jaminan bagi perbankan bahwa pembiayaan ke KDKMP tidak akan menjadi beban NPL. Dengan demikian, fokus pengurus koperasi di daerah kini hanya satu: memastikan operasional bisnis berjalan, logistik lancar, dan SHU tercapai untuk kesejahteraan warga.

3.2.3.2. Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan komitmen penuh dalam menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara nasional. Sebagai bukti keseriusan, Pemprov Sumsel mengumumkan telah merampungkan pembentukan badan hukum KDKMP hingga 100%, mencakup total 3.258 unit sesuai jumlah desa dan kelurahan di wilayahnya. *Pilot Project* dan Pembiayaan Dari ribuan unit yang terbentuk, empat KDKMP telah ditetapkan sebagai model percontohan (*mock up*) di Sumatera Selatan, yaitu:

1. KDKMP Surya Adi (Kabupaten Ogan Komering Ilir)
2. KDKMP Muara Beliti Baru (Kabupaten Musi Rawas)
3. KDKMP Mangun Harjo (Kabupaten Musi Rawas)
4. KDKMP Sukodadi (Kota Palembang)

Selain itu, akselerasi pembiayaan juga tengah berjalan. KDKMP Babat di Kabupaten Muara Enim saat ini sedang dalam tahap finalisasi realisasi pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Meski pembentukan lembaga telah tuntas, tantangan infrastruktur fisik tetap menjadi prioritas. Saat ini, pemerintah daerah se-Sumatera Selatan bersinergi dengan TNI untuk mematangkan alokasi lahan bagi unit-unit yang belum memiliki lokasi tetap. Kesiapan lahan ini krusial agar PT Agrinas dapat segera mengeksekusi pembangunan fisik. Targetnya, seluruh mesin ekonomi desa ini dapat beroperasi penuh pada tahun 2026.

3.2.3.3. Dukungan PT Agrinas untuk Pengembangan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah mempercepat realisasi infrastruktur ekonomi desa lewat penerbitan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tertanggal 22 Oktober 2025. Presiden menugaskan PT Agrinas untuk memimpin pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Payung hukum percepatan penyelesaian pembangunan KDKMP pada diktum kelima dan keenam dalam Inpres tersebut memberikan wewenang strategis bagi PT Agrinas. BUMN ini diperbolehkan melakukan percepatan

melalui mekanisme swakelola dan pemilihan penyedia via penunjukan langsung. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi tender konvensional, namun tetap diwajibkan menjunjung praktik bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan. Profil Pelaksana dan Dukungan Dana PT Agrinas sendiri merupakan hasil transformasi dari PT Yodya Karya (Persero) yang diresmikan Februari lalu. Selain proyek koperasi, perusahaan ini juga tengah menggarap 425.000 hektare lahan *food estate*, menandai ekspansinya dari sektor konsultasi konstruksi ke sektor pangan. Untuk memuluskan proyek masif ini, PT Agrinas didukung sindikasi pembiayaan dari Himbara dan BSI. Skema yang disiapkan berupa pinjaman dengan limit maksimal Rp3 miliar per unit koperasi dan jangka waktu pengembalian (tenor) selama 6 tahun.

3.2.3.4. Dukungan TNI dalam Pembangunan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Kodim 0418/Palembang resmi memulai pembangunan fisik KDKMP di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami pada Rabu tanggal 15 Oktober 2025. *Groundbreaking* ini menandai dimulainya operasi pemberdayaan ekonomi yang melibatkan prajurit TNI dan masyarakat secara langsung. Pelibatan TNI dalam proyek ini adalah mandat Operasi Militer Selain Perang (OMSP). TNI tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga turun tangan membantu pemerintah daerah mengejar target pembangunan infrastruktur ekonomi. Dalam lingkup kerja sama kolaborasi TNI dengan PT Agrinas, peran TNI sangat komprehensif, mencakup:

1. Pra-Konstruksi: Survei dan validasi lokasi serta sosialisasi program.
2. Konstruksi: Eksekusi bangunan, mobilisasi warga, dan distribusi logistik.
3. Pasca-Konstruksi: Pengawasan, evaluasi, serta pengamanan aset dan stabilitas wilayah.

Melalui sinergi ini, pembangunan KDKMP diharapkan menjadi katalis bagi penguatan ekonomi rakyat sekaligus kemandirian satuan kewilayahan TNI di Sumatera Selatan.

3.2.4. Tantangan dalam Pengembangan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan boleh saja berbangga dengan capaian 100% pembentukan legalitas KDKMP. Namun, di balik angka statistik tersebut, tersimpan tantangan fundamental: tingkat operasional KDKMP riil di lapangan tercatat belum mencapai 50%. Kesenjangan antara kuantitas dan kualitas ini memunculkan lima tantangan krusial yang harus segera dimitigasi agar KDKMP tidak bernasib sama dengan model koperasi masa lalu. Menurut hemat kami terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Risiko Tata Kelola 'Top-Down' merupakan masalah klasik koperasi di Indonesia dimana ini menunjukkan lemahnya *Good Corporate Governance*. Pendirian KDKMP yang cenderung *top-down* (instruksi dari atas) tanpa partisipasi organik masyarakat berisiko menciptakan struktur organisasi yang rapuh. Tanpa *sense of belonging* dari warga, koperasi rentan menjadi tidak akuntabel, tidak efisien, dan rawan penyalahgunaan dana. Sejarah penurunan performa KUD di masa lalu harus menjadi alarm bagi keberlanjutan KDKMP.
2. Kesenjangan Literasi Keuangan dimana kecanggihan sistem tidak akan berguna tanpa pemahaman pengguna. Rendahnya literasi keuangan dan perkoperasian di tingkat desa menjadi bom waktu. Jika anggota tidak memahami hak, kewajiban, dan prinsip dasar keuangan, potensi

mismanagement hingga penipuan (*fraud*) akan selalu mengintai.

3. Meski pemerintah menjanjikan kolaborasi dengan lembaga seperti Danantara maupun Badan Layanan Umum (BLU), efektivitas skema ini belum teruji di lapangan. Sejak era 1860-an, modal selalu menjadi hambatan utama koperasi. Tanpa eksekusi penyaluran modal yang presisi, target SHU dan pergerakan ekonomi desa hanyalah angan-angan.
4. Payung hukum UU No. 25 Tahun 1992 dinilai usang menghadapi era ekonomi digital. Meski pemerintah menerbitkan Inpres (seperti Inpres No. 9/2025) untuk percepatan, ketiadaan aturan turunan atau petunjuk teknis (Juknis) yang operasional menciptakan area abu-abu. Tanpa kepastian hukum teknis, pengurus koperasi akan ragu dalam mengambil keputusan strategis.
5. Di era Industri 4.0, digitalisasi adalah harga mati. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan banyak desa di Sumsel masih terkendala infrastruktur telekomunikasi (*blank spot*). Ketimpangan digital ini membuat sistem informasi akuntansi dan pemasaran modern sulit diadopsi, menjadikan koperasi desa kurang kompetitif dan tidak efisien.

Berbagai tantangan di atas saling terkait dan membutuhkan strategi penanganan komprehensif dimana kualitas koperasi yang variatif menjadi pekerjaan rumah agar keberadaan koperasi benar-benar berperan dalam perekonomian daerah.

3.2.5. Strategi Pengoperasian KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Menghadapi tantangan operasional di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama para pemangku kepentingan telah merumuskan strategi komprehensif. Berikut adalah lima pilar utama pengembangan KDKMP di Sumsel:

1. Intensifikasi Pembinaan dan Pendampingan Pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota secara simultan mengaktifkan kembali pendampingan intensif. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel memimpin koordinasi serta monitoring dan evaluasi (monev) berkala, khususnya bagi KDKMP yang belum beroperasi. Didukung dana dekonsentrasi pusat, materi pembinaan difokuskan pada tata kelola organisasi, akuntabilitas laporan keuangan, hingga penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu.
2. Agregasi Potensi Ekonomi Lokal Desa tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan pusat pertumbuhan. Kekayaan hayati—mulai dari pertanian hingga pariwisata—kini dikelola melalui satu pintu: Koperasi. Kebijakan ini menempatkan KDKMP sebagai "*agregator*" utama yang menyerap produk UMKM, meningkatkan nilai tambah, serta memotong rantai pasok yang panjang demi efisiensi distribusi dan perluasan akses pasar.
3. Optimalisasi Bonus Demografi: Pemuda sebagai Motor Penggerak. Memanfaatkan bonus demografi, strategi ini menempatkan pemuda desa sebagai agen perubahan. Mengingat hampir 40% populasi pemuda tinggal di pedesaan dengan literasi digital yang baik, mereka didorong masuk ke dalam struktur kepengurusan koperasi. Pelibatan generasi muda yang adaptif ini diharapkan mampu mengubah wajah koperasi tradisional menjadi entitas bisnis modern yang inklusif.
4. Transformasi Digital dan Modernisasi Layanan Menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Sumsel melakukan percepatan infrastruktur digital hingga ke desa. Tidak hanya berhenti pada akses internet, Dinas Koperasi bersinergi dengan Diskominfo menggelar bimbingan



teknis (Bimtek) aplikasi pembukuan, *marketplace*, hingga *fintech* perkoperasian. Targetnya jelas: Koperasi harus memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK), Izin Usaha (IUMK), dan terintegrasi ke ekosistem digital. Contoh sukses terlihat di beberapa koperasi di Palembang yang kini memiliki aplikasi mobile sendiri untuk layanan simpan pinjam dan cek saldo secara *real-time*.

5. Sinergi Lintas Sektoral (Inpres 9 dan 17 Tahun 2025) Sesuai mandat Instruksi Presiden, pengembangan KDKMP bukan tugas tunggal Kementerian Koperasi. Ini adalah gerakan nasional yang didukung lintas kementerian dan BUMN—mulai dari fasilitasi kebijakan, konstruksi fisik, hingga skema pembiayaan. Pendekatan "keroyokan" ini memastikan integrasi sumber daya yang kuat untuk membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang kokoh.

3.2.6. Rekomendasi: Peran Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengembangan KDKMP di Daerah

Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan memegang peran vital dalam memastikan keberhasilan program KDKMP. Melalui kewenangan fiskal, Kanwil DJPb Sumatera Selatan menjalankan enam langkah strategis:

1. Dalam Penyaluran Dana Desa, Kanwil DJPb Sumsel menerapkan mekanisme *reward and punishment* yang tegas sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan SE Menkeu Nomor S-9/MK/PK/2025. Pembentukan KDKMP kini menjadi syarat mutlak (mandatory) penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025. KPPN di wilayah Sumsel diinstruksikan untuk menunda penyaluran jika desa tidak melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Dukungan APBDesa dan Akta Pendirian/Bukti Notaris KDKMP. Langkah ini memastikan kepatuhan administratif berjalan seiring dengan aliran dana.
2. Monitoring Likuiditas & Pembiayaan Himbara. Kemenkeu menempatkan dana di Himbara dan BSI sebagai sumber likuiditas bagi PT Agrinas, dengan plafon kredit Rp3 miliar per unit (tenor 6 tahun). Dalam skema ini, Kanwil DJPb berperan aktif memonitor efektivitas penempatan dana tersebut serta memfasilitasi dialog solutif antara Perbankan, Dinas Koperasi, dan Agrinas untuk memastikan arus kas proyek konstruksi tidak terhambat.
3. Pengawasan DAU dan DBH sebagai bentuk jaminan 'Repayment' Mengingat skema pengembalian investasi KDKMP (khususnya kelurahan) bersumber dari pemotongan DAU dan DBH. Kanwil DJPb melakukan pengawasan ketat atas alur dana Transfer Ke Daerah (TKD) ini. Kanwil DJPb memastikan alokasi untuk kewajiban pembayaran pembangunan fisik gerai dan gudang telah dianggarkan dan disalurkan sesuai perundang-undangan, mencegah potensi gagal bayar (*default*) di kemudian hari.
4. Fasilitator Sinergi Lintas Sektoral. Kanwil DJPb memposisikan diri sebagai inisiator dalam Forum Koordinasi Pengembangan KUMKM. Forum ini menyatukan Bappeda, Dinas Koperasi, BUMN/BLU, dan lembaga penjaminan untuk mengurai hambatan teknis di lapangan. Tujuannya adalah akselerasi pembangunan fisik yang dilakukan oleh PT Agrinas agar tepat waktu dan tepat mutu.
5. Kanalisasi Belanja Pemerintah (*Government Spending*). Kanwil DJPb mendorong integrasi produk KDKMP ke dalam ekosistem belanja negara. Melalui mekanisme E-Katalog Lokal dan *Digipay* (*marketplace* pemerintah), Kanwil DJPb melakukan advokasi agar satker kementerian/lembaga memprioritaskan produk KDKMP dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, produk

unggulan KDKMP dipromosikan secara aktif dalam event strategis "Kemenkeu Satu".

6. Penguatan Akuntabilitas & Kapasitas SDM. Bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan (BDK), Kanwil DJPb memberikan asistensi teknis terkait pelaporan keuangan yang akuntabel. Hal ini krusial mengingat adanya dana publik (Dana Desa/TKD) yang terlibat. Edukasi ini mencakup manajemen arus kas hingga mekanisme pengembalian pinjaman, memastikan koperasi dikelola secara transparan.

3.2.7. Potensi Pembangunan KDKMP di Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi raksasa yang tersebar di 3.258 desa dan kelurahan. Keberagaman komoditas mulai dari agrikultur, perikanan, hingga industri kreatif memerlukan wadah kelembagaan yang kuat. Untuk itu, pengembangan KDKMP difokuskan pada empat bidang utama: Kelembagaan, Usaha, Kemitraan, dan Teknologi. Berikut rincian strategi akselerasinya:

1. Percepatan Infrastruktur Fisik (Inpres 17/2025). Tantangan utama saat ini adalah kesenjangan infrastruktur. Dari 3.258 entitas KDKMP, tingkat operasional riil masih di bawah 15%. Lebih dari 80% unit belum memiliki bangunan fisik yang layak. Merespon Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, pembangunan fisik kini dikebut. PT Agrinas bersinergi dengan Kodim 0418/Palembang telah memulai langkah konkret melalui *groundbreaking* perdana di KDKMP Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami. Targetnya, seluruh infrastruktur fisik tuntas dan beroperasi penuh pada tahun 2026.
2. Diversifikasi Usaha dan Pemangkas Rantai Pasok. KDKMP didesain bukan hanya sebagai simpan-pinjam, tetapi sebagai agregator komoditas. Dengan dukungan BUMN dan BLU, koperasi difungsikan untuk memotong rantai distribusi yang panjang. Produk warga dikumpulkan (dikonsolidasi) oleh koperasi dan langsung dihubungkan ke pasar atau konsumen akhir (*off-taker*). Selain itu, layanan simpan pinjam wajib bertransformasi ke basis digital untuk mempermudah akses permodalan anggota.
3. Transformasi Digital via *Microsite* Pemerintah menetapkan penggunaan *microsite* sebagai standar baru kredibilitas koperasi. Bukan sekadar situs *web*, *microsite* berfungsi sebagai "Identitas Digital" yang menjamin transparansi. Fungsi Strategis *Microsite*:
 - a. Kredibilitas & Transparansi: Menampilkan profil, struktur, hingga laporan keuangan secara terbuka.
 - b. Syarat Pembiayaan: Menjadi prasyarat wajib verifikasi bagi perbankan dan investor.
 - c. Integrasi *Smart Village*: Menghubungkan layanan koperasi dengan ekosistem digital desa.
4. Pengawasan dan Kemandirian Ekonomi Keberhasilan KDKMP bergantung pada pengawasan melekat yang melibatkan kepala desa dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan transparansi laporan keuangan, KDKMP diproyeksikan menjadi model baru pengelolaan dana desa yang minim risiko politisasi.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen penuh mengawal program ini selaras dengan visi "Asta Cita". Melalui pengawalan ketat terhadap pencairan Dana Desa/DAU serta penyediaan lahan, Pemprov memastikan bahwa ketimpangan ekonomi antar-desa dapat dikikis melalui jaringan ekonomi kerakyatan yang kokoh.



BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi





Kesimpulan	Rekomendasi
I. Analisis Ekonomi Regional	
1. Pada triwulan III 2025, perekonomian Sumatera Selatan sebesar 5,20%, melebihi laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,04%) maupun capaian tahun sebelumnya (5,04%). Hal ini mencerminkan ekonomi Sumsel memiliki daya tahan yang baik terhadap guncangan atau perlambatan ekonomi yang mungkin terjadi di tingkat nasional atau global. Komponen yang berkontribusi terbesar pada PDRB menurut pengeluaran adalah Konsumsi RT (59,55%), PMTB (29,04%), Ekspor (20,68%), dan Impor (16,27%). 2. Kinerja ekspor meningkat dan menopang sektor eksternal sehingga surplus perdagangan ikut meningkat. Namun pada struktur PDRB, pertumbuhan komponen ekspor mengalami penurunan dari 1,11 (Q2) menjadi -2,49 yang dipengaruhi oleh komoditas utama yang nilai ekspornya menurun (bahan baku karet dan pulp) dan harga dunianya menurun (batu bara). Sementara impor barang modal juga melemah, mencerminkan normalisasi investasi sektor produktif. Struktur ekspor masih sangat bergantung pada Tiongkok, India, dan negara ASEAN sedangkan pangsa utama impor bergantung pada Tiongkok dan negara ASEAN. Hal ini menimbulkan risiko terhadap gejala perekonomian dan politik di kawasan, seperti kebijakan yang diterapkan AS terhadap Tiongkok dan India. 3. Struktur pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha pada triwulan III didominasi oleh sektor sumber daya alam dan industri terkait. Meskipun demikian, sektor Perdagangan dan Konstruksi memainkan peran krusial dalam menopang pertumbuhan dan upaya diversifikasi ekonomi di wilayah tersebut. Sektor pertambangan sedang lesu seiring dengan turunnya nilai ekspor dan harga dunia komoditas utama. Industri Pengolahan tercatat menurun dibanding kuartal lalu, namun meningkat dibanding triwulan III 2024 karena didukung oleh meningkatnya produksi dan ekspor olahan kelapa sawit di tengah momentum meningkatnya harga CPO dunia. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh signifikan seiring performa positif produksi padi palawija dan NTP. Penurunan sektor perdagangan besar dan eceran, kemungkinan besar hanyalah normalisasi setelah triwulan sebelumnya yang memiliki lebih banyak hari libur yang dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Sektor konstruksi meningkat tajam dibanding triwulan III 2024 seiring dengan akselerasi proyek infrastruktur. 4. Inflasi Sumatera Selatan menunjukkan tren meningkat dengan dampak signifikan terhadap fiskal daerah. Diperlukan kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah, didukung kolaborasi lintas instansi dan penguatan data, untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Inflasi Sumsel meningkat namun masih tidak melebihi batas atas target inflasi. Per September 2025, inflasi tahunan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 3,44% (yoy). Karena hampir melewati batas atas target inflasi	1. Pertumbuhan ini bisa lebih dioptimalkan dengan stimulus fiskal, mengingat konsumsi pemerintah memiliki andil 5,5% dari total pertumbuhan ekonomi Sumsel. Penguatan eksekusi fiskal pada triwulan IV 2025 perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan memfokuskan penyerapan pada belanja modal bernilai tambah (infrastruktur dasar, konektivitas, layanan publik) dan belanja barang yang produktif karena realisasinya masih di bawah 50% dari pagu. Hal ini bertujuan agar kontraksi konsumsi pemerintah tidak berlanjut, terjadi <i>multiplier</i> fiskal, dan mendorong pertumbuhan komponen PDRB lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi Sumsel meningkat. 2. Guna perlindungan pendapatan petani dan stabilisasi harga komoditas pangan, Pemerintah Daerah perlu untuk memfasilitasi skema <i>off-take/contract farming</i> hortikultura dengan <i>offtaker</i>. Selain itu, diperlukan penguatan <i>buffer stock</i> komoditas volatil melalui <i>cold chain</i> dan subsidi resi gudang (SRG) agar petani dapat menunda penjualan ketika harga jatuh. Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster berbasis <i>offtaker</i> juga diperlukan dalam pengelolaan modal kerja. 3. Akselerasi PMTB dapat melalui pengoptimalan belanja modal pemerintah untuk proyek-proyek yang memiliki <i>multiplier effect</i>. Proyek ini bisa sekaligus dilakukan untuk mendukung proyek strategis daerah Revitalisasi Pasar Tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat, pengembangan <i>food estate</i> dengan cetak sawah, persiapan <i>Green Refinery</i> Unit III Plaju untuk pemanfaatan CPO yang maksimal, persiapan <i>New GSH (Gasoline Sulphur Hydrotreater) Refinery</i> Unit III Plaju. Optimalisasi Struktur Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga bisa dilakukan, tentunya dengan menyeimbangkan instrument <i>Availability Payment (AP)</i>, <i>User Charge (UC)</i>, dan <i>Viability Gap Fund (VGF)</i>. Dengan demikian, proyek tidak membebani pembiayaan APBD dan beralih ke sektor swasta sambil menjamin kelayakan investasi (<i>bankability</i>). 4. Perluasan diversifikasi pasar ekspor dan konektivitas logistik. Dominasi ekspor Sumsel ke Tiongkok dan India perlu diimbangi dengan penetrasi ke pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah melalui misi dagang terarah, <i>buyer matching</i>, dan pendampingan. Dukungan terhadap pembangunan <i>New Palembang Port</i> Tanjung Carat yang rencana akan dimulai 2026, penyelesaian PSN Jalan Tol Trans Sumatera, dan PSN Kereta Api Logistik Lahat-Kertapati, berguna untuk konektivitas jalur logistik dan efisiensi layanan kepabeanan. Hal ini untuk penguatan ekosistem ekspor Sumsel jangka panjang. 5. Pemulihan ekosistem pariwisata dan akomodasi formal untuk mewujudkan program strategis Sumsel <i>Wonderful 2030</i>. Dengan mobilitas dan wisnus yang masih kuat namun TPK belum tumbuh signifikan, diperlukan peningkatan tujuan wisata di Sumsel agar belanja wisata dapat mendorong sektor akomodasi serta makanan dan minuman. Hal ini bisa melalui pengembangan paket wisata akhir pekan (3 hari 2 malam) yang mencakup <i>tour</i> Sungai Musi, <i>workshop</i> Songket, wisata kuliner, dan wisata sejarah Sriwijaya yang menarik pengunjung menginap dan berkuliner. Selain itu, penyelenggaraan <i>event</i> besar tahunan yang menarik akan memastikan kedatangan wisatawan tetap konsisten sepanjang tahun, seperti festival budaya atau lomba olahraga yang melibatkan partisipasi nasional dan internasional. 6. Pengendalian inflasi jangka pendek : • Pengendalian inflasi pangan berbasis 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) khususnya pada komoditas penyumbang inflasi terbesar, yaitu cabai merah, bawang merah, beras serta komoditas lainnya yang juga diprediksi akan mengalami tekanan inflasi menjelang akhir tahun, yaitu daging ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.



Kesimpulan	Rekomendasi
serta lebih tinggi dibanding inflasi nasional (2,65% yoy), maka tekanan harga yang relatif tinggi perlu diwaspadai. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, tomat, bahan bakar rumah tangga. Peningkatan inflasi di Makanan, Minuman, dan Tembakau sejalan dengan harga bahan pangan kontributor utama inflasi yang turut meningkat. Secara spasial, per September 2025 Kabupaten OKI dan Muara Enim memiliki inflasi tahunan melewati batas atas sasaran inflasi nasional 2025 (3,5%) serta inflasi Palembang dan Lubuk Linggau juga hampir melewati. Hal ini menandakan pengendalian inflasi perlu menjadi isu prioritas pemerintah daerah kota dan kabupaten di Sumsel. 5. Pasar tenaga kerja Sumsel sampai dengan triwulan III tahun 2025 masih mengarah ke pemulihan yang optimistis, meskipun masih terdapat tantangan struktural seperti tingginya pekerja informal, pengangguran terdidik, dan penurunan kelompok pekerja penuh. Upaya penguatan berupa <i>link and match</i> antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, insentif bagi perusahaan untuk rekrutmen pekerja penuh waktu, perluasan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan, serta perluasan kesempatan kerja formal menjadi krusial dalam menjaga kesinambungan perbaikan ketenagakerjaan di provinsi Sumatera Selatan. 6. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Selatan September 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,57% (mtm), mencerminkan daya beli dan kesejahteraan petani di Sumsel sedang mengalami peningkatan untuk semua subsektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian pedesaan. Demikian pula dengan Nilai Tukar Nelayan yang meningkat sebesar 0,48% (mtm) disebabkan kenaikan harga komoditas pada penangkapan perairan umum.	• Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah dapat dilakukan dengan rutin untuk langsung memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. • Penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) perlu dipercepat untuk menjaga keterjangkauan harga beras. • Pengawasan penyaluran LPG 3kg perlu diperketat, terutama di tingkat agen dan pangkalan, yang menjadi celah bagi oknum untuk membeli gas melebihi jatah yang ditentukan agar subsidi energi tersebut bisa tepat sasaran. • Optimalisasi pelaksanaan program GSMP (Gerakan Sumsel Mandiri Pangan) dan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) perlu untuk mendorong kemandirian pangan daerah serta memastikan jangkauan harga, pasokan, dan distribusi pangan dapat terjaga dengan baik sehingga stabilisasi harga dapat terjaga. Pengendalian inflasi jangka menengah hingga panjang : • Penguatan tata kelola data harga untuk respons kebijakan cepat dengan satu platform informasi terpadu (harga, stok, arus barang, bongkar-muat) yang melibatkan berbagai pihak termasuk produsen dan distributor di lapangan. Data ini dapat menjadi rujukan TPID Sumsel dalam pengambilan keputusan. <i>Early-warning</i> System berbasis data ini penting untuk mempercepat intervensi saat terjadi lonjakan harga komoditas pangan atau gangguan distribusi. • Menjadikan kelompok petani/peternak lebih terorganisir untuk lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dan pemasaran. • Modernisasi pertanian tradisional yang bergantung musim dengan memaksimalkan <i>water management</i> dan menggunakan Peta Kalender Tanam BMKG untuk menghindari gagal panen. • Mendorong terbentuknya usaha penyewaan alat teknologi tani sehingga tidak memberatkan petani untuk membeli secara pribadi. 7. Penguatan ketenagakerjaan Sumsel pada aspek yang masih perlu intervensi sebagai berikut: membentuk MoU antara lembaga pendidikan vokasi dengan perusahaan lokal, peningkatan pekerja penuh waktu melalui insentif pajak bagi perusahaan untuk rekrutmen pekerja penuh waktu, perluasan perlindungan tenaga kerja paruh waktu melalui subsidi iuran bagi perusahaan kecil dan menengah dengan mengoptimalkan integrasi data UMKM dengan Dinas Tenaga Kerja untuk ketepatan sasaran, serta perluasan kesempatan kerja formal dengan pengembangan Kawasan Industri Desa berbasis komoditas unggulan. 8. Optimalisasi momentum kenaikan NTP & NTN dengan investasi agroindustri untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan lokal, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta perluasan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis komoditas dengan bunga rendah.
II. Analisis Fiskal Regional	
1. Kinerja fiskal Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan III 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Pendapatan yang sebagian besar berasal dari kontribusi sektor perpajakan berbasis komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet. Penerimaan pajak dan ekspor, terutama CPO, menunjukkan kinerja yang sangat positif, meskipun penerimaan bea masuk terpengaruh oleh penurunan impor. Perhatian diutamakan terhadap kinerja belanja barang dan modal yang menurun akibat efisiensi anggaran dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang dialihkan kepada program prioritas, tetap diimbangi dengan kinerja belanja pegawai dan transfer ke daerah. Perlambatan belanja berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi,	1. DJPb lingkup wilayah Sumatera Selatan dapat mendorong satker K/L maupun Pemerintah Daerah untuk segera melakukan realisasi terhadap belanja yang berpotensi dapat terserap secara maksimal. Dalam upaya percepatan belanja yang dilakukan sampai dengan sisa akhir tahun anggaran 2025 tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Keuangan di wilayah Sumatera Selatan sebagaimana berikut: • DJPb dan DJP Lingkup Wilayah Sumatera Selatan dapat bekerja sama dalam memproyeksikan belanja yang dipercepat dengan proyeksi penerimaan pajak yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun melalui pengawasan aliran dana kebutuhan belanja yang akurat. • KPPN lingkup wilayah Sumatera Selatan sebagai ujung tombak dalam pengelolaan anggaran negara perlu memastikan bahwa belanja negara dapat terlaksana dengan lancar dan tepat waktu



Kesimpulan	Rekomendasi
sehingga dapat menurunkan penerimaan PPN dan PPh. Belanja barang yang terkait dengan konsumsi publik atau proyek pembangunan biasanya dapat merangsang kegiatan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, penurunan belanja modal yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur dan investasi dapat mengurangi aktivitas ekonomi jangka panjang, mempengaruhi sektor-sektor seperti konstruksi, dan menurunkan pajak penghasilan. 2. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 berdampak pada Belanja APBN di triwulan III 2025 yang mengalami kontraksi dibanding periode tahun sebelumnya karena adanya pemotongan dan pengalihan anggaran langsung kepada program-program prioritas serta blokir anggaran sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut. Di sisi lain pada Penerimaan PNPB juga mengalami kontraksi khususnya pada PNPB BLU Pendidikan karena perubahan status Universitas Sriwijaya yang sebelumnya sebagai Satker BLU menjadi PTNBH. Namun, secara keseluruhan PNPB mengalami pertumbuhan apabila mengecualikan nilai PNPB BLU Universitas Sriwijaya. 3. Kinerja Transfer ke Daerah (TKD) Sumsel hingga triwulan III 2025 tetap menjadi penopang utama APBD dengan realisasi mencapai Rp25,59 triliun (74,16% dari pagu) dan tumbuh 6,90% (yoy), meskipun dihadapkan pada tekanan alokasi akibat kebijakan efisiensi TKD dan beragam tantangan administratif di daerah. Optimalnya kontribusi DBH dan DAK Nonfisik menopang stabilitas penyaluran, namun kinerja DAU dibayangi isu DAU PPPK dan DAU Kelurahan. Kinerja DAK Fisik melemah akibat penurunan pagu serta keterlambatan syarat salur. Sedangkan Dana Desa terkontraksi akibat kebijakan penghentian sementara Tahap II serta kesiapan administrasi desa yang belum merata. Variasi kinerja antar kabupaten/kota mencerminkan perbedaan kapasitas tata kelola, yang turut memengaruhi akses pemda terhadap Insentif Fiskal serta kelancaran penyaluran komponen-komponen TKD lainnya. 4. Kinerja APBD di Sumsel di Triwulan III 2025 tetap berkinerja baik dengan pertumbuhan di sisi Pendapatan Daerah. Pertumbuhan ini terlihat di semua jenis pendapatan yaitu PAD sebesar 39,79% (yoy), Pendapatan Dana Transfer sebesar 17,18% (yoy), dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar 59,32% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). 5. Kemandirian fiskal Pemda di Sumsel masih menjadi tantangan karena tingginya ketergantungan pada Dana Transfer. Hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah penerapan opsen pajak hingga Triwulan III 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemda perlu	terutama untuk realisasi pengelolaan anggaran kebutuhan infrastruktur dan belanja barang dengan nilai yang signifikan. • Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan mitra strategis K/L dan Pemda lingkup wilayah Sumatera Selatan perlu memastikan percepatan belanja tidak menyebabkan pemborosan dan menyimpang dari penggunaan sebagaimana semestinya untuk menghindari dampak positif terhadap perekonomian di lingkup Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memonitoring ketercapaian output atas anggaran belanja pemerintah yang digunakan. • KPP Pratama dan Madya lingkup wilayah Sumatera Selatan perlu meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintah yang didanai melalui percepatan belanja. Hal ini termasuk memastikan kepatuhan pajak dari kontraktor dan penyedia barang/jasa yang bertransaksi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. • KPP Pratama dan Madya Lingkup wilayah Sumatera Selatan dapat meningkatkan layanan kepada wajib pajak yang terlibat dalam proyek percepatan belanja, seperti memberikan informasi yang jelas sampai dengan asistensi tentang kewajiban perpajakan dan memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. • KPP Pratama dan Madya Lingkup wilayah Sumatera Selatan bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya Bapenda Sumatera Selatan juga harus memastikan bahwa penerimaan pajak dari daerah yang menerima transfer dana dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi khusus atau dana desa, dapat dikelola dengan baik, baik dalam aspek administrasi maupun kepatuhan pajaknya. 2. Selain itu, upaya spesifik dapat dilakukan KPP Pratama Lingkup Wilayah Sumatera Selatan juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan penyetoran dan pelaporan SPT Masa oleh pemerintah secara bulanan sebagai upaya untuk meningkatkan PPh 21 melalui pengecekan harta kekayaan, aliran dana, dan pendapatan yang diterima. Kegiatan dengan program 5T yaitu tepat subjek, tepat objek, tepat tarif, tepat setor, dan tepat lapor dapat terus dilakukan. Manfaat daripada pengawasan administrasi PPh 21 ini bukan hanya bermanfaat bagi penerimaan pajak pusat saja, melainkan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan juga dapat merasakan manfaatnya melalui dana bagi hasil yang akan diterima, Pengecekan yang dilakukan juga tidak terbatas hanya untuk meningkatkan penerimaan PPh 21, akan tetapi dapat berlaku untuk jenis-jenis pajak lainnya. 3. Sedangkan dari sisi penerimaan PNPB perlu dilakukan optimalisasi penerimaan PNPB dari sumber-sumber lain selain penerimaan PNPB K/L salah satunya dengan upaya peningkatan PNPB dari Sumber Daya Alam yang banyak tersedia di Wilayah Sumsel. 4. Untuk meningkatkan efisiensi TKD di Sumsel, koordinasi lintas <i>stakeholder</i> dan pendampingan teknis terpadu harus ditingkatkan. Fokus pada konsistensi rekonsiliasi pajak pusat, validasi informasi rekening dan supplier, percepatan penyelesaian syarat salur, dan peningkatan kualitas perekaman realisasi. Untuk meningkatkan disiplin administrasi OPD/desa, pemerintah daerah harus memantau dan meningkatkan peran APIP. KPPN dan Kanwil DJPb juga dapat memberikan bantuan teknis melalui klinik TKD, membuat <i>dashboard</i> peringatan dini, dan pendalaman masalah untuk evaluasi kebijakan TKD. Upaya ini diharapkan akan meningkatkan pemerataan kinerja antar pemda dan meningkatkan kualitas belanja daerah. 5. Bappeda bersama dengan OPD terkait perlu menyusun rencana pembangunan tahun depan dengan memprioritaskan belanja mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan berdampak positif terhadap peningkatan PAD dimasa datang.



Kesimpulan	Rekomendasi
mengintensifkan upaya untuk meningkatkan perolehan PAD. 6. Belanja Daerah s.d Triwulan III TA 2025 mengalami sedikit perlambatan sebesar -3,31% (yoy), hal tersebut dikarenakan perlambatan hampir pada semua jenis belanja kecuali Belanja Operasi yang tumbuh sebesar 1,17% (yoy). Mengingat adanya surplus anggaran dan kinerja Pendapatan Daerah yang positif, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengakselerasi Belanja Daerah agar mencapai tingkat optimal di akhir tahun anggaran.	6. BPKAD perlu mendorong dan mengawasi pelaksanaan belanja oleh seluruh OPD. Pengawasan ini bertujuan untuk mempercepat realisasi belanja daerah secara optimal dan menghindari penumpukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang besar di akhir tahun anggaran. 7. Perlu adanya sinergi dan komunikasi antara Kepala Daerah, BPKAD dan OPD selaku pengelola keuangan/pengguna anggaran daerah untuk memprioritaskan kegiatan peningkatan pelayanan ke masyarakat.
III. Analisis Tematik	
1. Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan telah dilaksanakan di seluruh 17 kabupaten/kota. Tercatat ada 335 SPPG aktif dari target 969 SPPG (34,57%) dan 1.003.551 penerima manfaat dari target 2.047.861 orang (49%). Masih terdapat kendala, terutama terkait kualitas makanan yang disajikan dimana di Kota Palembang, terdapat 12 orang di SPPG Kalidoni dilaporkan mengalami gejala keracunan. Insiden ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan, termasuk pemilihan bahan baku, higienitas dapur, penanganan makanan pasca-masak, dan waktu tunggu sebelum makanan didistribusikan. 2. Pasca terbentuknya 3.258 KDMP di Sumatera Selatan, terdapat 363 koperasi (11,14%) yang memiliki kantor, 225 koperasi (6,90%) yang telah beroperasi, dan 1.994 koperasi (61,20%) sudah memiliki modal. 3. Kementerian Koperasi telah melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi pendamping dan pengurus dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kualitas SDM KDKMP dengan materi antara lain hubungan Industrial, Pancasila, tata kelola koperasi, digitalisasi, model bisnis koperasi modern, pembukuan, serta pengembangan inovasi desa. 4. Pemerintah mempercepat realisasi infrastruktur berupa pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapan KDKMP. Kementerian Keuangan merancang skema pembiayaannya dengan mekanisme pemotongan dana Transfer Ke Daerah (DAU/DBH) dan Dana Desa sebagai jaminan pembayaran. 5. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan KPKMP diantaranya adalah tata Kelola, literasi, kolaborasi, regulasi, digitalisasi. Adapun strategi pengoperasian yang dapat dilakukan atas tantangan tersebut adalah pembinaan dan pendampingan, agregasi potensi ekonomi lokal, optimalisasi bonus demografi, transformasi digital, sinergi lintas sektoral.	1. Audit Higienitas dan Standar Kualitas Pihak Ketiga Independen. Kanwil DJPb dapat memfasilitasi dan mendorong BGN serta Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan audit operasional mendalam. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga yang kredibel dan independen, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk menilai kelayakan dapur SPPG secara komprehensif. 2. Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja Profesional. Memastikan bahwa semua SPPG menggunakan tenaga kerja yang profesional dan bersertifikat dalam penanganan dan pengolahan makanan. Pelatihan harus ditekankan pada standarisasi waktu tunggu maksimal dari proses masak hingga distribusi, terutama untuk mencegah kasus makanan basi, sebagaimana yang dicurigai terjadi di Empat Lawang. 3. Implementasi Protokol Pengawasan Berjenjang dan Pelaporan Dini. Sistem pelaporan dini harus terintegrasi antara SPPG, pihak sekolah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sistem ini harus mampu mendeteksi dan menghentikan distribusi makanan yang berpotensi terkontaminasi secara cepat sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat. 4. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada pemerintah daerah di 17 kabupaten/kota. Selain itu, dilakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi (monev) berkala, khususnya bagi KDKMP yang belum beroperasi dengan materi pembinaan difokuskan pada tata kelola organisasi, akuntabilitas laporan keuangan, hingga penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang tepat waktu. 5. Kanwil DJPb bersama dengan KPPN dapat melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana TKD tersebut bersama Pemda. Dengan memonitor realisasi anggaran pada dana desa, DJPb dapat mengidentifikasi kendala penyerapan anggaran dan membantu menemukan solusi. Salah satu Langkah Kementerian Keuangan untuk memastikan KDKMP benar-benar berdiri di desa lingkup Sumatera Selatan. 6. DJPb memiliki akses pada berbagai data keuangan negara. Kanwil DJPb Sumsel dapat menyusun analisis fiskal regional tematik secara rutin mengenai KDKMP dan UMKM. Hasil analisis, lengkap dengan data capaian dan kendala, dapat disampaikan ke pemerintah daerah sebagai masukan untuk perumusan kebijakan.



Referensi

- Antara News. (2024). OJK Sumsel–Babel Kaji Akses Keuangan Petani Kopi.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel. (2025). <https://www.bps.go.id/id>.
- Bank Indonesia. (2025). Laporan Survei Konsumen – September. <https://www.bi.go.id/>.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. (2025). Program Peremajaan 100.000 ha Kopi Empat Lawang (APBD 2025).
- Direktorat Jenderal Bea Cukai. (2025).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025).
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025).
- Logammulia.com. (2025). Harga Emas Hari Ini. <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini>.
- Metrotvnews.com. (2025, 4 September). Sri Mulyani Ungkap Dinamika Ekonomi Global dan Indonesia 2025: Perang Dagang hingga Inflasi. <https://www.metrotvnews.com/read/NOICAvnW-sri-mulyani-ungkap-dinamika-ekonomi-global-dan-indonesia-2025-perang-dagang-hingga-inflasi>.
- Neraca.co.id. (2025). Sumsel Fokus Kembangkan UMKM Sektor Kopi Tahun 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel–Babel. (2024). Siaran Pers: Dorong Pengembangan Ekonomi Daerah, OJK Resmikan Ekspor Perdana Kopi di Sumatera Selatan.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2024). Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kopi Sumatera Selatan Berkelanjutan.
- Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025). Data Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2025. <https://data.bkpm.go.id/dataset-detail/data-realisasi-investasi-triwulan-iii-tahun-2025-B4R76Pg>.
- Sukanto. (2025, Oktober 15). Perkembangan Kredit Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Provinsi Sumatera Selatan.
- Sumselprov.go.id. (2025, 18 September). Kendalikan Inflasi dan Harga Barang, Pemprov Sumsel Gelar Operasi Pasar Murah di Terminal Sako. <https://sumselprov.go.id/detail/berita/kendalikan-inflasi-dan-harga-barang-pemprov-sumsel-gelar-operasi-pasar-murah-di-terminal-sako/baru>.
- Tempo.co. (2025, 19 Mei). Politeknik Negeri Sriwijaya hadirkan inovasi pengeringan biji kopi di Lahat. Tempo. <https://www.tempo.co/sains/politeknik-negeri-sriwijaya-hadirkan-inovasi-pengeringan-biji-kopi-di-lahat-1483739>.
- Worldbank.org. (2025, November). “Pink Sheet” Data. <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>.





Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Kapten A. Rivai No. 2, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30135
Telp. (0711) 356534



djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel/id/



@KanwilDJPbSumsel



@DJPbSumsel



@KanwilDJPbSumsel

ISSN 3047-0994



9

773047

099009